

GERAKAN POLITIK PEREMPUAN PEMILU 2019

*Peta Arus Tim Sayap Gerakan Emak Emak
dan Srikandi Di Indonesia*

DR. HERI JUNAIDI. MA

RUSMIATININGSIH, S.HUM.M.A

CHICI RIMA PUTRI PRATAMA, SEI. ME

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit	
Ketentuan Pidana Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	
1.	Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2.	Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

GERAKAN POLITIK PEREMPUAN PEMILU 2019

Peta Arus Tim Sayap Gerakan Emak Emak dan Srikandi Di Indonesia

Penulis : Dr. Heri Junaidi. MA
Rusmiatiningsih, S.Hum.M.A
Chici Rima Putri Pratama, SEI. ME

Layout : Nyimas Amrina Rosyada

Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV. Amanah

Jl. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Oktober 2020

18 x 25 cm

vi, 193 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-250-239-0

PENGANTAR PENELITIAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga laporan ilmiah dan buku yang merupakan hasil penelitian telah menjadi bagian dari bacaan masyarakat yang *care* terhadap perkembangan pengarusutamaan gender di semua sektor kehidupan bangsa Indonesia. Shalawat dan Salam kepada Junjungan Rasulullah Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju perubahan masa menuju era 4.0.

Buku ini juga menjadi laporan penelitian sebagai jawaban atas berbagai kegelisahan akademik atas aktifitas politik praktis perempuan di Indonesia di tengah budaya *partialkal*, karenanya pertanyaan dasar yang muncul 1) Apakah gerakan kaum perempuan pro demokrasi yang diwakili dengan penamaan “*emak emak*” dan “*Srikandi*” dalam pemilu 2019 untuk membangkitkan eksistensi?; atau 2) Apakah gerakan kaum perempuan tersebut merupakan gerakan “*mumpung*” untuk memperjuangkan aspirasi mereka?; atau 3) Apakah gerakan tersebut merupakan “*pemberontakan*” kaum perempuan ditengah masih meluasnya perdebatan teologis terhadap keberadaan gerakan perempuan di ranah politik praktis?; atau 4) Apakah aktifitas tersebut merupakan pembuktian awal bahwa “Perempuan adalah kunci keberhasilan negara”

Seiring dengan laporan ilmiah dan buku ini diucapkan terima kasih untuk mereka yang telah begitu banyak memberikan bantuan baik motivasi, saran, evaluasi ilmiah, dana dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Pusat Penelitian dan Publikasi LP2M, Partisipan dari penggiat gender dari Pusat Studi Gender dan Anak; Forum PUSPA Sriwijaya, Lembaga lembaga pro gerakan perempuan dan para akademisi. Tanpa mengurangi rasa takzim

dan penghormatan tidak disebutkan satu persatu, biarlah semua menjadi amal jariyah dunia dan akherat. Termasuk para mahasiswa yang digawangi oleh Chici Rima Putri Pratama sebagai asisten peneliti yang intens berkomunikasi untuk penggalian data dan *e-library*. Satu hal yang selalu terpatri bahwa “ubahlah kata Lelah menjadi Lillah, agar semua aktifitas tersurat dan tersirat menjadi lebih berkah karena Allah Swt menyukai hamba-Nya yang pekerja keras namun tetap taat kepada-Nya”.

Dari semua itu, evaluasi untuk perbaikan dari berbagai sudut pandang menjadi bagian penting untuk perbaikan dan pengembangan buku ini.

Palembang, 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Pengantar Peneliti	iii
Daftar Isi	v
 BAB I Pendahuluan.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat	11
D. Literature Review	12
E. Metodologi	15
F. Rencana Pembahasan	20
 BAB II Kerangka Teoritis	 21
A. Pengertian.....	21
1. <i>Gerakan Politik</i>	21
2. <i>Perempuan</i>	24
3. <i>Pemilu</i>	32
4. <i>Peta Arus Tim Sayap</i>	38
5. <i>Emak-emak dan Srikandi</i>	40
B. Instrumen Teoritis	42
C. Peta Gerakan Politik Masa Pemilu di Indonesia	62
 BAB III Perempuan dan Politik di Indonesia	 69
A. Sejarah.....	69

B. Perkembangan.....	84
C. Budaya dan Dinamika Peran Politik Era Kontemporer	97
 BAB IV Gerakan Politik Perempuan Pemilu 2019: Analisis Peta	
 Arus Tim Sayap Gerakan Emak-emak dan Srikandi di	
 Indonesia.....	135
A. Deskripsi Kerja	135
B. Alasan Gerakan Kaum Perempuan Indonesia Pada	
Pemilu 2019	136
C. Ciri, dan Target Gerakan Perempuan Dalam Pemilu	
2019.....	147
D. Dampak Gerakan Perempuan Dalam Pemilu Terhadap	
Perkembangan Struktur Gender Dalam Kepemimpin	
Indonesia Masa Depan	159
 BAB V Penutup.....	167
A. Kesimpulan	167
B. Rekomendasi.....	168
 Daftar Pustaka.....	169
Indeks	178
Glosarium.....	182
Biodata Peneliti.....	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini membantah teori Nurture Ann Okley¹ yang menyatakan bahwa adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui *konstruksi sosial budaya*, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas *borjuis*, dan perempuan sebagai *proletar*.

Bantahan atas hal tersebut digali dari 4 pertanyaan penting sebagai dasar kajian yaitu: 1) Apakah gerakan kaum perempuan pro demokrasi yang diwakili dengan penamaan "emak emak" dan "Srikandi" dalam pemilu 2019 untuk membangkitkan eksistensi mereka sehingga "kerugian perempuan" tahun 2014 pada rasio keterwakilan di parlemen nasional di Indonesia kembali bersejajar dengan kebijakan kuota gender 30%?; atau 2) Apakah

¹Secara etimologi *nurture* berarti kegiatan perawatan/pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan an yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak. dalam *Merriam-Webster*, berasal dari Bahasa Inggris Abad Pertengahan "*norture*," "*nurture*," dari Bahasa *Anglo-French* "*nureture*," dan dari Bahasa Latin "*nutritura*," mulai dipergunakan sejak abad XIV. Selain itu juga dimaknai sebagai kegiatan memberi makan, terutama menyusui. Dinamakan *nurture* karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Karena adanya faktor budaya di dalamnya, argumen ini seringkali juga disebut sebagai konsep *culture*. Tradisi yang terus berulang kemudian membentuk kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami. Lihat Jane Pilcher and Imelda Whelehan, *Fifty Key Concepts in Gender Studies*, London, California, & New Delhi: SAGE Publications, 2004, h. 56-59.

gerakan kaum perempuan tersebut merupakan gerakan “mumpung” untuk memperjuangkan aspirasi mereka yang sebelumnya masih belum memberikan kontribusi luas terhadap harapan kaum perempuan di ranah domestik dan program-program yang direncanakan pada masa pemerintahan sebelumnya? Atau 3) Apakah gerakan tersebut merupakan “pemberontakan” kaum perempuan ditengah masih meluasnya perdebatan teologis terhadap keberadaan gerakan perempuan di ranah politik praktis’; atau 4) Apakah aktifitas tersebut merupakan pembuktian awal bahwa “Perempuan adalah kunci keberhasilan negara”

Keempat pertanyaan tersebut dinilai dalam proses demokratisasi dan perjuangan demi demokrasi yang merupakan ciri penting perkembangan politik di Indonesia. Pentingnya hal tersebut menjadi bagian studi ini sebagai upaya melihat pemetaan arus gerakan politik kaum perempuan di ranah pemilu 2019. Studi ini juga memotret pemilu yang diindikasikan mengundang berbagai kontroversi dan melibatkan banyak gerakan politik dan gerakan politik partisipan, termasuk kelompok kelompok perempuan. Data awal atas hal tersebut dilihat dari berbagai kajian atas berbagai gerakan manuver langkah-langkah otoriter untuk menghalangi lawan-lawannya yang berimplikasi pada aksi yang berpotensi merusak demokrasi Indonesia. dari sisi gerakan kelompok perempuan dengan berbagai nama berusaha juga hadir sebagai bagian dari melepas keengganan untuk berpolitik pasca dominasi laki laki laki pada pemilu 2014 yang lalu².

²Di dalam Jurnal *Women's Studies International Forum* menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia didominasi oleh politikus laki-laki yang berstatus menikah dan berusia antara 40 hingga 60-an tahun dan mengenyam pendidikan tinggi (universitas). Kecenderungan ini telah membuat perempuan enggan memasuki politik karena sistem cenderung memprioritaskan laki-laki. Salah satu akibat dari dominasi pria pada sistem politik di Indonesia adalah masih rendahnya representasi politisi perempuan di DPR. Dalam pemilihan legislatif 2014, hanya 97 dari 2.467 kandidat perempuan yang menang, atau kurang dari 4%. Hasil ini menyeret persentase kursi perempuan di parlemen

Demokrasi patriarkal bagi kaum perempuan atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan public menjadi penting, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Peran serta perempuan dalam segala aktifitas dan pengambilan keputusan adalah bentuk emansipasi dan demokrasi nyata. Sebagai bentuk yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha perempuan untuk mendapatkan hak politik, kesetaraan dan persamaan derajat. Belajar dari negara yang pernah mengalami pengekangan sistem otoritarianisme dan upaya perjuangan demokrasi rakyat partisipasi perempuan menjadi suatu gejala yang relative baru namun sangat menentukan dalam transisi otoriter menuju demokrasi³

Kepentingan studi ini juga menilai kembali pandangan Huntington dalam *karya third wave of Democratization* yang mempertanyakan bahwa demokrasi sulit untuk dikonsolidasikan di banyak negara yang mengalami transisi dari pemerintahan otoriter⁴, bahkan dalam sebagian pandangan dari

menjadi 17,03%, turun dari 18,03% pada pemilihan sebelumnya. Lebih dari 80% kursi dalam pemilihan legislatif 2014 jatuh ke tangan laki-laki. Di antara para wakil rakyat terpilih ini, 75% tinggal di Jawa, dan 90% di antaranya adalah lulusan universitas. Hanya kurang dari 2% adalah anggota parlemen berusia muda yakni di bawah 30 tahun. Beberapa pandangan lain lihat “Keterwakilan Perempuan di Parlemen” dalam women research institute, Promoting women leadership and inclusive, gender-based, and sustainable natural resource governance, diakses dalam www.wri.or.id/editoria; lihat juga Ella Syafputri, “Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan”, *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, vol. 1. Nomor. 2, Desember 2014, h. 165, untuk perbandingan lihat juga Laura Hardjaloka, “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012

³ Platform Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional.

⁴ Lebih luas lihat Samuel Huntington, *The third wave of Democratization in the late twentieth century*, London, University of Oklahoma Press, 1991

kesimpulan kasus bahwa elite terbatas yang memimpin proses demokratisasi nampak menghindari reformasi demokratisasi dan sosioekonomi yang lebih besar, sehingga demokrasi intentitas rendah hanya memperjuangkan satu sisi utama demokrasi seperti halnya di Indonesia⁵. kualitas kejujuran menjadi dasar bergeraknya perjuangan masa pemilu 2019.

Berdasarkan kajian awal gerakan sayap kelompok perempuan yang mendukung Jokowi-KH. Ma'ruf Amin mendeklarasikan diri dengan nama ibu bangsa dan beberapa nama lainnya seperti Srikandi Indonesia, Super Jokowi (Suara Perempuan untuk Jokowi), perempuan keren, energik, religius dan nasionalis (Perempuan KEREN). perempuan Bravo 5. Secara umum dukungan atas Jokowi dengan 4 alasan yaitu: *Pertama*, peningkatan dalam layanan kesehatan dasar, terutama untuk kesehatan reproduksi perempuan; *Kedua*, sistem pendidikan gratis yang menjamin anak perempuan mendapatkan pendidikan dan mencegah pernikahan anak. *Ketiga*, lebih banyak peluang untuk program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan bantuan bagi penyandang cacat melalui Program Keluarga Harapan. *Keempat*, reformasi agraria yang memberi lebih banyak keuntungan bagi perempuan adat Pendukung perempuan Prabowo-Sandiaga Uno terdiri dari emak emak yang tergabung dalam MAKBUL, Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi (Pepes), Gerakan Rabu Biru (GRB), Perempuan Prabowo. Secara umum, para pendukung perempuan adalah mereka yang aktif dalam organisasi masyarakat dan memiliki jejaring sosial yang kuat, efektif dalam kampanye di akar-rumput.

Sejalan dengan dinamika pemilu dan pelibatan perempuan masih merupakan isu utama di berbagai belahan dunia. Pada negara-negara yang

⁵ Barry Gills dan Joel Rocamora, "Low Intensity Democracy", Third World Quarterly, Vol. 13. No, 3, h. 501-523

sistem demokrasinya telah mapan sekalipun, persoalan perempuan dan politik selalu menjadi topik penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Terlebih lagi di dalam negara yang sedang membangun, di mana budaya patriarki¹ masih kokoh, maka tema wanita dan politik senantiasa memicu perdebatan sengit. Hal tersebut di latar belakang oleh beragam kepentingan, mulai dari politik, historis, agama hingga tradisi dalam masyarakat. Hal tersebut, tidaklah mengherankan, karena memang dalam masyarakat di Indonesia terdapat satu “aksioma” bahkan telah menjadi “ortodoksi”, dimana dianggap bahwa kaum pria merupakan pemimpin bagi perempuan. Dalam sejarah panjang sejarah umat manusia telah dikonstruksikan bagaimana dunia politik atau dunia publik (*public world*) merupakan aktivitas yang didominasi kaum lelaki, tidak banyak yang mencatat keberhasilan kaum perempuan dalam tugas kepemimpinan politik⁶.

Sejarah Indonesia mencatat Putri Mardika yang dibentuk pada 1912 merupakan organisasi perempuan pertama di Indonesia yang menuntut hak hak demokratis, menentang poligami dan perkawinan kanak kanak⁷, namun demikian struktur gender sejak pasca kemerdekaan menjadi bagian yang terus dikaji sejalan dengan perkembangan pendidikan kaum perempuan di Indonesia. Mereka sudah mulai menggugat gerakan resmi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang beroritasi pada peran perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan pendukung setia keluarga. Organisasi tersebut dipandang sebagai alat untuk mengukuhkan subordinasi atas

⁶ Mulia dan Anik, 2019 dikutip dari Yusuf Fadli, “Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, No. 1, April 2019, h. 41-63

Lebih luas sejarah organisasi tersebut dapat dilihat Kumari Jayawardena, *Feminism and Nationalism in The Third World*, London: Zed Book, 2000, h. 146, 149

perempuan dan sebagai integral dari ideologi otoriter orde Baru ketika itu yang memandang keluarga sebagai unit terkecil masyarakat⁸

Kehadiran Islam memposisikan kemitrasejajaran laki laki dan perempuan dalam dua sudut pandang. Kelompok yang berpandangan bahwa Islam tidak mengakui adanya hak-hak politik bagi perempuan. Mereka berargumentasi bahwa jika perempuan menjadi pemimpin atau memanku jabatan akan berimplikasi pada pembangkangan kepada suaminya. Disamping itu tidak adanya hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum mempersulit perempuan untuk menjabat. Mereka juga bersandar pada QS. An-Nisa/4:34. Perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar rumah kecuali karena suatu kepentingan yang sangat mendesak, tidak berhias, menutup diri dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul sesama mereka. Inilah yang berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya bagi perempuan⁹.

M. Thahir Maloko menulis alasan tidak mengakui politik perempuan yang dikutip Dari Abu Bakri, Rasulullah saw bersabda” Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan (HR. Bukhari). Berdasarkan hadis tersebut disimpulkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menduduki jabatan umum apapun. Sebab hal itu tidak menjadi kewenangannya dan tidak membawah kemenangan dan kesuksesan, justru sebaliknya mendapat kerugian, sedangkan kerugian sedapat mungkin harus dihindari. Argumen ini didasarkan pada persepsi bahwa perempuan

⁸ Saskia Wieringa, “Two Indonesian Women’s Organization: Gerwani and PKK, *Bulletin of concerned Asian Scholars*, Vol 25. No. 2, h. 17-33; Lihat Juga, Heri Junaidi, *Wong Kito Galo: Penelusuran gerakan Pluralisme di Sumatera Selatan*, Palembang: Refah Press, 2012.

⁹ Lihat Hartono A. Jais, *Polemik Presiden Wanita* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 88; Ikhwani Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender* (Cet. I; Bandung: Amzah, 2002), h. 41.

lebih mendahului emosi dari pada pertimbangan akal. Sifat- sifat kodratnya yang demikian tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah yang penting¹⁰.

Kelompok yang menentang aktifitas perempuan di ranah publik juga berpandangan bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin, yang berlaku adalah tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik. Terbukti adanya sejumlah kaum perempuan yang terlibat di bidang intelektual seperti isteri-isteri Nabi saw, tetapi mereka tidak diminta partisipasi dalam persoalan politik. Para pendukung pendapat ini yang berdasarkan qiyas melihat adanya perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan, seperti (1) tidak diperbolehkan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam masyarakat, seperti sholat lima waktu, sholat jumat, sholat ied; (2) perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan thalak yang ditetapkan oleh syariat, sedangkan hak thalak terdapat pada kaum laki-laki bukan pada kaum perempuan; (3) perempuan tidak diperbolehkan bepergian sendiri tanpa didampingi mahram atau yang dipercayainya; (4) perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat jumat secara berjamaah¹¹. Pendapat ini berakhir pada anggapan bahwa syariat Islam tidak membolehkan perempuan memperoleh hak-hak politik secara umum. Sebagaimana perempuan tidak boleh menduduki jabatan apapun yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

Kelompok yang membuka peluang perempuan dalam politik berangkat dari . Sejarah kebudayaan Islam yang mencatat pada zaman Nabi

¹⁰ M. Thahir Maloko, "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tinjauan Alqur'an Dan Hadis, Jurnal AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013, h. 205

¹¹ Lihat, Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender* (Cet. I; Bandung: Amzah, 2002), h. 45.

Muhammad saw telah ada perempuan yang ikut serta dalam masalah-masalah yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan demikian, perempuan tidak hanya sebagai isteri pendamping dan pelengkap suami, tetapi setara dalam hak dan kewajiban dengan laki-laki di hadapan Allah swt. Perempuan juga memiliki hak politik, hak sipil dan hak aktualisasi diri yang merupakan substansi Hak Asasi Manusia (QS. At-Taubah/9:71). Di dalam QS. Al-Hujurat/49:1 dan QS. An-Nisa/4:1 menegaskan pula yang menjunjung tinggi persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan juga boleh berbai'at kepada Rasulullah saw sebagaimana halnya laki-laki. Allah swt memerintahkan untuk menerima bai'at dari padanya (QS. Al-Mumtahanah/60:12)¹².

Dalam politik Islam, sebagian ulama tidak memberi batasan toleransi perempuan dengan dasar, *Pertama*, pilihan perempuan terhadap orang lain tidak keluar dari konteks, perempuan sebagai seorang yang menyerahkan kepercayaannya kepada orang lain untuk membela hak-haknya dan menyuarakan aspirasinya atau memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa perempuan mampu melaksanakan tugas sebagai wakil masyarakat dan membela kemaslahatan umat. Kedua, Pembai'atan perempuan kepada Rasulullah saw adalah pembai'atan yang berhubungan dengan pemerintahan dan negara. Kaum perempuan memberikan bai'at kepada Rasulullah saw pada Baiatul Aqabah I dan II. Maksudnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bai'at disini adalah mengikut sertakan perempuan dalam hak politik dan mengharuskan mereka. Perempuan tidak ikut serta memberi *bai'at khulafaur Rasyidin* pada abad pertama Islam, sehingga Al-Juaeni mengemukakan

¹²M. Thahir Maloko, "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tinjauan Alqur'an Dan Hadis, Jurnal AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013, h. 205

bahwa kaum perempuan tidak mempunyai akses untuk memilih imam dan memberikan akad imamah. Mereka tidak dijadikan mematuhi. Ketiga, Islam tidak mencabut hak perempuan dan tidak melarang ikut dalam aspirasi dan berpendapat, melainkan Islam memberikan kebebasan yang penuh sebagaimana halnya kaum laki-laki¹³.

Berbagai kajian *fiqh siyasah dusturiyah* baik yang mendukung maupun menentang terhadap partisipasi politik perempuan dengan berbagai dalil tersebut namun secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajaran, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang pada syariat Islam. Berbagai analisis kritis atas gerakan tersebut juga menjadi bagian penting dalam membedah dinamika tersebut. Seperti pandangan Dyah Ayu Kartika dalam tulisannya "*What Will Indonesian Women Win This Election?*" dimana adanya asumsi dari visi terkait isu perempuan "Perempuan adalah kunci keberhasilan negara. Perempuan didorong untuk memiliki posisi penting dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai ibu dari bangsa, perempuan mendidik anak-anak, meningkatkan mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, dan menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat". Visi tersebut merupakan eksplorasi Orde Baru dalam menyebarkan peran gender yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Menjadi perempuan yang ideal berarti menjadi ibu dan istri, yang tanpa pamrih mendukung pekerjaan suaminya sambil mendidik anak-anak

¹³ Asma Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 69

untuk menjadi warga negara yang baik. Konstruksi Ideologi gender negara seperti itu melucuti perempuan, dari seorang individu yang bebas menjadi seseorang yang identitasnya dimiliki orang lain: suami atau anak-anak. Mereka bisa aktif dalam ruang publik selama mereka mewakili keluarga, bukan diri mereka sendiri. Wacana itu diteruskan dari generasi ke generasi dan, dalam kasus perempuan, dibungkus lebih kuat dalam gagasan kodrat, atau sifat bawaan seorang perempuan. Perbincangan yang dimunculkan kemudian dinilai hanya melihat masalah perempuan terbatas pada masalah rumah tangga. Masalah penting lain diabaikan, misalnya perlindungan dari kekerasan dan kesetaraan gender di tempat kerja. Dalam hal ini, mobilisasi para pendukung perempuan justru berpotensi kian merendahkan perempuan.

Perempuan dalam bingkai sejarah memang selalu menjadi korban “sejati” dari kebijakan negara yang otoriter. Penindasan ekonomi politik dari kebijakan rezim selalu menimpa “lebih” terhadap perempuan, sehingga semakin jelas landasan kita untuk memahami, kepentingan perempuan terlibat dalam perlawanan anti rezim otoriter Perempuan yang pada saat rezim otoriter “dianugerahi” posisi terbawah dari struktur sosial menjadi semakin berkepentingan untuk memastikan jalur dan kekokohan transisi demokrasi agar tidak terjerumus dalam penindasan yang berulang.

Antara kesejatan dan bingkai demokrasi masih menjadi bagian penting perdebatan ketidaksetaraan, walaupun demokrasi menjadi salah satu jalan perempuan untuk menuju pembebasan. Keseluruhan persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masa kediktatoran baik yang bersifat gender praktis maupun gender strategis (Molyneux) membutuhkan partisipasi langsung dari perempuan terhadap struktur masyarakat yang baru jika tidak ingin dikembalikan pada “takdir ilmiahnya” setelah sistem demokrasi menemui singgasananya. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif,

DPR dan DPD, diperlukan agar kepentingan perempuan tersuarakan dalam penyusunan kebijakan, program, terlebih soal anggaran yang berimplikasi pada hajat hidup orang banyak, tak terkecuali perempuan Indonesia¹⁴.

B. Rumusan Masalah

Dalam menguji berbagai gerakan yang dilakukan perempuan pro demokrasi baik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jakowi- KH. Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno dibangun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan kaum perempuan Indonesia serta alasan yang membentuk terjadinya gerakan kaum perempuan Indonesia pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana ciri, dan target gerakan perempuan pada masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019?
3. Bagaimana dampak gerakan perempuan dalam pemilu terhadap perkembangan struktur gender dalam kepemimpinan Indonesia masa depan?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Mengetahui gerakan kaum perempuan Indonesia serta alasan yang membentuk terjadinya gerakan kaum perempuan Indonesia pada Pemilu 2019
- b. Menjelaskan ciri, dan target gerakan perempuan pada masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019

¹⁴ Lihat juga pandangan Ima Resmiyanti, "Perempuan Dalam Bingkai Demokrasi", diakses dari umpo.ac.id/571-perempuan

- c. Menganalisis dampak gerakan perempuan dalam pemilu terhadap perkembangan struktur gender dalam kepemimpinan Indonesia masa depan

2. Manfaat

- a. Dari Sisi teoritis penelitian ini bermanfaat dalam membaca peta perkembangan pergerakan kaum perempuan di Indonesia di ranah politik, serta isu-isu yang berkembang untuk selanjutnya menjadi bahan kajian studi lanjut normatif
- b. Dari aspek praktis Penelitian juga bermanfaat dalam upaya mengokohkan jati diri dan kualitas intelektual, kemampuan di lapangan serta berbagai langkah-langkah strategis yang dapat dijadikan bahan penilaian kelas gender perempuan kontemporer di ranah politik di Indonesia terutama dalam kepemimpinan Indonesia masa depan

D. Literature Review

Secara khusus kajian yang membahas pergerakan perempuan di Indonesia pada Pemilu 2019 belum bisa ditemukan karena penelitian ini merupakan penelitian awal pasca pemilu 2019. Secara umum didapatkan beberapa studi yang mengkaji gerakan perempuan dipentas politik. Yusuf Fadli dalam studinya “Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi” memberikan informasi bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam, perempuan dan politik dalam pasca Orde Baru. khususnya bagaimana keterlibatan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan kesetaraan gender yang dilandasi pada nilai-nilai Islam.

Pasca reformasi, gerakan wanita NU masuk ke dalam wilayah politik untuk memperbaiki kondisi sosial wanita yangtelah lama ditepikan¹⁵.

Loura Hardjaloka, dalam karya hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal berjudul Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi” menggali berdasarkan Dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, “*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”, Pasal 28D ayat (3) yang bunyinya, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”, seharusnya menjadi landasan untuk dijaminnya hak politik perempuan. Namun, seringkali parpol-lah yang mengabaikan urgensi keterwakilan perempuan ini. Selain ketentuan dalam UUD 1945, terdapat juga UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 8 CEDAW serta Konvensi Hak-hak Politik Perempuan yang kesemuanya menyuarakan bahwa perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Akan tetapi, urgensi akan keterwakilan perempuan di dunia politik terhambat dikarenakan stereotip negatif terhadap kemampuan perempuan¹⁶.

Beberapa penelitian tentang gerakan perempuan pro-demokrasi terutama masa sejarah Indonesia dilakukan oleh Wardah Hafidz dalam suntingan Fauzi Ridjal¹⁷, Istiadah¹⁸, dan Wahidah Zein, Br Siregar¹⁹. Susan

¹⁵ Yusuf Fadli, “Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, 2017

¹⁶ Loura Hardjaloka, “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012

¹⁷ Wardah Hafidz, “Sumbangan Gerakan Perempuan Dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia, Dalam Suntingan Fauzi Ridjal, et el, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000

¹⁸ Istiadah, “ Muslim Women in Contemporary Indonesia: Invistigating Paths to Resist The Patriachal System, Monash University, tt.

Blackburn menguraikan relasi mutualisme antara negara dan gerakan perempuan serta dampaknya terhadap transisi politik Indonesia menuju demokrasi. Era kolonial (1900-1942) disimpulkannya dalam **masa** pengaruh doktrin gander-kolonial terhadap kebangkitan gerakan perempuan sangat jelas, eksponen aspirasi awal yang paling terkenal dari gerakan perempuan Indonesia adalah Raden Ajeng Karini (1879-1904) menjadi promotor gerakan perempuan yang memperjuangkan hak pendidikan dan simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, Kartini mewakili simbol kecerdasan, keberanian, ide dasar emansipasi wanita serta perjuangan atas penindasan dan masalah sosial.

Era Embrio Negara Demokrasi hingga Demokrasi Terpimpin 1949-1965 Terjadi gerakan perempuan untuk membangun identitas dan aktivisme sosial-politik hingga tingkat lokal. Kemudian era Gerakan Perempuan Pasca-Reformasi 1998- 2019 Sekarang hak perempuan dijaga dan dijamin oleh konstitusi. Jika aktivisme perempuan di Barat berujung pada penindasan, maka gerakan perempuan dalam catatan sejarah Indonesia berkembang secara dinamis²⁰.

Purwanto²¹ dan Ruth Indiah dalam Kajian Gerakan Perempuan Indonesia dalam Belenggu Historiografi Indonesia-*Androsentris* lebih menggugat bahwa gerakan perempuan di Indonesia masih sangat terbatas. Bukan saja terbatas pada bilangan perempuan yang berminat untuk menulis sejarah tersebut, tetapi karena sejarah Indonesia selalu ditulis oleh (sejarawan) laki-laki maka hasilkan ceritera yang memberi eksistensi negeri

¹⁹ Wahidah Zein Br Siregar. Responses of Muslimat and Fatayat to the quota for women in the 2004 elections. Surabaya: Fakultas Da'wah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2008

²⁰ Susan Blackburn, *Woman and the State in Modern Indonesia*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004))

²¹ Purwanto, Bambang, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*, Jogjakarta: Ombak, 2006

ini seperti (hanya dihuni) laki-laki. Ceritera sejarah yang berpusat pada laki-laki ini disebut *androsentris* dan selama ini telah kita anggap sebagai kebenaran adanya sejarah manusia, khususnya manusia yang menghuni ruang bernama Indonesia²²

Di dalam perseptif Islam, gerakan perempuan dibahas oleh Muhammad Anas Qasim Ja'far pada 2001 yang mengajak untuk melakukan pendalaman atas kualitas perempuan disubordinasi dalam kancah perpolitikan²³, Rusnila dalam karyanya menyimpulkan bahwa Islam mengakui posisi perempuan dan mengakui kemanusiaan perempuan. Islam menghapus segala bentuk diskriminasi, menempatkan perempuan pada tempat yang mulia. Kedudukan perempuan dalam pandangan Islam tidak sebagaimana dipraktikkan dalam masyarakat. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang besar dan kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam telah berhasil mengangkat derajat kemuliaan perempuan. Perempuan memiliki peran politis dalam rangka menegakkan kalimat Allah (Peran Dakwah)²⁴.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan

²²Ruth Indiah Rahayu, "Konsstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari tutur Perempuan", Hasil penelitian Historiografi Nasional. 2007

²³ Muhammad Anas Qasim Ja'far, *Mengembalikan hak-hak politik perempuan sebuah perspektif Islam*. Jakarta: Azan. 2001

²⁴ Rusnila, *Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Islam*, Pontianak: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami²⁵.

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan jenis studi dokumen yang merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, termasuk kajian-kajian penting seputar pergerakan perempuan masa pemilu 2019 di media internet dalam situs-situs resmi untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan²⁶.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian digali dari berbagai informasi otoritatif yang diakses dari situs-situs resmi kelompok-kelompok perempuan dari kedua kubu (Jakowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno). Beberapa situs yang akan menjadi bahan telaah seperti situs *Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga*. tirto.id; nasional.kompas.com, situs *Partai emak emak*; www.suarasurabaya.com; www.tagar.id. Beberapa data baik yang dikelola melalui e-media (kompas, tribun, media digital), media sosial, group

²⁵ Heri Junaidi, *Temu Kenali Metode Penelitian Kualitatif*, Palembang: UIN RF, 2018; sebagai perbandingan lihat juga Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, cet.1 h. 11

²⁶ Lebih luas lihat Mudjia Rahardjo, "Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif", www.uin-malang.ac.id

whassap, maupun dari berbagai informasi media nasional juga menjadi sumber data yang tidak bisa diabaikan

3. Latar penelitian

Penelitian ini mengkaji dari hasil pemahaman atas gerakan perempuan pro demokrasi yang mengusung pasangan baik Jakowi-KH Ma;ruf Amin; dan Prabowo-Sandiaga, isu yang disampaikan, visi, misi pergerakan yang sejalan dengan program besar calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung masing masing.

4. Subjek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Yaitu responden dan ada juga yang mengistilahkan *informant* karna memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut. Istilah lain adalah *participant*. Partisipan digunakan, terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Istilah informan dan partisipan tersebut secara substansial dipandang sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif²⁷.

Dalam studi ini teknik pemilihan partisipan (*sampling participant*) *purposif sampling*, sampel dipilih bergantung pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya. Pernyataan atau pengakuan tidak ditemukannya informasi dan dipengaruhi oleh pertimbangan dana dan waktu yang telah dianggarkan sejak dimulainya penelitian. Responden, informan maupun partisipan

²⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009 cet.1, h.88

studi ini diambil dari beberapa pandangan tokoh perempuan yang berada di Sumatera Selatan sebagai basis studi ini. Seperti akademisi perempuan, ketua Lembaga perempuan Pro Demokrasi, Pusat Studi Gender; dan Forum PUSPA Sriwijaya. Dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur untuk menggali penilaian atas berbagai informasi yang muncul dalam wacana dokumentasi/teks yang didapat dari pesan media, e-media, dan berita media sosial yang otoritatif.

5. *Teknik Pengumpulan Data*

Pengumpulan data menggunakan dua teknik, yaitu dokumentasi dan wawancara yang dideskripsikan sebagai berikut:

a. *Dokumentasi*

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan gerakan perempuan pro demokrasi pada masa pemilu dengan melibatkan 2 peta kelompok dari calon presiden Jakowi-KH.Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Data yang akan menjadi fokus dari nama lembaga, sejarah dan pelaku, visi, misi serta aktifitas yang dilakukan selama masa kampanye. dokumentasi tersebut akan menjawab gerakan kaum perempuan Indonesia serta alasan yang membentuk terjadinya gerakan kaum perempuan Indonesia pada Pemilu 2019; ciri, dan target gerakan perempuan pada masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2019

b. *Wawancara*

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan pandangan atas aktifitas perempuan tersebut terutama dalam menjawab hubungan muslimah Indonesia dengan gerakan kaum perempuan dalam pemilu 2019 serta dampak gerakan perempuan dalam pemilu terhadap

perkembangan struktur gender dalam kepemimpinan Indonesia masa depan?

6. *Tehnik Analisis Data*

Menganalisis data penelitian adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan jawaban asumsi yang muncul dalam studi ini seperti yang disarankan oleh data. Mengadakan pengamatan dan wawancara tak struktur yang dipandang lebih memungkinkan dilakukan, dengan alasan bahwa peneliti telah memiliki basis dalam ilmu pengetahuan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti dapat menjadi instrumen penting yang menuangkan makna gerakan politik alat peneliti utama atau *key instrument*. Dalam ranah tersebut dapat dinilai makna di setiap perilaku atau tindakan obyek penelitian, sehingga ditemukan pemahaman orisinal terhadap masalah dan situasi yang bersifat kontekstual.

Dalam analisis data juga menggunakan *Triangulasi*, data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Misalnya dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tingkat kepercayaannya. Selanjutnya menggunakan perspektif emik, artinya membandingkan pandangan responden dalam menafsirkan dunia dari segi pendiriannya sendiri. Peneliti tidak memberikan pandangan atas apa yang ada, tidak melakukan generalisasi ketika memasuki lapangan, bahkan seakan-akan tidak mengetahui apapun yang terjadi di lapangan, dengan demikian, ia dapat menaruh pengertian pada konsep-konsep yang dianut partisipan.

Hasil tersebut diverifikasi, antara lain melalui kasus yang bertentangan untuk memperoleh hasil yang lebih dipercaya. Peneliti mencari berbagai kasus yang berbeda- beda atau bertentangan dengan yang telah ditemukan, dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat tingkat kepercayaanya dan mencakup situasi yang lebih luas yang memungkinkan baginya untuk memadukan berbagai kasus. Data yang sudah didapat disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang “*grounded*” maka perlu dicari data lain terutama analisis peneliti lain untuk melakukan pengujian kesimpulan tentatif tadi terhadap pokok kajian.

F. Rencana Pembahasan

Penelitian ini dikaji dalam lima bab yang terdiri dari BAB I sebagai pendahuluan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu instrumen teoritis, dan metodologi serta sistematika penulisan. BAB II Dinamika Pemilu di Indonesia yang berisi pemahaman, sejarah dan perkembangan pemilu dihubungkan dengan warisan otoriter dan demokratis sebagai upaya menilai demoktarisasi di Indonesia adalah mungkin. Dibahas juga Islam dan demokrasi, wacana demokrasi dan pemilu serta aktor dan kelembagaan yang bergerak selama masa sejarah pemilu

BAB III membahas gerakan perempuan pro-demokrasi serta isu yang dibangun. Sejarah serta hasil penelusuran peta gerakan perempuan pada pemilu tahun 2014 dan 2019 sebagai upaya mengokohkan nilai nilai, aktifitas serta hasil gerakan. BAB IV merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Diakhiri dengan BAB V berupa kesimpulan, urgensi dan rekomendasi.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian

1. *Gerakan Politik*

Istilah gerakan politik dari kata gerakan dan politik. Secara etimologi gerakan memiliki dua arti. 1) Gerakan berasal dari kata dasar gerak, *motion* (Bahasa Inggris), *motio*, *movere* (bahasa Latin) dan *harakah* (Bahasa Arab) yaitu menggerakkan atau memindahkan, yaitu suatu perubahan. Dalam arti klasik, gerakan (kinesis), mencakup semua bentuk perubahan dalam kualitas, kuantitas, posisi, bentuk, dan potensi. Sedangkan secara khusus, gerakan adalah perubahan lokasi spasial dari benda-benda yang berhubungan satu sama lain. Proses (tindakan atau keadaan) perubahan tempat (posisi)²⁸.

Gerakan diartikan juga dengan sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda; 2) Gerakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga gerakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. adalah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik²⁹. Kamus Istilah Politik Dan kewarganegaraan adalah suatu kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perbaikan-perbaikan pada lembaga politik untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang baru melalui jalan politik. Gerakan ini lebih terbatas dari pada partai politik dan cenderung bersifat fundamental dan ideologis³⁰

²⁸ Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal, 277

²⁹ Sumber: <https://lektur.id>

³⁰ Deni Kurniawan. 2006. *Kamus Istilah Politik Dan Kewarganegaraan*. Bandung:

Dalam buku *Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif* menyebutkan bahwa bahwa gerakan merupakan media dari masyarakat untuk menyampaikan rasa ketidak puasan sosialnya kepada penguasa. Disamping itu menurutnya gerakan muncul dari satu golongan yang bersifat terorganisasi, mempunyai asas dan tujuan yang jelas, berjangkauan panjang serta mempunyai ideologi baru sehingga dapat ikut serta menciptakan sebuah masyarakat yang maju³¹. Beberapa ahli lainnya memahami gerakan seperti Rustam E. Tamburaka yang menyebutkan Suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolusi, karena menggambarkan peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Urutan secara kronologis merupakan teori untuk menggambarkan gerak sejarah³². Sementara Muchtar E. Harahap menjelaskan bahwa gerakan adalah suatu kekuatan yang terlibat dalam perjuangan rakyat dalam perspektif demonstrasi sosial masyarakat politik.

Politik didasarkan dari bahasa Yunani yakni polis yang memiliki arti Negara kota. Kemudian jika dilihat dari etimologi Politik sendiri masih terkait dan erat hubungannya dengan asal kata politis sehingga masih ada hubungannya dengan politik. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Kata politisi adalah orang yang menjalankan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan dunia Politik. Menurut para ahli politik dipahami dalam berbagai persepektif. Andrew Heywood menyatakan bahwa Politik memiliki arti suatu kegiatan bangsa yang memiliki tujuan dalam membuat, mempertahankan, dan mengamandemen berbagai peraturan yang umum mencakup mengatur kelangsungannya, sehingga dalam hal

Yramawidia, 2006, hal.68

³¹Basrowi dan Sukidin. *Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendikia, 2003, hal. 17

³² Rustam E. Tamburaka. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, Dan Politik*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2006, hal.52

ini tidak terlepas dari gejala konflik serta kerjasama³³.

Roger Soltau menyebut politik sebagai sebuah ilmu yang meneliti Negara, tujuan Negara, serta lembaga Negara yang ada di dalamnya yang mana melaksanakan tujuan tersebut. Termasuk hubungan antara Negara terhadap warga negaranya dan juga Negara lain³⁴. Sementara Paul Janet dalam bukunya *political science* seperti dikutip Kumar mengungkapkan bahwa politik merupakan ilmu yang mengatur terkait dengan perkembangan Negara termasuk prinsip pemerintahannya³⁵. Berbeda keduanya Harold Laswell menyebut politik merupakan suatu ilmu yang mempelajari berbagai ruang lingkup negara diantaranya seperti pembentukan dan pembagian kekuasaan³⁶.

Ramlan Surbakti dalam dalam buku *Memahami Ilmu Politik* menyatakan bahwa politik memiliki arti tersendiri yakni sebuah proses interaksi dengan pemerintah serta masyarakat bertujuan menentukan kebaikan terhadap masyarakat yang berada pada suatu wilayah tertentu³⁷. Sementara Isjwara menyatakan bahwa politik merupakan sebuah perjuangan yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai dasar teknik menggerakkan kekuasaan³⁸. Berdasarkan etimologi dan terminologi tersebut maka gerakan politik adalah media menyampaikan rasa yang tumbuh dan berkembang secara evolusi, sebagai suatu kekuatan yang terlibat dalam perjuangan suatu kegiatan bangsa yang memiliki tujuan dalam membuat, mempertahankan, dan

³³ Andrew Heywood, *Global Politics*, London: Macmillan, UK, h, 9

³⁴ Roger Soltau, *Introduction to Politics*, London: Longman Green, tt

³⁵ Raj Prithi Kumar, *Nature and scope of political science*, tp: Discovery Publishing, 2005, hal. 69

³⁶ Harold Laswell, *Propaganda Technique in The world War*. India: Gueere Mundela, 2013, hal.77

³⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010, h. 3

³⁸ Isjwara F, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Dhiwantara, 2000, h.1

mengamandemen berbagai peraturan yang mengatur terkait dengan perkembangan Negara termasuk prinsip pemerintahannya.

Gerakan politik dapat bekisar disekitar satu masalah atau dari rerangkaian isu permasalahan atau sekitar timbunan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak terorganisir dan memiliki keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan publik atau masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut³⁹. Dalam konsep umum gerakan politik yang melibatkan massa, atau sosial sebetulnya merupakan gejala psikologis massa dalam komunikasi yang sporadis seperti dalam teori S-R (Stimulus-Respons) karena adanya suatu rangsangan (stimuli) serta pesan yang telah tersampaikan atau diterima oleh sekelompok orang karena adanya respons atau tanggapan.

2. Perempuan

Etimologi perempuan dari kata *empu* yaitu tuan, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar⁴⁰. Diartikan juga dihargai⁴¹. Zaitunah menjelaskan kata perempuan beda dengan wanita. Kata dasar wanita adalah *wan* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti nafsu, sehingga kata perempuan mempunyai arti yang dinafsuai atau

³⁹ Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*, Jogjakarta: Gafurapublishing, 2014, h. 150

⁴⁰ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002, h. 501

⁴¹ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, h.1

merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata perempuan ke wanita adalah merubah objek jadi subjek⁴². Sementara perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran.

Kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya. Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya⁴³.

Gambaran perempuan dalam pandangan medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat⁴⁴. Kartini Kartono menyatakan bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan

⁴² Dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like*, *wish*, *desire*, *aim*. kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampayanya *wanted*. Sehingga kemudian dipahami bahwa perempuan adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan. Lihat *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hal. 448

⁴³ Murtadlo Muthahari. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995, hal. 107

⁴⁴ Murtadlo Muthahari. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, h. 108

pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu⁴⁵.

Mansour Fakih menyebutkan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (*kodrati*) tertentu. Laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki *jakala* (Jawa: *kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar⁴⁶.

Konstruksi sosial membangun perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya membentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Otonomisasi kaum perempuan menjadi terpasung, kehilangan kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan tersebut⁴⁷. Secara normatif, manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki

⁴⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 200, h. 4

⁴⁶ Mansour Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2005, h. 135. Arti ayat Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁴⁷ Dwi Ambarsari, *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*, Cet. I, Surakarta: Patti, 2002, h. 3

sesuatu, serta hak untuk mengenyam pendidikan. Ketiga hak tersebut merupakan kodrat manusia. Siapapun tidak boleh mengganggu dan harus dilindungi⁴⁸. Dalam Islam, Laki laki dan perempuan merupakan makhluk Tuhan yang satu, memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, diskriminasi hidup tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran Tauhid seperti termaktub dalam QS Al-Hujuraat Ayat 13⁴⁹.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Konsep penciptaan perempuan merupakan hal yang sangat mendasar untuk dibahas.. Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci tentang asal-usul penciptaan perempuan, tetapi Al-Quran menolak berbagai persepsi yang membedakan diantaranya Q.S. Annisa Ayat 1⁵⁰.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

⁴⁸ Trisakti Handayanirakat, *Memperjuangkan Hak Asasi Perempuan*, dalam Suara Wanita, Malang: Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan. Universitas Muhammadiyah Malang. 2008. h. 9. perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai *puki*, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Sedangkan wanita adalah perempuan dewasa. Dari sini dapat diketahui, bahwa perempuan adalah manusia yang mempunyai puka tidak dibedakan umurnya. Tetapi kalau wanita adalah perempuan yang sudah mencapai dewasa.

⁴⁹ Lihat Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2009, h. 11

⁵⁰ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam Hadits disebutkan

دَنَّا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ
الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي
الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ ٥١

Takhrij Hadis Muslim 2670

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ
ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَهِيَ عَوَجٌ وَإِنْ ذَهَبَتْ
تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرُهَا طَلَاقُهَا

Tirmidzi 1109

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عَوَجٍ
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ

⁵¹“Saling berpesanlah kalian (bermakna: tawasau) untuk berbuat baik kepada kaum perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Maka jika kamu berusaha untuk meluruskannya, kamu akan mematahkannya, dan jika kamu membiarkan sebagaimana adanya maka ia akan tetap dalam keadaan bengkok. Maka saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada kaum perempuan. ”

Ahmad 9419

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلْعِ إِنْ ثَقُمَهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَتْرُكَهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ

Ahmad 10044

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَارِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النِّسَاءَ خُلْفُنَّ مِنْ ضِلْعٍ لَا يَسْتَقِيمَنَّ عَلَى خَلِيقَةٍ إِنْ ثَقُمَهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَتْرُكَهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ

Ahmad 10436

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقِيمُ لَكَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا هِيَ كَالضِّلْعِ إِنْ ثَقُمَهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَتْرُكَهَا تَسْتَمْتِعُ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ

Al-Darimi 2125

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ إِنْ ثَقُمَهَا تَكْسِرُهَا وَإِنْ تَسْتَمْتِعُ
تَسْتَمْتِعُ وَفِيهَا عَوْجٌ

Hadist hadits tersebut menjadi dalil bagi para fuqaha dan yang lainnya, yang menyatakan bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Rasul menjelaskan bahwa hadis ini merupakan anjuran untuk berlaku lembut, sabar, baik terhadap karakter dan kecenderungan perempuan. Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian kiasan, dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para

lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Dari hadits tersebut, justru terdapat pengakuan tentang kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat sejak dilahirkan.

Dalam kajian dan telaah sosial dikenal dengan gender sebagai sebuah kesadaran penentu dalam produksi, sirkulasi, dan konsumsi wacana kesusasteraan. Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa teori gender berkembang sejak awal 80-an dalam pemikiran feminis baik dalam bidang sejarah, antropologi, filsafat, psikologi dan ilmu alam dengan membuat peralihan (perubahan) dari investigasi yang berfokus pada perempuan pada tahun 70-an, seperti investigasi tentang sejarah perempuan, *gynocriticism*⁵² dan psikologi perempuan. Perubahan paradigma itu membawa pengaruh yang sangat radikal yang tertransformasi pada beberapa disiplin kajian tentang perempuan⁵³. Dari

⁵²Gynocriticism adalah teori yang dikenalkan oleh Elaine Showalter. Menurutnya kebanyakan teori feminist seringkali hanya terfokus pada bagaimana pencitraan negatif perempuan atau marginalisasi peranan perempuan dalam karya-karya yang ditulis oleh penulis laki-laki. Jarang sekali teori feminist yang sengaja mengangkat bagaimana perempuan sebagai penulis mengekspresikan nilai-nilai feministnya dalam karya sastra. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori Showalter, maka didapatkan dua hasil penelitian: pertama, sebagai penulis perempuan, Charlotte Bronte telah menuangkan pengalaman pribadinya ke dalam karya yang ditulisnya. Yang kedua, melalui karakter Jane Eyre yang cerdas dan pemberani, Charlotte Bronte menyelipkan ide-ide feminisme, yaitu sebuah gerakan pembebasan dari kekangan budaya patriarki, mengkritisi agama Kristiani yang dianggap tidak humanis dan mendeskripsikan perempuan ideal di era Victoria. lihat Edy Santoso, *Feminisme Dalam Novel Jane Eyre*, diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>

⁵³Kajian gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-

sini dapat dilihat bahwa “jender” termasuk hal yang masih baru. Berbicara tentang jender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Pengertian tentang jender itu sendiri masih belum mencapai kesepakatan resmi. Sementara kata “gender” berasal dari bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”.

Dalam berbagai kajian gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Sehingga gender bukan melihat dan menilai perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Kajian terletak pada perbedaan yang bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan oleh kaum laki-laki dan perempuan, melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Jender mengacu ke peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial. Peran tersebut berubah dari waktu ke waktu dan beragam menurut budaya dan antarbudaya.

Dalam kajian Islam pemahaman tentang kesamaan antara laki-laki dan perempuan (Q.S Ali ‘Imron:195) maknanya bahwa sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya

laki dan perempuan. Biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan. Gender juga masalah budaya, merujuk kepada klasifikasi sosial dari laki-laki dan perempuan menjadi maskulin dan feminin, berbeda karena waktu dan tempat. Sifat tetap dari jenis kelamin harus diakui, demikian juga sifat tidak tetap dari gender. Lebih luas Faisar Ananda Ara, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010; Hmala Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan-Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia dan Yayasan Kalyanamitra, 2006, D.W.Rossides, *The History and Nature of Sociological Theory*, Boston: Houghton Mifflin, 1978, h. 130. Dzuhayatin, Siti Ruhaini, “Problema Peningkatan Sumber Daya Perempuan”, dalam E.D. Binar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesian dan Kemodernan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998; Gherardi, *Gender, Symbolism, and Organizational Cultures*, London: Sage, 1995, lihat juga Nasaruddin Umar, “Teologi Reproduksi”, dalam Sri Suhandjati (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Jogjakarta: Gama Media.

sama-sama manusia, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. Melalui ayat tersebut di atas, Al-Quran telah mengikis pandangan masyarakat yang membedakan antara lelaki dan perempuan, terutama dalam bidang kemanusiaan.

Terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran yang juga menerangkan bahwa baik lelaki maupun perempuan dapat tergoda oleh bujuk rayu Iblis seperti yang telah tersebut pada kisah kebersamaan antara Adam dan Hawa. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama mendapat kesempatan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Laki-laki bertindak sebagai pemimpin ada pada hubungannya pada isterinya, yang berarti ia bertanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi pasangannya dan menghormati apa yang menjadi fitrahnya. Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya dan meluruskan pandangan yang salah terkait dengan posisi ataupun asal kejadiannya.

3. Pemilu

Secara umum Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan sebagai manifestasi perwujudan negara yang demokrasi. Sebagai bagian dari partisipasi masyarakat Herbert Mc Closky menegaskan *The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*⁵⁴. Samuel P. Huntington (2006, 201-203) menjelaskan pengertian politik sebagai bagian dari

⁵⁴ Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum, lihat Muhammad, "Akuntabilitas Pengawasan Pemilu Yang Berkualitas Dan Beradab", dalam *ADIL, Jurnal Hukum*. Volume. 3 Nomor..1. h. 125

partisipasi politik dengan memberi tafsiran yang lebih luas dimana kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Ia kemudian menambahkan bahwa Di negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari pemahaman bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan⁵⁵.

Dalam Undang Undang dijelaskan bahwa Pemilu, adalah “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵⁶. Sehingga pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan. pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

⁵⁵ Samuel Huntington, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth*, 2006, h. 201-203

⁵⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Rizkiyansyah menegaskan bahwa pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Penjelasan menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang- Undang Dasar 1945⁵⁷

Berdasarkan data didapatkan juga bahwa pemilihan umum merupakan salah satu ciri utama sistem politik yang demokratis. Melalui pemilihan umum sirkulasi elit berlangsung secara periodik. Jangka waktu setiap periodik berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lain. Perancis menetapkan pemilihan Presiden setiap 7 tahun, Unite State of America (USA) 4 tahun dan Indonesia 5 tahun. Proses pemilu memberikan peluang untuk terjadinya sirkulasi kepemimpinan atau wakil rakyat berlangsung secara periodik dan demokratis. Saking urgennya pemilu berbagai kajian menarik terjadi dalam sejarah ke-pemiluan.

Seperti Di Texas negara bagian Amerika memberlakukan kebolehan Memilih dari Luar Angkasa. Hal tersebut terjadi dimulai pada tahun 1997, Undang-Undang Texas memungkinkan para astronot Amerika yang tengah untuk tetap memberikan suara. Mereka berpartisipasi secara elektronik dari orbit. Surat suara dikirim melalui email yang aman ke Johnson Spaceflight Center dan kemudian diteruskan ke negara asal para astronot di Texas. Kejadian binatang

⁵⁷ Rizkiyansyah, F. K. *Mengenal Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: IDEA. Publishing, 2007, h. 3.

badak yang menjadi salah satu kandidat dalam pemilu memenangkan suara warga Brasil. Pemilu di Korea Utara dimana setiap distrik hanya memiliki satu kandidat, yang secara pribadi dipilih oleh Kim Jong Un. Perselisihan pendapat pun sangat tidak mungkin terjadi. Komisi Pemilihan Selandia Baru memiliki aturan ketat bahwa tidak ada outlet yang dapat menyiarkan "kata atau gambar apa pun yang mungkin mempengaruhi pemilih" sebelum pemilu.

Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme pemberian suara oleh rakyat sebagai pemilik mandat atas kedaulatan negara kepada orang atau partai politik yang akan memerintah. Dengan demikian pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih para pemimpinnya yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pemerintahan guna mencapai tujuan negara. Di Indonesia, berdasarkan aturan konstitusi, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih para pemimpin pada tiap level pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai sebuah proses yang sangat penting serta menentukan nasib bangsa ini kedepan, maka penyelenggaraan pemilu di Indonesia menganut azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil .hal ini terutama untuk menjamin bahwa hasil pemilu merupakan pilihan terbaik dari rakyat dan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 18 Ayat 3 dimana pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 19 Ayat 1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 22 C Ayat 1 menyatakan bahwa anggota

Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Selain memilih anggota legislative pada setiap level pemerintahan, pemilu juga menjadi sarana untuk memilih kepala eksekutif pemerintahan pada setiap level. Dengan demikian seluruh proses dalam pemilu di Indonesia harus berjalan dengan baik karena terkait dengan hal-hal utama dalam struktur pemerintahan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh karena itu asas-asas dalam pemilu harus dapat ditegakkan dengan baik. Guna menjamin hal tersebut maka dibutuhkan penyelenggara dan pengawasan pemilu yang independen dan mampu melaksanakan amanat konstitusi tersebut dengan baik.

Menurut Miriam Budiardjo akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu.⁴ Dengan demikian akuntabilitas sebenarnya memiliki makna adanya pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan. Hal tersebut penting untuk mengurangi penumpukkan kekuasaan pada suatu lembaga tertentu sekaligus untuk menciptakan situasi saling mengawasi (*check and balances*). Kondisi tersebut akan memberikan peluang sangat besar bagi penyelenggaraan pemilu yang ideal untuk memastikan hal tersebut maka pelaksanaan pemilu seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas⁵⁸.

Prinsip tersebut menuntut dua hal yakni kemampuan menjawab (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*). Bagian pertama berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat pelaksana untuk memberikan jawaban secara periodik atas berbagai pertanyaan yang

⁵⁸ Budiardjo Miriam, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, 2000, h. 33

terkait dengan penggunaan wewenang mereka dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana mereka menggunakan wewenang tersebut dikaitkan dengan penggunaan sumber daya serta hasil yang dicapainya. Dengan demikian seluruh penyelenggara pemilu harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenangnya⁵⁹.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terkait dengan kewajiban dari institusi serta para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas publik menuntut adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien karena terkait dengan wewenang dan penggunaan anggaran. Hal penting yang terkait dalam akuntabilitas adalah aspek transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu institusi negara atau institusi formal lainnya. Informasi yang ada terkait dengan kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian aspek transparansi dalam prinsip akuntabilitas akan sangat terkait dengan adanya pengawasan atas seluruh proses yang terjadi. Dengan kata lain transparansi akan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Melalui keterbukaan informasi diharapkan akan membuka ruang dinamika politik yang lebih sehat, toleran serta kebijakan didasarkan pada preferensi publik. Prinsip transparansi terkait dengan 2 aspek yakni adanya komunikasi publik dari institusi penyelenggara serta terjaminnya

⁵⁹ Peters, B.Guy, *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge, 2002, h. 65

hak masyarakat terhadap akses informasi. Kedua hal tersebut membutuhkan kesungguhan dari institusi penyelenggara untuk dapat melaksanakan kerjanya dengan baik.

4. Peta Arus Tim Sayap

Pemahaman istilah “peta arus tim sayap. Secara etimologi peta berasal dari bahasa Yunani *mappa* yang berarti taplak atau kain penutup meja diartikan dengan gambaran, gambar atau lukisan pada kertas; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi⁶⁰. Dengan demikian peta dipahami dengan gambaran. Ketika ditambah dengan arus maka dapat dijelaskan dengan gambaran suatu muatan suatu aktifitas

Tim sayap dipahami dengan kelompok bagian dari satu aktifitas yang menjadi salah satu motor penggerak dalam aktifitas politik. Dari berbagai pemahaman tersebut maka peta arus tim sayap dapat dipahami dengan gambaran aktifitas yang mengalir sebagai salah satu motor penggerak calon pemimpin. Tim sayap menjadi bagian uaya untuk meyakinkan calon pemilih terhadap Permasalahan mendasar yang terdapat pada dunia perpolitikan saat ini ada pada politisi, pemegang kebijakan, ataupun pemimpin yang telah diberikan kekuasaan. Pasalnya, pihak-pihak tersebut adalah perwakilan dari masyarakat. Namun kenyataan yang seringkali terjadi para oknum politisi yang menjadi

⁶⁰Lebih luas lihat I Ophelia dan Evi Nmanai Khartawangsa, *Sukses Finansial Lewat Astrologi Dan Peta Kehidupan*, Jakarta : Buku Kompas, 2010, h. 1-4;

harapan justru khianat dengan jabatannya. Banyak tindak kejahatan yang dilakukan, seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), kekerasan, narkoba, pencemaran nama baik, fitnah, penistaan agama, dan berbagai bentuk kegagalan modernitas⁶¹.

Dalam perkembangannya tim sayap pada awalnya merupakan bagian dari tim suksesi dapat menjadi bagian penyeimbangan kekuasaan manakala tim yang diusungnya keluar dari visi, misi dan tujuan awal sebuah perjuangan. Berbagai kasus ditemukan gerakan tim sayap akhirnya menjadi oposisi⁶² pemerintahan yang pernah diusungnya.

⁶¹ Lihat Farhah, "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam, *Jurnal Dauliyah*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2019, h. 22. Gerakan tim sayap sejalan dengan hubungan manusia dengan etikanya menjadi poin perhatian utama dalam kehidupan keseharian. Pada dasarnya semua manusia adalah beragama atau berkeyakinan, sebab etika manusia dalam kehidupan sudah diatur dan dikonsepsi dalam agama masing-masing. Gerakan tim sayap yaitu politik sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu, baik maupun buruk, tanpa mengindahkan kesusilaan dan norma yang berlaku. Maka ketika ada oknum politisi yang menyalahgunakan kekuasaannya, itu berarti ia tidak menggunakan etika politiknya dengan benar. Ketika etika tersebut tidak digunakan, berarti pula ia tidak memahami serta menerapkan apa yang menjadi aturan atau konsep di dalam agama Islam.

⁶² Secara etimologis oposisi bermakna "*to oppose*" yang berarti menentang, mencegah. Kata padanan dalam bahasa Arab untuk pengertian oposisi adalah *mu'aradha* 'Ala yang berarti berhadapan, berbeda, menjauhi, membatalkan dengan perkataan dan persaingan. David Robertson memberikan pengertian oposisi sebagai suatu kelompok politik, berupa partai, jamaah, atau gerakan yang kalah dan menghendaki perubahan, pergantian pemerintah dan kebijakannya. Sedangkan Vernon Bogdaner mengartikan oposisi sebagai suatu proses politik yang mengacu pada kritik minoritas atas mayoritas, bertujuan untuk melakukan kontrol sekaligus mencari dukungan untuk mendapatkan posisi alternatif dalam pemerintahan. Nurcholish Madjid memberikan pengertian oposisi sebagai suatu kekuatan penyeimbang atau pengimbang antara unsur mendukung (*to support*) dan unsur memecahkan masalah (*to solve*). Menurutnya, pendalaman oposisi dalam dua termin ini, bisa dimulai dengan suatu postulat yang sangat sederhana "masalah politik dan sosial tidak dapat diberikan hanya pada- *niat baik seseorang*-sebagai individu. Karena bagaimanapun masalah politik dan sosial mempunyai banyak dimensi horizontal untuk kepentingan orang banyak yang harus dipersepsikan sebagai persoalan terbuka, sehingga partisipasi politik merupakan sebuah keharusan. Dengan mengambil gerakan oposisi berarti adanya sebuah kegiatan sosial politik yang mengingatkan, agar tidak menjadi korban yang fatal untuk suatu kenyataan sederhana bahwa manusia itu selalu bisa salah. Dengan demikian, oposisi merupakan ucapan atau perbuatan yang meluruskan kekeliruan tetapi sambil menggarisbawahi segala sesuatu yang sudah ada di jalan yang benar dengan segenap dorongan dan sokongan. Artinya, ketika kekuasaan politik menjalani kekeliruan, maka

5. *Emak emak dan Srikandi*

Etimologi emak emak adalah orang tua perempuan, atau ibu seperti kata '*sambil menangis anak kecil itu memanggil-manggil maknya*'.⁶³ . diartikan juga dengan penyematan kepada orang perempuan yang patut disebut ibu atau dianggap sepadan dengan ibu. **Srikandi** memiliki 4 arti. Srikandi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari srikandi dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan srikandi dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Srikandi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga srikandi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan⁶³.

Pemaknaan emak emak mengalami berbagai kontraproduktif makna terutama ketika berkembang istilah *the power of emak emak*. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) misalnya mengkritik istilah tersebut. Mereka menilai istilah emak-emak bermakna peyoratif alias perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak. Peyoratif karena perempuan dianggap tidak bisa apa-apa kecuali jadi emak. istilah 'the

oposisi berfungsi mengabarkan kepada masyarakat kekeliruan itu sambil membangun penentangan dan perlawanan atasnya. Sebaliknya, ketika kekuasaan menjalankan fungsinya secara benar maka oposisi menggarisbawahinya sambil membangun kesadaran dan aksi publik untuk meminta kelanjutan dan konsistensi dari praktek kebenaran itu untuk etimologi, lihat A S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1987, h. 590; Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *an English – Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1993, h. 406; Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir*, Jogjakarta: Unit Pengadaan buku Ilmiah al-Munawwir, 1984, h. 984; M.Muhyiddin dan Abdul Latif Subki, *al-Muhtâr Min Sihhatu al-Lughah*, Beirut: Dar al-Suur, 1934, h. 235. Ibnu Manzûr, *Lisân al-Arab*, juz 9, Beirut: Dâr al-Fikr, tt, h. 45. Terminologi lihat David Robertson, *Dictionary of Politics*, England: Penguin Book, 1993, Second edition, h. 357; Vernon Bogdaner (ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Political Science*, Oxford, Blackwell, 1993, h. 100,⁶²Nurcholish Madjid, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi*, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2000, h. 33.

⁶³ Lihat www.kamusbesar.com, diakses 29 Juni 2020

power of emak-emak' digunakan untuk menunjukkan makhluk yang dianggap tidak bisa apa-apa ternyata berdaya, atau semacam '*people power*'. Hal ini menurutnya sempat terjadi di Filipina ketika mendukung Cory Aquino (mantan presiden Filipina). "Di Filipina pernah digunakan *people power* yang mendukung Cory Aquino. Maka, the power of emak-emak digunakan sekarang untuk menunjukkan makhluk yang dianggap tak bisa apa-apa ternyata berdaya. Sama dengan rakyat yang selalu diabaikan kekuatannya⁶⁴. Sisi yang berseberang menilai positif makna emak emak emak maupun the power of emak emak. Dalam persepektif mereka disebutkan istilah emak-emak tak perlu dipandang secara negatif sebab kata tersebut juga bisa mengingatkan akan sosok perempuan pemberani yang hangat dan berhati baik. Penggunaan istilah "power of emak-emak" digunakan untuk memberdayakan kaum perempuan seperti contoh gerakan trans-nasional SlutWalks yang menolak persepsi bahwa pelecehan dan kekerasan seksual terjadi karena cara perempuan berpakaian. Dari etimologi dan terminologi srikandi memperlihatkan putri kedua Prabu Drupadayang menyukai olah kanuragan dan dikenal memiliki keahlian dalam memanah. Visualisasi Srikandi seringkali digambarkan lengkap dengan panahnya, selalu menjadi sebutan bagi siapapun perempuan yang tampak kuat dan mandiri. Pemaknaan perempuan dengan srikandi menunjukkan pada 5 konstruksi besar yaitu, 1) simbol ketrampilan perempuan yang mampu tampil dibidang penguasaan laki laki; 2) simbol ketegasan dan keberanian dalam segala lini; 3) keberanian untuk belajar; 4) perilaku

⁶⁴ Haris Fadhil, "Tentang Istilah Emak-emak yang Dikritik Kowani, dalam *news.detik.com*, diakses 20 Juni 2020

cantik tetap hadir dari sisi keberanian dan ketegasan seorang perempuan; 5) simbol ketauladanan⁶⁵.

Hasil penelitian Hery Setyowati menjelaskan eksistensi Srikandi dalam petunjukan wayang orang lakon Bisma Gugur merupakan representasi dari emansipasi perempuan berbasis kultural Jawa. Fenomena di masyarakat sering muncul persepsi negatif bahwa dalam budaya Jawa dan juga Indonesia cenderung memosisikan perempuan menjadi subordinat laki-laki⁶⁶

B. Instrumen Teoritis

Dalam studi ini menggunakan teori wacana Michel Foucault, Teori pergerakan Perempuan. Teori wacana Michel Foucault tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dan berkembang dalam konteks relasi-relasi kuasa. Sebuah wacana bisa lenyap dan kemudian timbul lagi, atau tertekan dan tertindas pada satu masa dan bangkit lagi di masa berikutnya. Suatu wacana juga dapat diubah dan disesuaikan karena tuntutan relasi kuasa pada saat wacana itu dimunculkan⁶⁷. pentingnya peranan subyek, yakni masalah siapa yang membuat wacana adalah penting. Wacana yang dibuat oleh seseorang, yang kebetulan tokoh publik tentu berbeda dengan wacana yang dibuat oleh orang biasa.

Gerakan perempuan yang menjadi subjek dan objek studi ini dilihat dalam wacana yang dibangun masing masing. Kekuatan teori tersebut dinilai dari juga dari teori Talcott Parsons yang juga dikenal sebagai

⁶⁵Diakses dari berbagai telaah seperti *thejakartapost.com*, *dailywomen.co.id*, *jogjatoday.com*, *hijabiworld.com*, *youtube.com*.

⁶⁶ Lebih luas lihat Hery Setyowati, "Representasi Feminisme Srikandi Dalam Pertunjukan Wayang Orang Lakon Bisma Gugur", <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php>

⁶⁷ Lebih luas teori wacana foucault dikutip dari Mujiburrahman, *Mengislamkan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, h. 29

penyalur ide Weber yang berpandangan bahwa suatu “sistem budaya “adalah sesuatu yang obyektif, suatu koleksi simbol obyek, tanda, isyarat, kata-kata, peristiwa, semua dengan arti yang terkait dengan simbol yang berada di luar pikiran orang-orang, per individu namun bekerja dari dalam untuk membentuk sikap dan membimbing tindakan. Cara pandang konstruktivisme telah ikut menyumbang ke arah interpretivisme sebagai paradigma yang lebih mendekatkan etnografer kepada subyek⁶⁸. Karena manusia sebagai pembangun kebudayaan, memiliki unsur subyektivitas sangat tinggi, di samping unsur obyektif. Maka ketika suatu kebudayaan dilihat dengan hanya memakai kacamata obyektif, akan mengalami kegagalan untuk bisa memahami secara utuh. Kebudayaan (*culture*) adalah suatu wadah di mana alam pikiran manusia, pola tindakan, nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan kreativitas, semua menyatu dalam satu ruang dan waktu.

Proses dialektis dalam kultur terjadi sebelum suatu nilai diterima oleh komunitas, menuju perubahan budaya. Ketika kesepakatan-kesepakatan telah dianggap mapan atau menjadi milik bersama, kultur terdefinisi sedemikian rupa, yang kemudian dibalut oleh simbol dan tanda-tanda. Perubahan berjalan setahap demi setahap dalam jangka waktu yang lama, yang dimulai dari perubahan-perubahan di dalam nilai-nilai kehidupan dan karakteristik fungsi lembaga-lembaga masyarakat, yang kemudian merembes melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, organisasi-organisasi ekonomi dan politik, untuk pada akhirnya muncul sebagai perubahan-perubahan sosial budaya yang besar di masyarakat. Pada suatu waktu seseorang bisa saja melakukan tindakan tertentu hanya menuruti

⁶⁸ Pals, D. L. *Seven Theories of Religion* (Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Qalam. 2001

maunya sendiri, Namun yang dilihat adalah gejala yang umum (*common behavior*), dan itulah perilaku budaya.

Aktivitas yang bersifat umum bergantung pada artefak yang terkuat, di mana pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat kemudian menciptakan sesuatu berasal dari sumberdaya alamnya. Artefak kultural yang bisa dilihat adalah seperti buku-buku, koran, reklame, dan semua tanda-tanda yang amat kecil sekalipun di tempat gelap, semua ada aturan dan unik. Dari sesuatu yang kecil tadi bisa diuraikan menjadi ungkapan-ungkapan panjang, yang seakan seperti terbentuk sebuah kalimat dan berkembang dari paragraf ke paragraf. Bentuk-bentuk perilaku yang terlihat sepiantas pada artefak, merepresentasi sesuatu yang dangkal dan bersifat permukaan dari suatu yang sebenarnya memiliki makna yang dalam⁶⁹.

Dalam teori pergerakan perempuan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konsep gerakan sosial itu sendiri dan wacana. Porta dan Dianimendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah proses sosial yang (1) melibatkan relasi konfliktual dengan oposisi yang jelas, (2) menghubungkan orang dalam sebuah jaringan informal, dan (3) mengorganisasi massa dengan identitas kolektif tertentu⁷⁰. Dalam konstruksi penelitian ini dilihat dalam tiga variabel penting yakni relasi konfliktual, jaringan informal, dan identitas kolektif. Pemahaman terhadap gerakan politik perempuan sebagai gerakan sosial yang bertujuan menegajawantahkan kepentingan perempuan dan mendorong transformasi sosial ke arah tatanan sosial berperspektif gender (*engendering society*). Gerakan perempuan dimotori oleh

⁶⁹ Clifford Geertz,, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981

⁷⁰ Lebih luas lihat Donatella della Porta, Mario Diani, *Social Movements: An Introduction*, 2nd Edition, England: Wiley-Blackwell, 2008.

perkembangan gagasan feminisme yang membawa wacana kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Karl Marx mendefinisikan teori kritis sebagai “*a self-clarification of the struggles of the age*” (“sebuah klarifikasi-diri atas perjuangan peradaban”)⁷¹.

Pendekatan kedua teori tersebut di kaji juga dari teori gerakan sosial yang dirintis oleh pemikiran Charles Tilly dan murid-muridnya. Bagi mereka, gerakan sosial terjadi jika memenuhi beberapa unsur utama, yakni keberadaan wirausahawan politik (*political entrepreneur*) perempuan atau mereka yang punya wibawa kuat menawarkan gagasan dan memikat masyarakat; mobilisasi sumber daya yang dapat menggerakkan masyarakat dari berbagai sumber (daerah, ormas, dan ikatan primordial); bingkai (*frame*) yang membuat perhatian terfokus pada satu sasaran saja; dan posisi politis di mana gerakan sosial menempati irisan tipis antara negara dan masyarakat.

Gerakan sosial perempuan merupakan gerakan sosial tidak terlibat dalam politik resmi (walau memang melibatkan aktor-aktor politik) namun hanya ingin mempengaruhi kekuasaan. Dengan kewibawaan, jaringan dan kharismatik tokoh perempuan dalam aksi melakukan mobilisasi sumber daya berupa pengerahan massa aksi dari berbagai penjuru Indonesia, dengan bingkai yang mengarahkan sorotan tertuju pada program calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung. Penganut paradigma ini akan

⁷¹ Nancy Fraser, *Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*, USA: University of Minnesota Press, 2005. paradigma posmarxis seperti terlihat dalam buku Vedi R. Hadiz (2016) yang berjudul *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Paradigma ini berangkat dari pandangan ilmu sosial posmodern yang memandang masyarakat sebagai kumpulan individu kontingen (bisa ada, bisa tiada) sehingga tidak memiliki esensi yang continue (terus-menerus). Peristiwa kemasyarakatan, dalam paradigma ini, adalah sebuah tindakan yang tidak bermakna tunggal (esensialis), bahkan sebenarnya tidak bermakna sama sekali. Ia hanya dianggap bermakna karena ada daya tertentu yang mengitarinya dan berkepentingan untuk mengekalkannya menjadi sebuah “populisme”.

beranggapan bahwa hal tersebut adalah sesuatu kewajaran di negara berdemokrasi liberal, yang mengandaikan manusia (dan masyarakat) mempunyai rasionalitas yang sama ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan. Upaya menjawab persoalan itu secara rasional, dalam paradigma ini, akan mengantarkan masyarakat pada keadaan lebih maju dan modern. Terhadap Aksi mereka hanya menjelaskan program andalan calon yang diusung dan sesekali mengecam argumentasi-argumentasi yang dalam ukuran mereka jauh dari rasional.

Di tingkat global, terutama dalam konteks Timur Tengah menerapkan teori gerakan sosial di dunia Islam. Sebelumnya, teori tersebut lebih sering digunakan untuk mengkaji gerakan marxis dan anarkis di Amerika Utara dan Eropa. Para peneliti mengkaji gerakan-gerakan Islam negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, seperti Saudi Arabia, Iran, Mesir, dan Libya. Mereka menemukan pola-pola tertentu dalam gerakan-gerakan itu, seperti kemunculan tokoh kharismatik, mobilisasi massa *ba'da shalat Jum'at* (yang disebut "*Political Friday*"), isu-isu keberadaan konspirasi Yahudi-AS dalam kehidupan umat, kerusakan moral penguasa, isu gender. Pada akhirnya gerakan perempuan juga akan terjadinya transisi demokrasi yang emosional disebabkan ketimpangan jumlah antara kaum ideologis lama dan "kaum reformis" yang lebih muda dan liberal⁷².

Teori pergerakan perempuan tidak dapat lepas dari konsep gerakan sosial (*social movement*). Dalam berbagai pengertian gerakan sosial adalah suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi

⁷² Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, Quintan Wiktorowick, 2007, akses dari Ahmad Sholikhin, "Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III", Lamongan: FISIPOL Universitas Islam Darul Ulum

sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal⁷³. Dari aspek tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial merupakan sebuah tindakan kolektif demi mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kelompok. Mario Diani seperti dikutip dari Porta dan Diani menyebutkan mendefinisikan gerakan sosial sebagai sebuah proses sosial sebagai gerakan perempuan mengejawantahkan kepentingan perempuan dan mendorong transformasi sosial ke arah tatanan sosial berperspektif gender (*engendering society*)⁷⁴.

Feminisme sebagai bagian dari teori kritis mencoba mengklarifikasi sejarah peradaban yang didominasi laki-laki dan menentang subordinasi perempuan yang diwajarkan moral arus utama. Perempuan dianggap secara alamiah (kodrati) berada pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, menjadi hak milik laki-laki, entah itu ayahnya atau suaminya. Sehingga memperlihatkan bahwa paradigma feminisme merupakan gerakan dalam memperjuangkan keadilan gender, melawan subordinasi perempuan, dan mendorong pemberdayaan perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Ada isu utama yang menjadi fokus gerakan perempuan yaitu (1) Institusional, (2) Struktural, dan (3) Kultural. Gerakan perempuan yang lama masih fokus pada aspek institusional dan struktural saja, sementara aspek kultural belum dikaji disebabkan kristalisasi budaya di semua strata⁷⁵.

⁷³ Lihat, Wahyu, Kamus Sosiologi, Surabaya: Victory Inti Cpta, 2014, h. 76

⁷⁴ Donatella Della Porta dan Mario Diani, *Social Movements: An Introduction*, 2nd Edition, London: Wiley-Blackwell, 2005, h. 20

⁷⁵ Lihat Angger Wiji Rahayu, "Perempuan Dan Belenggu Peran Kultural", Jurnal Perempuan, edisi 29 Januari 2015; Ni Nyoman Rahmawati, "Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)" .Jurnal Studi Kultural Volume 1 No. 1 Januari 2016; Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia" Social Work Jurnal, VOLUME: 7. NO. 1, 2018

Teori “gerakan perempuan baru” muncul dengan isu paling strategis di tataran diskursif dengan pendekatan budaya. Ross dan Rothman melihat budaya sebagai sebuah sistem pemaknaan (*system of meaning*) yang membentuk kehidupan sehari-hari seseorang⁷⁶. Gerakan Perempuan Baru adalah istilah yang dipakai untuk merujuk pada gerakan perempuan di tataran wacana (*discursive level*) lewat pembentukan opini (*opinion making*) untuk mendorong terjadinya transformasi nilai. Gerakan perempuan di tataran wacana seperti ini dapat dipandang sebagai sebuah gerakan literasi gender dan gerakan edukasi. Dalam konteks Indonesia berbagai data menunjukkan bahwa kecenderungan gerakan perempuan selalu ada hubungannya dengan pembentukan negara Indonesia⁷⁷. Ruth India Rahayu seperti juga beberapa penulis lain menggali berbagai fenomena perempuan dan negara memetakan periodisasi perjuangan perempuan Indonesia. Dalam karyanya berjudul *Gerakan Perempuan di Indonesia: Pasang Surut Memperjuangkan Hak membagi* seperti dideskripsikan sebagai berikut:

1. Periode Melawan Adat

Gerakan perempuan tahun 1990-an sebagai bagian dari gerakan nasional di Indonesia ditandai dengan babak baru yang umum disebut kebijakan “etis” kolonial Belanda serta kehadiran gerakan nasionalis terorganisir yang tidak dapat dipisahkan dari gerakan perempuan di Asia. Untuk kasus Indonesia kebijakan “etis” Belanda dengan membuka sekolah modern bagi perempuan dari kalangan priyayi maupun pegawai

⁷⁶ Lebih luas lihat . Ross dan Rothman, *Theory And prachtime in Ethnic Conflict of Management*, USA: Academic Press, 2010, h

⁷⁷ Beberapa karya dari hasil pergulatan pemikiran penelitian tentang perempuan negara dapat dilihat seperti S. Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia*, London: Plagrave Micmilan and ISS, 2002; Reni Nuryanti, Bachtar Akob, *Perempuan Dalam Historiografi Indonesia (Eksistensi Dan Dominasi)*, Jogjakarta: deepublish, 2019; Thung Ju Lan, Musiana Adenan, Yasmin Sungkar, Eko Widodo, Yo Paramitha Abdurachman *Perempuan yang Mendahului Zaman: In Search of Living Tradition and Act*, Jakarta: Yayasan Obor, 2010.

birokrasi kolonial di kota yang merupakan pusat industrialisasi perkebunan kolonial. Contoh di dibangun organisir perempuan di kota Tomohon perkebunan cengkeh Minahasa. Perkebunan Bukittinggi, yang dikelilingi pula oleh perkebunan kolonial. Di Medan, sebuah gereja protestan juga diketahui membangun sekolah bagi perempuan. Di Jawa, sekolah perempuan di Bandung, Yogyakarta, Salatiga, Surabaya, Malang, adalah kota yang dijadikan pengepul hasil perkebunan kolonial.

Fase ini kaum perempuan melakukan berbagai aktifitas di luar adat dari aktifitas “manut dalam rumah” mulai belajar merajut, menyelenggarakan upacara makan, berdandan modern, bisa baca tulis dan sedikit bahasa Belanda untuk membangun keluarga “boemipoetra kolonial” (*holy family*). Tetapi, pada perkembangannya, setelah melek huruf dan bahasa, para perempuan ini jauh melebihi harapan pemerintah kolonial. Mereka menjadi kritis dan melakukan perlawanan pertama terhadap adat kawin-cerai yang merendahkan kedudukan perempuan dalam keluarga. Para perempuan ini pun mempunyai pergaulan yang melampaui rumah atau desanya, sehingga berkenalan dengan aktivis laki-laki yang terpelajar, yang juga sedang bergairah melawan penjajah. Diskusi yang mengarah pada kesadaran identitas sosial “perempuan” telah berkembang mencapai kesadaran untuk menjadi “perempuan” bangsa yang merdeka.

2. Periode Melek Nasionalisme

Soempah Pemoeda, 28 Oktober 1928 menjadi dasar menguatnya jiwa nasionalisme kaum perempuan. Dalam sejarahnya, adalah Siti Soendari, seorang wartawati yang sekaligus pendiri buletin perempuan *Swara Pacitan* mendapat kesempatan untuk berpidato di Kongres Soempah Pemoeda tersebut. Pidatonya tersebut menjadi salah satu

pemicu terciptanya Kongres Perempuan I, pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tema sentral pembahasan pada saat itu ialah mengonsolidasi perjuangan khusus perempuan pada perjuangan memerdekakan Indonesia. Diantara perjuangan mereka pada saat itu adalah memperjuangkan “hak perempuan” dalam perkawinan seperti (melawan perkawinan dini, hak bercerai dan poligami dan menjadi kebijakan pemerintah kolonial.

Isu tentang Hak Dipilih (*women's suffrage*) perempuan pribumi sebagai anggota Dewan Kota, menjadi agenda pembahasan dalam Kongres Perempuan ketiga di Bandung pada Juli 1938. Keputusan Kongres menghasilkan amanat untuk memperjuangkan Hak Dipilih bagi perempuan pribumi sebagai langkah perjuangan pergerakan perempuan pada masa itu. Dari beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan perjuangan pada periodisasi ini ialah gerakan perempuan memasukkan agenda “hak perempuan” untuk menjadi kebijakan negara kolonial. Urusan perempuan yang dipandang domestik (contoh perkawinan dan perceraian) ditransformasikan oleh gerakan perempuan menjadi agenda negara hingga masa kemerdekaan.

Perjuangan hak perempuan pasca kemerdekaan masuk ke ranah negara dalam upaya untuk meneguhkan identitas kewarganegaraannya secara otonom. Meski, serta merta perempuan adalah warganegara Indonesia, namun demikian masih harus berjuang keras untuk memperjuangkan hak perempuannya sebagai warganegara yang sejajar dengan warganegara yang laki-laki. Dukungan partai politik turut serta mendekatkan isu perempuan ini dengan kebijakan negara, meski tetap ada soal perempuan yang secara umum tidak pernah didukung oleh partai politik beraliran Islam, yakni tentang poligami.

3. Periode *Koncowingking*⁷⁸

Penghancuran gerakan perempuan Indonesia (gerwani) melalui propaganda media massa antara 10 Oktober 1965 – 12 Oktober 1965 yang memberikan tuduhan bahwa organisasi atifitas gerwani tersebut membunuh 7 jenderal itu secara keji di lobang buaya dengan cara mencungkil mata dan menyilet-nyilet alat kelaminnya⁷⁹. Organisasi massa perempuan akhirnya diberangus oleh rezim Orde Baru dan aktivisnya kemudian ditangkap, dibuang ataupun dibunuh sejak itu hingga 1968. Ketika kita mengingat pembantaian massal 1965 politik Orde Baru memainkan kekuasaannya dengan memanipulasi sejarah, doktrinasi bahwa semua yang berbau komunis adalah jahat. Rezim orde baru melakukan teror sebagai upaya “penundukan” agar kekuasaannya dapat dilanggengkan, dengan menyatakan adanya “musuh negara” yakni penganut ideologi komunisme. Dalam upaya untuk mewujudkan negara yang bebas dari ancaman ideologi kiri maka muncul kebijakan tumpas kelor⁸⁰. Semua organisasi “keluarga komunis”⁸¹, seperti misalnya organisasi perempuan Gerwani telah disiksa dan dikalahkan. Presiden Soeharto tampil ke atas singgasana kekuasaannya dengan menciptakan

⁷⁸ Koncowingking= mengikuti suami

⁷⁹ Walaupun kemudian tuduhan tersebut di dibongkar oleh seorang peneliti Belanda, Saskia Wieringa (1995) sebagai kebohongan belaka. Ia menemukan visum et repertum kondisi tujuh jenderal tersebut mati dalam keadaan ditembak tanpa luka siletan ataupun pencungkilan mata.

⁸⁰ Istilah “tumpas kelor” diambil dari bahasa Jawa. Negara menganggap seluruh keluarga komunis harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, mulai dari keluarga yang dipersangkakan hingga generasi anak, cucu, dst. Lihat Hersri Setiawan, Kamus Gestok, Jogjakarta: Galang Press, 2003, hal. 296.

⁸¹ Istilah “Keluarga komunis”, meliputi PKI dan ormas-ormas kaitannya, yaitu Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Pemuda Rakyat, SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), dan HSI (Himpunan Sarjana Indonesia). lebih luas lihat, Saskia Eleonora Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Garba Budaya dan Kalyanamitra, Jakarta, 1999. Hal xxxix

kampanye kekerasan yang tak ada tolok bandingannya di masa lalu, dan dikuatkannya pula dengan tuduhan pesta seksual yang dilakukan para anggota Gerwani⁸².

Sejak itu atifitis perempuan dilarang kecuali untuk kegiatan sosial.menjalankan program nasional, yakni Keluarga Berencana dan menjadi anggota organisasi isteri yang disebut Dharma Wanita (untuk isteri PNS) dan Dharma Pertiwi untuk isteri ABRI). Sedangkan untuk perempuan kampung yang bukan isteri PNS maupun ABRI diarahkan untuk aktif di PKK, Posyandu atau pun menjadi penyuluh KB. Agar kaum perempuan tidak melanggar aturan ini, maka dikemaslah sebuah ideologi peran yang disebut *Panca Dharma Wanita*, dan kaum perempuan dikontrol oleh suami atau pejabat negara dari lokal hingga pusat.

Periode ini membuat gerakan perempuan Indonesia hanya menjadi alat mobilisasi politik rezim militer yang pro-kapitalisme. Adat dan paham tua dikembangkan kembali untuk proses penundukan daya kritis organisasi perempuan. Sejalan dengan itu, industri majalah perempuan bertumbuhan dan mengusung “citra perempuan ideal modern” yang menerima beban ganda dengan tetap *fashionable*. Perempuan yang ideal ialah yang berkarier tetapi tidak melupakan peran domestiknya.

Dalam periode ini tubuh perempuan telah dijadikan pasar bagi industri kosmetik dan busana; dan juga seksualitas perempuan dijadikan pasar bagi industri alat kontrasepsi. Di antara tubuh dan seksualitasnya, tenaga kerja perempuan dieksploitasi sebagai buruh di industri

⁸² Anna Mariana, Perbudakan Seksual “Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru”, Jogjakarta: Marjin Kiri, 2015. Hal 119

manufaktur, garmen, dan sebagainya. Di sini “negara” hilang sebagai arena pertarungan merebut “hak perempuan”, tetapi sebaliknya “negara” berhasil memanipulasi “hak perempuan” seakan-akan telah meretas batas domestik-publik, namun realitasnya tetaplah *koncowingingking*.

4. Periode Melek Demokrasi Melawan Otoritarianisme Militer

Periodisasi yang dipengaruhi oleh Dekade Perempuan Internasional 1975-1985 dan situasi nasional yang represif, tumbuhlah organisasi perempuan dan organisasi pro perempuan yang berjuang untuk merebut kembali hak perempuannya yang dihancurkan. Organisasi perempuan ini populer disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan yang beragam kegiatannya, mulai dari pengembangan ekonomi, advokasi kekerasan terhadap perempuan, hingga mengangkat kembali hak dipilih bagi perempuan untuk keterwakilan di parlemen. Di kalangan kelompok-kelompok studi mahasiswa, juga bertumbuhan gairah untuk mengkaji realitas persoalan perempuan, namun masih gagap di dalam praktik perjuangannya.

LSM Perempuan yang tumbuh sekitar dekade 1980-an seperti Yayasan Annisa Swasti di Yogya⁸³ dan Kalyanamitra di Jakarta⁸⁴ yang

⁸³ Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) didirikan pada tanggal 28 September 1982 oleh delapan orang perempuan aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Terdorong oleh keprihatinan atas kondisi perempuan saat itu yang sangat terpinggirkan dalam proses pembangunan maka mereka tergerak untuk melakukan sesuatu untuk menguatkan perempuan dengan tujuan dapat melakukan penguatan menuju kemandirian yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan secara ekonomi, sosial dan politik. Misi dari Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) adalah : 1) Mendorong usaha-usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi buruh yang independen dan demokratis; 2) Menumbuhkan kesadaran kritis komunitas buruh khususnya buruh perempuan melalui pengorganisasian, pendidikan dan advokasi.

⁸⁴ Kalyanamitra merupakan organisasi perempuan nonpemerintah yang independen yang didirikan pada 28 Maret 1985 di Jakarta. Saat ini program kerja Kalyanamitra berfokus pada pendampingan komunitas dan formasi kepemimpinan perempuan, advokasi, informasi dan dokumentasi, dan pengembangan keorganisasian. Dalam lingkup kerjanya, Kalyanamitra melakukan pengolahan dan analisis data-data yang

memperjuangkan solusi atas masalah eksploitasi tenaga kerja perempuan. Buruh perempuan adalah realitas kelas tertindas yang digempur oleh patriarki di dalam rumah tangga, militerisme dan kapitalisme. Setelah dekade 1990-an, perjuangan merebut hak perempuan bergerak ke isu kekerasan terhadap perempuan yang memusatkan aspek seksualitas dan gender sebagai basis penindasan militerisme negara.

Feminisme dan hak asasi manusia komplementer membangun gerakan yang membongkar kekerasan negara terhadap perempuan, yang contohnya terjadi sejak Tragedi 1965 di seluruh Indonesia, DOM di Aceh, Kerusuhan 13-14 Mei di Jakarta, DOM di Papua, invansi militer di Timor Leste,. Sisi lain LSM Perempuan yang memusatkan perhatian pada masalah kemiskinan dengan kegiatan peningkatan ekonomi sebagai ibu rumah tangga juga cukup berkembang –terutama di pedesaan. Selama periodisasi ini, perjuangan untuk merebut hak perempuan termanifestasi ke dalam isu-isu perempuan guna memobilisasi perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru.

Negara pada era tersebut menjadi arena pertarungan antara perempuan dan penguasa militer Orde Baru. Beberapa contoh LSM

terkait dengan isu-isu perempuan yang digali dari lapangan dan situasi/kondisi terkini dalam berbagai aspek serta kajian-kajian yang relevan. Kemudian membahasnya melalui forum diskusi, seminar, pendidikan kritis, dialog publik, kampanye, publikasi, dan jaringan kerja. Visi: 1) Terwujudnya komunitas yang memiliki kesadaran kritis untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang sensitif gender; 2) Dalam tiga tahun ke depan Kalyanamitra mampu merefleksikan dan mendokumentasikan pengalaman bekerja bersama dan untuk perempuan. Misi Organisasi: 1) Memperkuat komunitas dampingan untuk menjadi aktor-aktor sosial di wilayahnya melalui penyediaan dan penyebaran informasi serta pengetahuan dan pendidikan kritis; 2) Melakukan kajian-kajian berdasarkan pendampingan komunitas untuk menjadi rekomendasi perubahan kebijakan publik; 3) Meningkatkan kesadaran publik mengenai persoalan ketidakadilan gender; 4) Membangun jaringan kerja dengan aktor-aktor sosial di berbagai level dalam rangka mendukung kerja-kerja Kalyanamitra; 5) melakukan advokasi kebijakan publik yang berperspektif gender; 6) Meningkatkan kompetensi sumber daya Kalyanamitra untuk menghasilkan pengetahuan berdasarkan pembelajaran perempuan.

Perempuan era tersebut adalah Forum Diskusi Perempuan Yogya (FDPY), Solidaritas Perempuan, Yayasan Perempuan Mardika, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), dan Lembaga Bantuan Hukum APIK⁸⁵.

5. Periode 30 Persen Keterwakilan Perempuan

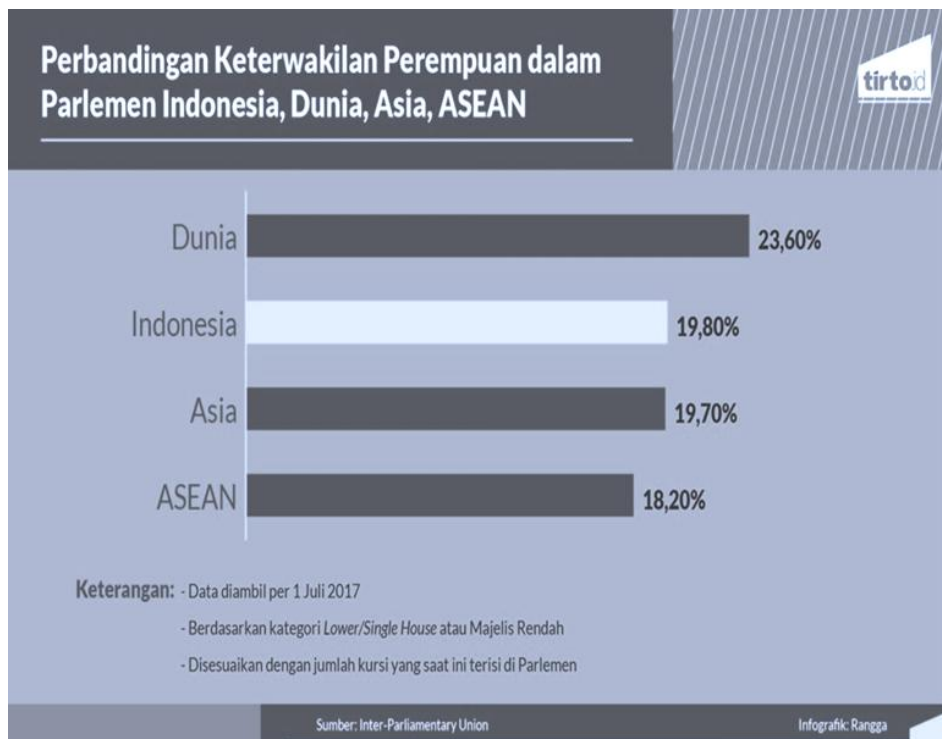
Pada 1 Desember hingga 22 Desember 1998 pasca runtuhnya Orde Baru terjadilah Kongres Perempuan Indonesia digelar oleh LSM perempuan di Yogyakarta. Salah satu mandat Kongres yang utama ialah memperjuangkan isu Hak Dipilih perempuan dalam parlemen. Sebab realitasnya sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen tidak pernah beranjak dari 10 persen. Selanjutnya, dari pemilu ke pemilu, perjuangan untuk merebut hak dipilih perempuan ini mengemuka.

Gerakan perempuan mendeklarasikan *affirmative action* kuota 30 persen untuk memastikan kemajuan perjuangan hak dipilih bagi perempuan. *Affirmatif action* untuk kuota 30 persen keterwakilan perempuan ini pada akhirnya diterima dan dicantumkan ke dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Pemilu walaupun masih penuh dengan catatan kelemahan⁸⁶. Begitu pun, di bidang isu hak asasi

⁸⁵ Lebih luas lihat Julia Suryakusuma, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.

⁸⁶ Terbit peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen

perempuan juga mengalami pengakuan negara, yakni ketika Komisi Nasional Anti-kekerasan terhadap Perempuan dibentuk atas keputusan Presiden Habibie dan perjuangan perempuan untuk membongkar kekerasan negara mendapatkan aksesnya. Pada periodisasi ini, hampir seluruh organisasi perempuan memuarakan persoalan isu hak perempuan ke ranah kebijakan yang berujung pada produksi legislasi dan anggaran untuk kepentingan perempuan. Agenda perempuan itu tidak ditolak oleh penyelenggara negara, bahkan diberi akses, namun demikian tetap terjadi pertarungan perspektif antara organisasi perempuan dengan penyelenggara negara, terutama partai-partai politik.



memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

6. Periode Melawan Neoliberalisme

Krisis ekonomi dunia yang berlangsung terus menerus mengakibatkan posisi Indonesia sebagai objek pemulihan krisis tersebut. Diantaranya sumberdaya alam dan tenaga kerja manusianya yang murah. Pada awal 1970an, Indonesia menjadi objek industri manufaktur dan pertanian pangan (beras), dan kemudian sejak 2000an Indonesia menjadi objek bagi industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan sawit). Masalah yang dihadapi petani dan nelayan perempuan saat ini berhubungan dengan terjadinya pemisahan ruang produksi dan reproduksi dalam ruang hidup mereka. perempuan dianggap bertanggungjawab untuk urusan domestik yang fungsinya menjaga kelangsungan hidup manusia atau fungsi reproduksi.

Dalam masyarakat masih ada perbedaan penghargaan, perbedaan kompensasi yang bersifat psikologis maupun ekonomi maka berarti fungsi dan perempuan dianggap lebih rendah (subordinasi) dari peran dan fungsi produksi yang selama ini diidentifikasi sebagai tugas yang diemban lelaki. Perempuan dianggap lebih feminin, laki-laki dianggap maskulin yang kemudian terwujud dalam ciri-ciri psikologis seperti; lelaki dianggap gagah, kuat, berani, macho, agresif dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, penurut, senang diperhatikan. Perbedaan karakter ini sering memunculkan tindakan kekerasan⁸⁷. Akibatnya muncul perlawanan perempuan buruh, petani, nelayan, miskin kota (yang kerjanya serabutan) terhadap perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi dirinya, atau yang merampas alat-alat produksinya. Di

⁸⁷ Lihat lebih luas Farida Nurani, *Buruh Migran Perempuan: Afiriasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal*, Malang: Universitas Brawijaya, 2017; sebagai perbandingan lihat, Heri Junaidi, *Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Pesisir Laut Sungsang, Kabupaten Banyuasin II Sumatera Selatan*, Palembang: Rapah Press, 2017

seluruh Indonesia saat ini telah muncul perempuan-perempuan rakyat pekerja yang melawan korporasi-korporasi ekstraksi, melakukan protes dan pemogokan di perusahaannya, sekali pun masih dalam cakupan lokal dan sektoral.

Nama “Marsinah” menjadi simbol perjuangan yang mampu membakar semangat kaum buruh, kaum perempuan, kelompok pro-demokrasi serta kaum-kaum yang tertindas lainnya. Tidak bisa dipungkiri, dalam gerak sejarah, kaum buruh memiliki andil besar di setiap capaian-capaian perubahan sosial. Salah satunya terjadi pada tanggal 3 & 4 Mei 1993 di PT. Catur Putra Surya (PT. CPS), Porong – Sidoarjo. Yang mengajukan 12 tuntutan kepada perusahaan, yakni kenaikan upah sebesar 20% sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 50/1992; tunjangan cuti haid; asuransi kesehatan; penyertaan buruh dalam ASTEK; THR satu bulan gaji; uang makan; kenaikan uang transport; bubarkan SPSI; tunjangan cuti hamil tepat waktu; upah karyawan baru disamakan dengan buruh yang sudah 1 tahun bekerja; hak-hak buruh yang sudah ada tidak boleh dicabut; pengusaha dilarang melakukan mutasi intimidasi, PHK pada buruh yang menuntut haknya. Proses inilah yang menyebabkan kematian Marsinah.

Pada kenyataannya, buruh perempuan sebagai bagian dari kelas pekerja, mengalami beban kerja ganda, dalam relasi kerja di bawah sistem kapitalisme. Selain harus bekerja (di luar rumah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, buruh perempuan pun harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, akibat peran atasnya sebagai istri dan ibu. Di tempat kerja, buruh perempuan kerap mengalami berbagai ketidakadilan. Banyak dari buruh yang menerima upah yang sangat tidak layak, karena tidak sesuai dengan tingkat pengeluaran rata-

rata buruh di wilayah dia bekerja. Buruh juga masih banyak yang tidak memiliki jaminan sosial dan perlindungan kerja. Demikian juga dengan cuti haid bagi buruh perempuan.

Ketidakadilan dialami buruh perempuan yang tengah mengalami masa kehamilan. Pelanggaran terkait cuti hamil juga dialami buruh perempuan dengan motif pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini semakin ironis dengan adanya kebijakan fleksibilitas tenaga kerja; yang menyebabkan munculnya buruh dengan status buruh kontrak, *outsourcing* dan magang. Cuti hamil menjadi sangat problematis bagi buruh perempuan; terutama yang berstatus pekerja kontrak dan *outsourcing*. Buruh perempuan dengan status tersebut kerap mengalami pemutusan kontrak ketika mereka diketahui hamil. Pemutusan kontrak tersebut kerap dipandang perusahaan sebagai cara untuk menghindari kerugian dengan mempekerjakan perempuan hamil, yang dianggap cukup beresiko dan menghambat efektivitas dan efisiensi akumulasi modal⁸⁸.

Kehadiran perempuan terutama kaum buruh merupakan komponen penting dari kaum proletariat. Buruh perempuan menjadi

⁸⁸ Beberapa data dapat dilihat dalam Marselina Nope, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*. Yogyakarta: Resist Book, 2005; Nolinia Zega, “Kebijakan Pengupahan: Keberpihakan Negara Terhadap Pemilik Modal”. <http://mapcorner.wg.ugm.ac.id>, 2017. diakses 5 Mei 2020; Alih Nugroho, *Relasi Industrial pada Pasar Tenaga Kerja Fleksibel dan Perjuangan Buruh Menuntut Upah Layak serta Jaminan Kerja di Kawasan Industri Bekasi*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2017. Jika dibandingkan kehidupan buruh terutama buruh perempuan di Indonesia dengan buruh perempuan di negara-negara lainnya, hingga hari ini kondisi buruh perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal. Denmark misalnya; negara ini menerapkan kebijakan pemberian hak cuti melahirkan yang selama 52 minggu kepada buruh perempuannya, dan mereka pun berhak mengambil haknya tetap mendapatkan upah penuh. Selain upah yang diberikan penuh, mereka juga mendapatkan tunjangan keluarga dari negara, besarnya mencapai 4,2 persen dari total pendapatan negara. Untuk memudahkan pekerjaan buruh perempuan, — baru melahirkan, atau bayinya berusia enam bulan keatas, dapat dititipkan di *baby daycare*, tanpa dipungut biaya apapun

potensi kekuatan dari kelas ini dalam perjuangan menghancurkan sistem kapitalisme. Sehingga, peran perempuan terutama buruh perempuan dalam hal ini, menjadi sangat penting. Partisipasi dan kesadaran utuh serta tindakan empirik dari perempuan menjadi hal yang mau tidak mau harus diwujudkan untuk menghapuskan segala bentuk hubungan yang penindasan- warisan masyarakat berkelas. Penindasan perempuan di bawah sistem ini, niscaya dibebaskan melalui perjuangan politik.

Kerangka *Evolusi Unilinear* menjadi bagian penting dalam kajian ini. Ada dua tesis penting dalam kajian sejarah gerakan perempuan melalui pemikiran Soekarno. Yaitu: Pertama, tesis mengenai bentuk keluarga dan masyarakat patriarki yang tidak menindas perempuan. Kedua, tesis mengenai evolusi pergerakan perempuan dari tingkatan pertama (paguyuban *koncowingking* atau *isteri pendamping suami*), menuju tingkatan kedua (persamaan hak perempuan) menuju tingkatan ketiga (sosialisme). Tesis pertama, digali melalui teori Lewis H, Morgan, J.J. Bachofen yang disintesakan oleh Friedrich Engels⁸⁹, untuk memahami evolusi keterbelakangan perempuan dalam sejarah perkembangan masyarakat. Dari sandaran kedua teori tersebut menunjukkan bahwa keterbelakangan perempuan bukanlah karena kodrat

⁸⁹ Frederick Engels adalah nama dibalik nama Karl Marx. Hampir dalam semua tulisan-tulisan Marx, terdapat banyak kontribusi dari Engels. Ini dapat kita lihat dari pencatatan nama Engels dibelakang nama Marx dalam beberapa tulisannya. Seperti contohnya dalam *The Holy Family* (1845), *The German Ideology* (1845), *The Communist Manifesto* (1848) dan beberapa karya serta surat-surat lainnya. Namun, ternyata Engels juga menyumbangkan salah satu karya terbesarnya sendiri yaitu *The Origin of the Family, Private Property and the State* yang ditulisnya pada tahun 1884 setelah kematian kawan seperjuangannya. Tulisan ini pertama kali dipublikasikan pada Oktober 1884 di Hottingen-Zurich. Pada cetakan keempat Engels membuat perbaikan terhadap buku ini, khususnya pada bagian pengantar yang baru dengan data tambahan yang berkaitan. Edisi perbaikan tersebut diterbitkan pada 1891. Baru pada tahun 1942 diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Alick West.[1] Pada April 2004, penerbit Kalyanamitra dengan editor Joesoef Isak[2] menerbitkan buku pertama *The Origin of the Family, Private Property and the State* dengan menggunakan bahasa Indonesia.

alam, melainkan terbentuk dalam sejarah perkembangan cara produksi masyarakat. proses evolusi perubahan dari matriarki menuju patriarki⁹⁰. Informasi bahwa sistem patriarki tidak menindas perempuan mengandung kontradiksi di dalam pembagian kerja secara seksual (keluarga, masyarakat, negara) yang mempertentangkan dualisme produksi dan reproduksi.

Tesis kedua berdasarkan teori evolusi⁹¹, bahwa gerakan perempuan berkembang dalam tahapan sejarah. Dasarnya adalah pengalaman empirik tumbuhnya pemikiran dan gerakan perempuan di Eropa selama abad 17-20. Dimulai dari (1) paguyuban ibu-ibu borjuasi untuk menjadi perempuan yang sempurna sebagai pendamping suami, lalu meningkat kepada (2) gerakan feminisme yang ujudnya ialah memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki di ranah kerja dan hak pemilihan (*suffragette*), dan puncaknya ialah (3) pergerakan sosialisme di mana laki-laki dan perempuan berjuang bahu membahu untuk mendatangkan masyarakat sosialis, sehingga keduanya sama-sama merdeka dan sejahtera. Demikian pula dengan pergerakan perempuan, ia asumsikan akan bergerak unilinear dan berpuncak pada revolusi sosialis. Untuk pengalaman Eropa abad 18-20, analisa evolutif ini nyaris sempurna dapat mempertalikan pertumbuhan gerakan perempuan di Eropa dan AS sebagai sebuah kesatuan proses evolusi pemikiran dan tindakan yang utuh. Sukarno menggambarkan gerakan feminis yang

⁹⁰ Sukarno, *Sarinah*, Bandung: terbitan Syabas Books, 2012, hal 34

⁹¹ Secara garis besar, beberapa kategori evolusi, yaitu: 1) Evolusi progresif Merupakan evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup. 2) Evolusi regresif Merupakan evolusi yang mengarah pada kemungkinan populasi suatu spesies menjadi punah; 3) Evolusi divergen dan konvergen Merupakan perubahan pada organ yang berbeda pada spesies yang memiliki hubungan kekerabatan jauh menuju kesamaan fungsi organ tersebut. Dikutip dari Serafica Gisca, "Evolusi dan Berbagai teorinya. <https://www.kompas.com>, diakses tanggal 5 Mei 2020.

memproduksi dan dapat memanfaatkan revolusi kemerdekaan di Prancis dan AS (abad 18), dan seperti berlanjut dengan pertumbuhan gerakan perempuan sosialis di Jerman, Inggris dan Rusia pada awal abad 20 yang membuahkan reformasi atau revolusi sosialis.

C. Peta Gerakan Politik masa Pemilu di Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998, berbagai perubahan konstitusional telah dilakukan untuk melemahkan kekuasaan cabang-cabang eksekutif. Aktifitas demokrasi ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Masa Kampanye Pemilihan Presiden tahun 2019 merupakan ajang narasi programatik yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pilihan yang bercampur dengan dominasi kampanye yang mengkapitalisasi isu-isu SARA, politik identitas, konten berita palsu dan ujaran kebencian, serta olok-olok politik antar kubu terkait isu-isu yang tidak substantif dan pada akhirnya menambah polarisasi di masyarakat, bahkan disinyalir semakin mendorong apatisme terhadap pemilu dan menguatnya gerakan mendorong golongan putih. Hasil studi Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) tentang “Mengelola Politik Identitas: Strategi Kontra-Naratif Melawan Politisasi Politik Identitas Dalam Pemilu 2019 Melalui Keterlibatan Tim Kampanye Kandidat” menyimpulkan, *pertama*, konteks kontestasi saat pemilihan presiden residu dari tajamnya polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas semacam dinamika kontestasi dan polarisasi yang terus dirawat. *Kedua*, desain elektoral yang menetapkan adanya presidential threshold turut meningkatkan intensitas polarisasi politik, karena secara politis hanya membuka peluang munculnya dua kandidat.

Ketiga, fenomena industri konsultan politik, influencer, dan buzzer dalam kampanye digital pasangan calon yang berperan penting dalam menentukan produksi isu dan amplifikasi konten kampanye di platform digital, peran mereka juga turut memperburuk polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas. *Keempat*, keserantakan Pemilu 2019 menyebabkan lebih dominannya isu pemilihan Presiden dan meminggirkan perhatian terhadap pemilihan legislatif baik DPR RI, DPD, maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Kelima*, media sebagai sumber informasi publik justru cenderung memiliki preferensi terhadap isu-isu non programatik dalam pemberitaannya⁹².

Hasil rilisan beberapa lembaga survei kredibel di Indonesia, akan ada sekitar 9 partai politik (parpol) yang lolos *parliamentary threshold*. di antaranya yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, PPP, dan Demokrat. Sedang yang tersingkir yaitu, PBB, Hanura, PKPI, berserta partai peserta pemilu perdana yang tidak ada satupun dari mereka yang lolos seperti PSI, Perindo, Partai Garuda, Berkarya. Hasil survey menemukan terjadi kenaikan suara partai-partai Islam di pertarungan pemilu 2019 ini. Indikator yang muncul partai pengusung seperti PDI-P dan Gerindra sebagai partai nasionalis tidak mengalami kenaikan yang signifikan seperti yang diprediksikan oleh beberapa lembaga survei sebelumnya, yang menyebut PDIP akan bertengger di kisaran angka 25%, dan Gerindra di angka 15%. PDIP yang di tahun 2014 mendapatkan 19,46%, pemilu kali ini mendapat 19,82% saja, sedang Gerindra naik dari 11,81% dan mendapat 12,75%⁹³.

⁹² Lihat “Politik Identitas Dalam Kampanye Pemilu 2019, diakses dari <https://www.puskapol.ui.ac.id>

⁹³ Data Partai peserta Pemilu 2019 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Partai Golongan Karya (Golkar); Partai Nasional Demokrasi (Nasdem); Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); Partai Berkarya; Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Persatuan

Indikator atas hal tersebut seperti hasil dari hitung cepat Cyrus Network bekerja sama dengan CSIS, PKB yang berada di kubu Jokowi berada di urutan keempat dengan perolehan suara 9,66%. PKS yang mengalami kenaikan dari 6,79% ke 8,89%. Sementara pengusung beberapa partai nasionalis mengalami penurunan suara, di antaranya yaitu Demokrat, partai yang pernah berkuasa bersama Soesilo Bambang Yodoyono selama 10 tahun, Hanura yang semenjak 2014 lalu ada di kubu penguasa, dan Golkar yang menjadi *runner-up* di 2014 dengan perolehan suara 14,75% anjlok menjadi hanya 11,05%. PAN mengalami sedikit penurunan yang tidak signifikan, sedang PPP turun namun tetap bisa bertahan di atas 4%. Dari 3 partai lama yang terdepak, hanya PBB yang berideologi Islam, PKPI dan Hanura sama sama beraliran nasionalis. Jika suara seluruh parpol Islam yang masuk di parlemen dijumlahkan, akan menghasilkan sekitar 30% suara nasional, atau 57 juta suara. Hal tersebut menandakan ada sepertiga dari penduduk Indonesia di Pemilu 2019 merasa aspirasi mereka terwakilkan melalui partai-partai berideologi Islam. Dari sisi ini peta politik di Indonesia pada pemilu 2019 didominasi partai-partai dengan ideologi Islam⁹⁴.

Berdasarkan survei Litbang Kompas terhadap elektabilitas partai politik pada Pemilu 2019 yang terdapat enam parpol yang elektabilitasnya berada di atas ambang batas parlemen 4 persen, yakni PDIP (26,9%), Gerindra (17,0%), Golkar (9,4%), PKB (6,8%), Demokrat (4,6%), dan PKS (4,5%). Selain itu, ada tiga parpol yang elektabilitasnya tak melewati ambang batas, namun masih berpeluang melenggang ke Senayan jika

Indonesia (Perindo); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Solidaritas Indonesia (PSI); Partai Amanat Nasional (PAN); Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Partai Demokrat; Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

⁹⁴ "Politik Islam: Kunci Kemenangan 2019?", diakses dari www.pinterpolitik.com, 22 April 2019

ditambah tingkat margin of error +/- 2,2%. Ketiganya adalah PAN (2,9 %), PPP (2,7%), dan Nasdem (2,6%)⁹⁵.

Peta politik di Indonesia juga berhubungan dengan gerakan ormas ekstra parlementer mempunyai beberapa jenis kelompok, yaitu, (1) kelompok anomik, (2) kelompok non-assosiasional, (4) kelompok institusional, dan (5) gerakan masyarakat⁹⁶. Kelompok anomik dan kelompok non assosionalis mempunyai persamaan gerakan bersifat reaktif, spontan, dan jarang terorganisir. Perbedaan dari keduanya pada anggota. Kelompok anomik terbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara umum, sedangkan kelompok non assosionalis berdiri atas nama keluarga dan keturunan, atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga atau pemimpin agama, dan semacam itu.⁹⁷

Kelompok institusional merupakan kelompok yang terorganisir, yang didukung oleh kaum birokrasi, partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, atau kaum agamawan. Kelompok ini merupakan kelompok formal, yang bersosialisasi dengan kepentingan sosial politik, dan mampu menjadi jembatan atau wakil dari kelompok lain ataupun mengatas namakan dirinya sendiri. Sedangkan kelompok assosional meliputi serikat buruh, kamar dagang, perkumpulan usahawan dan industrialisasi, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok agamawan. Kelompok assosiasional biasanya memakai tenaga staf

⁹⁵ Lebih luas lihat Heru Margianto, "'Meraba Peta Politik Pasca-Pemilu 2019", *nasional.kompas.com*

⁹⁶ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, Jakarta: Bina Aksara, hh. 117.

⁹⁷ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, hh. 129-142.

profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.⁹⁸

Berbeda dengan keempat kelompok diatas, gerakan masyarakat merupakan kelompok didasari oleh teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralis yang menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok-kelompok yang dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat⁹⁹.

Dari sisi dinamika hubungan antara Islam dan negara di Indonesia telah mengalami proses pasang surut, dan pada sebagian besar episode sejarahnya merupakan cerita antagonisme dan kecurigaan negara terhadap Islam. Hal tersebut bisa dilihat, terutama selama masa dua dasawarsa pertama kekuasaan Orde Baru, di mana umat Islam sering ditempatkan pada posisi marginal dalam struktur dan birokrasi, sehingga seringkali aspirasi-aspirasi politik Islam menjadi terkalahkan¹⁰⁰. Sejak satu dasawarsa terakhir Orde Baru, negara mulai menunjukkan kecenderungan akomodatif terhadap beberapa aspirasi umat Islam, baik dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Perubahan relasi kuasa sampai memasuki era reformasi, akhirnya membuka sejarah baru umat Islam di Indonesia. Misalnya, pemerintahan B.J. Habibie menunjukkan sikap yang lebih ramah terhadap Islam. Ini terbukti dengan dibukanya kembali beberapa agenda politik Islam, seperti pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal bagi ormas maupun partai politik dan kebebasan mendirikan partai Islam.

Beberapa kebijakan politik B.J. Habibie tersebut nampaknya belum memuaskan banyak pihak. Sehingga, dalam Sidang Umum MPR tahun

⁹⁸ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, hh, 143-173.

⁹⁹ Oran Young, *System Of Political Analysis*, Englewood, New Jersey: New Jersey University Press, 1968, hh. 79-80.

¹⁰⁰ Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hh. 59-111.

1999, mayoritas anggota MPR, secara kontroversial¹⁰¹ tidak menerima laporan pertanggungjawabannya. Hal tersebut, membuat B.J. Habibie tidak punya pilihan lain, kecuali membatalkan pencalonan dirinya kembali sebagai Presiden RI. Menyusul penolakan MPR terhadap pidato pertanggungjawaban Habibie, pergulatan politik di seputar senayan semakin menajam, terutama dalam interen tubuh Golkar dan Poros Tengah. Perubahan peta politik, terutama menyangkut pencalonan presiden segera berubah, dimana kubu Golkar yang semula mencalonkan Habibie menjadi goyang. Sementara itu posisi Megawati yang dicalonkan PDI Perjuangan dan Abdurrahman Wahid yang dijagokan poros tengah makin solid.

Dalam pemungutan suara secara tertutup pada tanggal 20 oktober 1999 di ruang sidang MPR, menghasilkan 373 suara untuk Abdurrahman Wahid, dan 313 suara untuk Megawati. 9 abstain, dan 4 dinyatakan tidak sah. Maka Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian menetapkan KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Presiden RI ke-4 untuk periode 1999-2004¹⁰². Terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden ke-4 Republik Indonesia, Amien Rais, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai ketua MPR-RI; dan Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai ketua DPR-RI oleh sebagian umat Islam, dipandang merupakan kemenangan pertama

¹⁰¹Penolakan pertanggung jawaban Habibie, menurut Hermawan Sulistiyo, peneliti LIPI, lebih mencerminkan pertarungan politik dari pada penilaian terhadap isi pertanggung jawaban Habibie. Dengan ditolaknya pertanggung jawaban Habibie ini banyak tokoh fraksi di MPR, di antaranya Kwik Kian Gie, Hatta Rajasa, Matori Abdul Djalil dan Zarkasyi Nur, menyarankan agar Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya, lihat “ Selamat Datang Pemerintahan Baru” *Kompas*, 20 Oktober, 1999; “Hasil Lobi Pimpinan DPR dan Mahasiswa: Pengunduran diri Presiden di tunggu besok” *Republika*, 14 Oktober 1999.

¹⁰²“15 Menit di Ruang Mawar”, *Kompas*, 21 Oktober 1999.

kelompok Islam tradisional dan Islam modernis dalam gelanggang politik di Indonesia.

Kemenangan politik ini berlangsung di tengah meningkatnya intensitas dan eskalasi konflik¹⁰³ yang memerlukan partisipasi politik¹⁰⁴ umat Islam dari berbagai elemen dan strata masyarakat. Karena hal ini menyangkut persoalan politik Islam di Indonesia masa depan. Artinya, kegagalan Abdurrahman Wahid menjaga integrasi bangsa, krisis politik dan membangun fundamen-fundamen baru perpolitikan nasional, juga bisa dipandang sebagai kegagalan politik umat Islam di Indonesia secara keseluruhan. **Pada** Islam menjadi tiket politik di pemilu 2019. Hal tersebut nampak dari bagaimana permainan isu Islam kencang dihembuskan dari kedua kubu. Hasil survei peta kekuatan parpol 2019 menunjukkan terjadi peningkatan suara di parpol Islam pasca pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam harus diperhitungkan dalam kontestasi politik¹⁰⁵.

¹⁰³ Menurut Mulyana W. Kesumah, setidaknya ada 4 tipe konflik yang mengedepan pada masa pemerintahan ini. Yaitu: (1) Konflik Pusat-Daerah yang bersifat laten maupun manifes, termasuk komplik bersenjata, (2) .Konflik struktural yang mengejewantah dalam bentuk-bentuk aksi-aksi massa untuk menuntut hak dasar mereka, (3) Konflik komunal yang biasa disebut juga sebagai konflik horisontal di beberapa daerah di Indonesia. Lihat Mulyanah W. Kesumah, *Konsolidasi Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional : Dialog Publik*, Jakarta: INDEMO, 2001, hh. 2-3

¹⁰⁴ Partisipasi politik dalam pengertian analisa politik modern, merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif maupun pasif dalam kehidupan politik. lihat Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation In developing countries*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977, h. 3. Politik menurut perspektif syari'at, ialah yang menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya dimuka bumi, menancapkan jaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya ditengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, system dan jalannya. Tujuannya berdasarkan syari'at dan system yang dianut juga berdasarkan syari'at. Islam adalah aqidah dan syari'ah, agama dan daulah, kebenaran dan kekuatan, ibadah dan kepemimpinan, mushaf dan perang.

¹⁰⁵ Berbagai kajian keislaman, fiqh siyasah atau fiqh politik menjadi bagian yang menjelaskan bahwa Syari'at Islam tidak sekedar mengatur tentang ketuhanan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta akhlak *an sich*, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan daulah (Negara dan pemerintah), atau hubungan pemimpin dengan rakyat, hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan pejabat dengan penduduk, yang diatur dalam

BAB III

PEREMPUAN DAN POLITIK DI INDONESIA

A. Sejarah

Secara umum ada dua persoalan yang melatar belakangi keterbelakangan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu 1) kultur dan 2) paham tentang agama yang merupakan faktor klasik. Very Wahyudi menilai bahwa dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan laki-laki, terlihat dari segi kebutuhan yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuan hanya bisa dijawab oleh perempuan karena laki-laki tidak akan bisa memahami kebutuhan perempuan. Yang menjadi persoalan adalah kelemahan perempuan di bidang politik, maka ketika perempuan mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya maka salah satu persoalan perempuan telah terjawab. Karena perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki, partisipasi perempuan dalam dunia politik dinilai tidak lebih dari sekedar pemberian hak pilih atau pemberian suara pada pemilu, hal ini juga lebih kepada peran untuk berpartisipasi yang di mobilisasi (*mobilized participation*) daripada partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) yang

fiqh daulah. Telah banyak para fuqaha terdahulu yang membahas masalah ini, yang dimasukkan dalam pembahasan fiqh secara umum, dan bahkan ada yang mengupasnya dalam kitab-kitab tersendiri, seperti *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, karangan Al-Mawardi Asy Syafi'y (wafat 450 H), Abul Ya'la Al-Farra' Al-Hambali (wafat 458 H.), *Ghayyatsul-Umam*, karangan Al Imam Al Haramain Asy Syafi'y (wafat 476 H). Kitab *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlahir Ra'yu war Ra'iyah* karangan Ibnu Taimiyah (wafat 728 H), serta karangan dari murid dan sahabat Ibnu Taimiyyah yaitu Ibnu Qayyim yang mengarang kitab *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah*. Termasuk kitab klasik *Al-Kharaj* yang dikarang oleh Abu Yusuf (wafat 181 H), salah seorang sahabat Imam Abu Hanifah, serta banyak lagi kitab-kitab lainnya termasuk yang ditulis pada awal abad ke-20. Lihat seperti karya Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, Terjemahan *As-Siyasah Asy-Syari'yah*, oleh Kathur Suhadi, Pustaka Al Kautsar, Cet.I, Jakarta, 1999.

mencerminkan hak politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas¹⁰⁶.

Studi relasi politik melalui kajian dominasi politik maskulin terhadap politik feminim semakin berkembang yang memperlihatkan adanya sebuah upaya representasi politik formal tabu dari perempuan menjadi subjek pasif dalam berbagai aktifitas politik mengarah pada relasi kesetaraan gender. Hal tersebut juga tidak bisa menapikan adanya alasan keterbatasan perempuan Indonesia dalam ranah politik formal. Nurland seperti dikutip dari Wasisto Raharjo Jati dalam jurnalnya ditulis bahwa ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya keterbatasan gerakan politik praktis kaum perempuan yaitu 1) jeratam patriarki; 2) Doktrin agama; 3) Hegemoni Negara¹⁰⁷. Penjelasan atas ketiga hal tersebut sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, Perempuan Indonesia terjat dalam kultur patriarki yang dalam kehidupan sehari-hari. Objek subordinatif dari kaum lelaki yang mendiferensiasikan dan mengultuskan ranah kehidupan, dan penguatan istilah kualitas “*entitas something*” bagi laki-laki dan “*entitas nothing*” bagi perempuan semakin mengokohkan kajian androposentrisme tersebut menegaskan bahwa laki-laki lebih mandiri daripada perempuan sehingga laki-laki mempunyai fungsi autoritatif dan regulatif dalam wujud domestifikasi¹⁰⁸. Contoh atas hal tersebut terlihat dari aktifitas perempuan yang “dipaksa” bekerja antara pekerjaan rumah tangga dan berkarir yang keduanya menjadikan perempuan tidak bisa bebas sepenuhnya menjadi entitas mandiri.

¹⁰⁶Very Wahyudi, Peran Politik Perempuan Dalam Persepektif Gender, *Politea, Jurnal Politik Islam*, Vol. 1No,1 (Jan-Jun) 2018, h. 63

¹⁰⁷ Lihat Wasisto Raharjo Jati, “Historitas Politik Perempuan Indonesia”, *Jurnal Paramita* Vol. 24, No. 2 - Juli 2014

¹⁰⁸ Istilah Domestifikasi adalah upaya untuk menundukkan perempuan melalui serangkaian norma, perilaku, maupun nilai maskulinitas

Kedua, doktrin agama yang masih konservatif dinilai terlalu mengekang kebebasan perempuan dalam ranah publik sehingga laki laki menjadi pionir dalam kehidupan sekaligus kosa kata “ “melindungi perempuan” yang selalu dikutip dalam berbagai rujukan sumber teologis dan berimplikasi memberikan kaum laki laki bertindak lebih atas kaum perempuan demi perlindungan tersebut. Pada akhirnya, antara kultur patriarki dan teologis kemudian bersinergis dalam membentuk konstruksi bahwa perempuan harus sepenuhnya berada dalam kekuasaan lelaki. Maka yang terjadi kemudian justru adalah menimbulkan perspektif bahwa lelaki adalah sumber dari segalanya (*man is a measure of all things*) sehingga menjadikan segala macam parameter maskulinitas menjadi sumber rujukan penting.

Ketiga, Hegemoni negara yang masih dipandang sebagai negara kaum laki-laki. Adanya pandangan tersebut sebenarnya ingin memberikan penegasan bahwa urusan negara sebagai urusan vital yang perlu diserahkan kepada kaum lelaki sebagai administrator dan eksaminator dan perempuan hanya menjadi asisten saja. Akibatnya nilai nilai bahwa negara adalah ruang netral yang membangun kesetaraan bagi siapapun justru terjebak pada masalah diferensiasi ruang yang sepenuhnya dibagi atas dikotomi maskulin dan feminin. Ruang publik mengindikasikan ruang tersebut merupakan bagian dari domain pria yang mencakup keseluruhan kehidupan maupun bermasyarakat sedangkan ruang privat sendiri mengindikasikan adanya ruang bagi perempuan yang utilitasnya sendiri hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Konstruksi sejarah atas politik juga berkembang dalam proses yang berlanjut baik dalam dunia patriakal maupun matrelinial. Perempuan Indonesia telah terjun dalam dunia politik sejak dulu. Mereka tercatat

perannya baik secara personal maupun organisasi. Beberapa di antaranya merupakan sosok pemimpin yang berhasil seperti Sultanah Dannir pada abad 14 masehi (tahun 781 H/1389 M), pemimpin perempuan di wilayah Aceh Utara (dahulu dikenal dengan Pasai dan Kadah). Kemudian Sultanah Nashariyah yang memerintah Samudera Pasai selama 22 tahun.

Dikenal pula Sultanah Ratu Tajul Alam Safiuddin Syah, penerus Sultan Iskanda Muda. Sultanah ini kemudian mengangkat 16 perempuan sebagai anggota legislatif atau majelis Mahkamah Rakyat. Diantara ke 16 perempuan tersebut adalah Si Nyak Bunga, Si Halifah, Si Sanah, Si Nyak Bunga, Maimunah, Siti Cahya, Mahkiah, Si Nyak Puan, Nadisah, Si Nyak Caya, Si Habibah, Umi Puan, Siti Awan, Umi Nyak Angka, Si Mawar, dan Si Manis. Mereka ikut duduk dalam majelis untuk mengatur urusan negara dengan tujuan mempertimbangkan kebijaksanaan sultanah dan meneliti segala adat dan hukum yang layak disalurkan kepada rakyat agar tetap adil dan makmur bersama dengan pria¹⁰⁹.

Repleksi akar politik feminisme dalam studi partisipasi politik Indonesia tidak lepas dari sejarah konstruksi negara kolonial hingga masa pascakolonial yang menempatkan perempuan sendiri sebagai warga negara kelas dua, walaupun kisah kepahlawanan kaum perempuan juga berkembang di era tersebut. Berdasarkan data diketahui mereka itu 1) **Cut Nyak Dhien** keturunan langsung Sultan Aceh, yaitu Teuku Nanta Seutia, seorang uleebalang VI Mukim diakui oleh Presiden Soekarno sebagai

¹⁰⁹ M. A. Hasjmy , *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*. Selama pemerintahan Sultanah tersebut mendorong para ulama saat itu untuk menulis kitab, seperti kitab *Hidayatul Iman bi Fadlil Minan* (Petunjuk Iman dengan Keutamaan Berbagai Anugerah) , dan kitab *Miratuth Thullab* (Anak Panah/ Kompas Para Penuntut Ilmu). yang keduanya ditulis oleh Syaikh Nuruddin Ar-Raniry dalam bahasa Melayu. penerjemahan kitab Tafsir dalam bahasa Melayu, *Tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil* (Tafsir Penerang Kitab yang Turun dan Rahasia Penafsiran Makna Al-Qur'an) yang selanjutnya dikenal dengan *Turjumanul Mustafid* (Terjemahan bagi Orang-orang yang Mau Memahami).

Pahlawan Nasional Indonesia melalui SK Presiden RI No.106 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964; 2) **Cut Nyak Meutia** lahir di Keureutoe, Pirak, Aceh Utara 1870. Ia terkenal sebagai perempuan yang mempunyai semangat juang tinggi dan tekad yang kuat untuk mengusir penjajah. Atas segala jasa-jasanya, pemerintah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI No 107 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. ; 3) **Raden Ajeng Kartini** adalah pejuang perempuan asal Jepara yang gigih memperjuangkan emansipasi perempuan. Atas perjuangannya, pemerintah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada R.A. Karini berdasarkan SK Presiden RI No 108 Tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964.

Selain ketiga tersebut ada juga 4) **Raden Dewi Sartika**, adalah salah satu tokoh perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Beliau lahir di Bandung, 4 Desember. Atas perjuangannya dalam mencerdaskan bangsa, Ia diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, pada tanggal 1 Desember 1966; 5) **Martha Christina Tiahalu** merupakan salah satu pejuang perempuan. Lahir di Maluku, 4 Januari 1800 dan turut serta dalam perang Patimura melawan Belanda pada tahun 1817 Martha Christina diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, menurut SK Presiden RI No.012/TK/Tahun 1969,

tanggal 20 Mei 1969; 6) **Maria Walanda Maramis** merupakan Perempuan Penggerak dari Minahasa. Lahir di Kema, Sulawesi Utara pada 1 Desember 1872. Seorang perempuan yang belajar otodidak dan akhirnya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya (PIKAT), yang mengajarkan cara-cara mengatur rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi dan pekerjaan tangan. Salah satu kontribusinya adalah pembiasaan sekolah menggunakan pakaian daerah.

Maria Walanda Maramis wafat pada 22 April 1924 di Maumbi. Ia mendapatkan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia atas perjuangannya dalam mencerdaskan generasi bangsa sesuai dengan SK Presiden RI No 012/K/1969 tanggal 20 Mei 1969.

Selanjutnya 7) **Siti Walidah** atau biasa dikenal dengan **Nyai Ahmad Dahlan** lahir di Yogyakarta tahun 1872. Ia merintis kelompok pengajian perempuan Sopo Tresno. Sopo Tresno menjadi sebuah organisasi keperempuanan berbasis agama Islam. Akhirnya dipilihlah nama Aisyah, sebagai organisasi islam bagi kaum perempuan tepat pada malam Isra Mi'raj, 22 April 1917. Lima tahun kemudian, Aisyah resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Pemerintah memberikan gelar kehormatan kepada Nyai Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI No 042/TK/1971; 8) **Raden Ageng Kustiah Retno** Edi ini adalah seorang ahli strategi perang yang lahir di Serang 1752. Meskipun kodratnya sebagai seorang perempuan, namun ia juga mampu sebagai panglima perang. ia memimpin langsung pasukannya ketika perang gerilya di desa Beku, kabupaten kulon progo. Strategi yang diterapkan oleh Nyi Ageng dalam berperangan tersebut, membuat Pangeran Diponegoro mengangkatnya sebagai penasihat, sejajar dengan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Joyokusumo dalam siasat perang. Nyi Ageng Serang diberi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI No. 084/TK/Tahun 1974, tanggal 13 Desember 1974.

Disamping kedelapan pahlawan perempuan tersebut, ada juga ; 9) **Hajjah Rangkyo Rasuna Said** merupakan seorang pejuang perempuan yang gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Capaian tertingginya pada karir politiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ia kemudian

diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI No. 084/TK/Tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974; 10) **Hj. RA Fatimah Siti Hartinah** atau lebih dikenal dengan nama **Tien Soeharto** adalah istri Presiden Indonesia kedua, Jendral Purnawirawan Soeharto. Sebagai Ibu Presiden, Tien peletak pertama dalam membenahi istana negara yang dahulunya seperti peninggalan zaman Belanda, diubah menjadi lebih lembut dengan menonjolkan ciri khas Indonesia, seperti menambahkan perabot dengan ukiran jati dari Jepara, memasang lukisan-lukisan karya pelukis Indonesia hingga mengganti warna-warna bangunan menjadi lebih cerah. Salah satu kontribusi Tien hingga saat ini adalah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang sampai saat ini menjadi ikon bagi bangsa Indonesia;

Selanjutnya 11) **Fatmawati** adalah perempuan asli pribumi yang lahir di Bengkulu, 5 Februari 1923, menikah dengan Presiden Indonesia Pertama Soekarno pada tanggal 01 Juni 1943. Fatmawati sebagai Ibu Negara Indonesia Pertama terkenal sebagai perempuan yang berjasa dalam menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara pertama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan Ibu Fatmawati sejak sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, diakui oleh Pemerintah Pusat, melalui Keputusan Presiden RI No.118/TK/2000 tanggal 4 Nopember 2000 sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

Beberapa pahlawan perempuan lainnya adalah 12) **Opu Daen Risaju** atau yang ketika kecil akrab dikenal sebagai Famajjah adalah Pahlawan Nasional yang lahir di Palopo tahun 1880 menjadi ketua PSII Wilayah Tanah Luwu Daerah Palopo. Atas segala jasanya, Opu Daeng Risaju diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional. Selanjutnya ada

pahlawan perempuan seperti **Rohana Kudus** seorang perempuan Multitalenta yang mempelopori emansipasi kaum perempuan, seperti RA Kartini. Rohana Kudus adalah seorang guru, pendiri sekolah perempuan, penulis, wirausaha dan juga pemimpin redaksi dari berbagai surat kabar perempuan. Rohana Kudus selain terkenal sebagai perempuan yang berpengaruh di Sumatera Barat, juga menguasai tiga bahasa asing yaitu bahasa Arab Latin, Arab Melayu dan Belanda. Kemudian **Rahmah El Yunusiyahh** tokoh ulama perempuan yang berasal dari Sumatera Barat. Salah satu bukti perjuangannya yang tetap eksis hingga hari ini adalah Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Beliau juga perempuan pertama yang mendapat gelar Syaikhah dari Universitas Al-Azhar Mesir, pada tahun 1957. **Siti Manggopoh** merupakan tokoh perempuan yang sangat ditakuti pada zaman sebelum kemerdekaan. Siti Manggopoh terkenal berani melakukan perlawanan terhadap kebijakan ekonomi Belanda melalui pajak uang (*belasting*) yang dianggap bertentangan dengan adat Minangkabau.

Di tahun 1820, John Crawfurd seperti dikutip dari Ella Saputri mencatat bahwa di Sulawesi Selatan diketahui para pria berkonsultasi dengan perempuan untuk semua urusan publik. Perempuan juga kerap diangkat sebagai pemegang tahta, ketika monarki bersifat boleh dipilih¹¹⁰. Peranan perempuan di arena politik bagi masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan muncul dalam institusi bernama "baine" di mana perempuan berperan sebagai mitra laki-laki dalam dewan pemerintahan tradisional. Para perempuan pada saat itu menjadi mediator antara masyarakat umum dan para pemimpin setempat. Ditambah dengan budaya dimana perempuan turut

¹¹⁰ Ella Saputri, "Perempuan Indonesia dan Politik, diakses dari www.antaranews.com

menentukan posisi sosial pasangan. Semakin tinggi status sosial istri, semakin terdongkrak pula tingkat sosial suaminya¹¹¹.

Zaman kaum perempuan bergerak di Indonesia diawali oleh pikiran Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi perempuan pada tahun 1912, sejak itu kaum perempuan melangkah memasuki priode ke priode dalam bentuk gerakan perempuan. Dalam kajian Handayani dan Novianto disimpulkan bahwa di Jawa, perempuan cenderung menguatkan peran politiknya di tataran domestik. Sebuah pepatah Jawa menyebutkan bahwa “*apik ing suami gumantung istri, apik ing anak gumantung ibu*”¹¹², Meski “berkuasa” di lini domestik dan tidak terlalu tampil di ruang politik publik, perempuan Jawa sejatinya aktif berpolitik selaku pemilih di dalam pemilu, ikut dalam kampanye partai politik, dan melobi pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pornografi dan perlindungan anak¹¹³.

Seiring dengan aktifitas pergerakan perempuan muncul kemudian pasca proklamasi yang kemudian mengubah konfigurasi politik. Ketiadaan musuh bersama membuat lelaki menjadi makin dominan dalam bidang politik sementara perempuan disingkirkan dan dianggap lebih layak bergerak di bidang sosial. Organisasi perempuan yang bercorak keagamaan mayoritas berjalan dengan pembagian kerja model sosial¹¹⁴. Dalam proses

¹¹¹ Lebih luas lihat Birgitt Röttger-Rössler, Jan Slaby, *Affect in Relation: Families, Places, Technologies*, New York: Routledge, 2018

¹¹² Bagus atau buruknya suami dan anak merupakan cerminan dari istri dan ibu mereka.

¹¹³ Christina S Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Jogjakarta: LkiS, 2011, cet. III, h, 108

¹¹⁴ Walaupun kemudian perempuan juga ikut aktif di kancah politik, pergerakan seperti Supeni salah seorang perempuan Indonesia yang kemudian ikut mendirikan Persatuan Wanita Madiun usai Jepang kalah perang dilebur selanjutnya menjadi Perwari lewat putusan Kongres Perempuan Indonesia 1945 di Klaten. Lebih luas lihat Ahmadni G. Marta, Christianto Wibisono, dan Yozar Anwar, *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Yayasan Sumpah Pemuda, 1990. h. 207.

panjang, Bangsa Indonesia kemudian dikenal satu diantara 7 negara dari total 190 negara di dunia yang mampu membangun demokrasi dan kesetaraan hak politik.

Sejarah juga mencatat, dua bulan setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan, pada 22 Desember 1928, sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera berkumpul untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta. diantara agenda penting adalah meleburkan berbagai organisasi perempuan yang ada saat itu ke dalam sebuah federasi, tanpa SARA. Di era Demokrasi Terpimpin, peran sosial-politik perempuan cenderung terfragmentasi sebagai konsekuensi dinamika politik saat itu yang cenderung konfliktual. Kendati posisi politik perempuan saat itu relatif kuat, dalam praktik mereka tetap berada pada posisi subordinat dan kerap digunakan sebagai instrumen politik negara.

Di era Orde Baru, kendati pemerintah Soeharto memiliki *political will* membentuk kementerian yang khusus menangani masalah perempuan, akan tetapi orientasi politik negara korporatik yang menyuburkan pola politik *patron-client* dan kultur hegemoni “politik lelaki” tetap saja menjadi struktur atas dari bangunan budaya politik rezim ini. Perempuan diperbolehkan melakukan peran sosial-politiknya, akan tetapi sebatas fungsi normatifnya, di bawah kendali ketat negara korporatik. Memasuki era reformasi, para Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (terutama di era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa), secara gigih terus mengangkat isu kesetaraan gender sebagai mainstream. Namun, kerja keras para menteri perempuan, para aktivis, dan berbagai organisasi perempuan di Tanah Air untuk mewujudkan persamaan hak terus saja terbentur oleh kultur patriarki dan praktik politik anti partisipasi.

Salah satu penyebab penting yang mendasari, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Legitimasi (dan domi- nasi) ini terlihat dari sikap masyarakat yang kian menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas; alat pemuas hasrat seksual laki-laki. Dalam kekuasaan berstruktur patriarkis, politik bukan cuma refleksi dari interest kekuasaan dan uang, tapi juga seks. Terbongkarnya kasus mesum politisi DPR dengan artis dangdut beberapa waktu lalu membuktikan kebenaran hipotesis menyatunya “kekuasaan, uang, dan seks”.

Padahal hipotesa tersebut sangat bertolak belakang dengan persoalan hak-hak reproduksi merupakan kajian penting dan melibatkan banyak sub manusia dan kemanusiaan. Penting, karena perbedaan awal jenis kelamin laki-laki dan perempuan dilihat dari alat dan fungsi reproduksi. Penting, ketika pembahasan masalah hak-hak reproduksi, maka kajian yang muncul hanya pada bab-bab *anatomis* yang bersifat fisik *an sich*, tetapi juga pada realitas relasi antara laki-laki dan perempuan. Data awal ditemukan ketimpangan dalam hak-hak reproduksi yang berakar pada rendahnya status perempuan, rendahnya pendidikan, kemiskinan, buruknya nutrisi, kurangnya akses perawatan sesudah melahirkan, kurangnya akses ke alat kontrasepsi, hambatan sosial budaya dan agama, kualitas pelayanan kesehatan perempuan yang kurang memadai dan lain-lain yang menyebabkan kondisi perempuan menjadi tidak sehat dalam menjalankan peran reproduksinya. Hal tersebut juga ditegaskan Lies Macoes-Natsir dalam bukunya *menakar harga perempuan* bahwa upaya pemberdayaan perempuan tidak akan ada artinya tanpa memberdayakan kesehatan reproduksi¹¹⁵.

¹¹⁵ Lies Marcoes Natsir, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999, h.

Asumsi awal diketahui bahwa kendala paling dominan bagi perempuan dalam memperoleh pemberdayaan kesehatan reproduksi hak-hak reproduksinya adalah ajaran agama yang ada di masyarakat dibandingkan dengan aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sebab agama merupakan kajian sentral yang menduduki peringkat tertinggi dalam kehidupan masyarakat yang berpenduduk mayoritas Islam. Dalam satu ajaran Islam, terlepas dari otentisitas dan validitasnya, dinyatakan bahwa harga seorang perempuan adalah separoh dari harga laki-laki, baik fisik maupun haknya. Implikasi langsung dari ajaran ini adalah hak yang dimiliki oleh kaum perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki, dan sebaliknya, kewajiban yang dimilikinya malah lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Asumsi tersebut berdasarkan beberapa data awal yang ditemukan seperti: kuatnya dominasi pemahaman kitab *'Uqud al-Lujjain* karya Syaikh Nawawi Banten pada beberapa pesantren tradisional. Dalam kitab tersebut dijabarkan kuantifikasi-kualitatif hak-hak yang harus diperoleh laki-laki dan perempuan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Komposisi perbandingan antara hak yang harus diperoleh laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu. Kuantifikasi tersebut diperkuat oleh beberapa hadis pendukung yang masih perlu dipertanyakan validitas dan otentitasnya¹¹⁶. Fenomena lain adalah pertanyaan “siapa sebenarnya “pemilik” tubuh perempuan? Dalam beberapa tafsir dijelaskan yang dikutip dari Lies Marcoes Natsir bahwa seorang perempuan pada mulanya dianggap milik bapaknya atau seluruh garis keturunan dari bapaknya. Dalam perkawinan, wali seorang perempuan adalah ayahnya, kakak atau adik

¹¹⁶ Syafiq Hasyim, “Sebuah Pengantar” dalam *Jurnal Perempuan* Vol.2/ Maret 2003, h. 38

lelakinya atau lelaki lain yang segaris keturunan dengan bapaknya. Akhirnya, setelah berkeluarga kepemilikannya beralih dari ayahnya ke suaminya¹¹⁷. Artinya, kalau seorang isteri adalah individu yang berada di bawah tanggungjawab suaminya, berarti kontrol atas tubuh dan integritas seorang perempuan ada di tangan orang lain, yaitu suaminya. Pandangan-pandangan tersebut kemudian mengejawantah dalam berbagai aspek kehidupan.

Tafsir agama juga menerjemahkan perempuan sebagai ladang tempat laki-laki menumpahkan hasrat seksualnya untuk kemudian beranak-pinak. Bahkan karena begitu kuatnya hak suami terhadap sang istri, seorang suami “dibenarkan” melakukan pemukulan terhadap istrinya tatkala si istri menolak untuk diajak melakukan hubungan seks (QS. al-Nisa’: 34). Senada dengan hal tersebut, Sahal Mahfud menulis bahwa Dalam sebuah kitab yang populer di lingkungan pesantren Jawa disebutkan, seandainya seorang isteri menjadikan seluruh waktu malamnya untuk beribadah dan siangnya untuk berpuasa, sementara suaminya mengajak dia tidur bersama dan dia terlambat sebentar saja memenuhi panggilannya, maka kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama setan di neraka yang paling bawah. Tetapi yang perlu di sayangkan adalah bahwa kitab tersebut telah menjadi rujukan di kalangan agamawan, sehingga produksi makna yang tidak *empowering* terhadap perempuan sampai kini terus berlanjut. Ajaran di atas akhirnya menjadi sebuah rujukan yang “melegalkan” –secara budaya- dan sekaligus menjadi sebuah point bagi para lelaki untuk lebih menancapkan hegemoni seksualnya terhadap kaum perempuan. Yang terjadi kemudian, kaum perempuan sebagai obyek seksual bagi kaum laki-laki baik dalam lingkup

¹¹⁷ Lies Macroes-Natsir, h. 20

kehidupan rumah tangga yang sah maupun di luar lingkungan rumah tangga¹¹⁸.

Persoalan tentu tidak berhenti sampai di sini, tatkala si isteri harus mengandung, melahirkan, mengasuh dan menyusui sang anak, memasang alat kontrasepsi, haid dan segudang masalah lain yang berkaitan dengan hak-hak reproduksinya. Oleh karena itu, membicarakan masalah kesehatan reproduksi berarti memberi kewenangan dan hak kepada kaum perempuan untuk menentukan pilihan dan mengontrol tubuh, seksualitas dan alat/fungsi reproduksinya. Dalam situasi di mana perempuan masih merupakan subordinat laki-laki, maka tuntutan akan hak-hak tubuhnya sendiri banyak dikhawatirkan akan menyalahi tata aturan moral dan agama. Alih-alih, masalah kesehatan reproduksi perempuan menjadi sebuah aktifitas sekunder yang tidak masuk dalam jadwal kehidupan perempuan itu sendiri.

Dalam proses ini Islam memandangnya sebagai sebuah kegiatan yang harus dipersiapkan secara matang baik mental maupun fisik. Secara mental Islam mengingatkan bahwa bacaan *ta'awudz*, *basamalah* dan doa semisal “*Allahuma janibna Syaithon wa jaanibi syaithon* menjelang persetubuhan menjadi bagian pengingat bahwa apa yang dilakukan suatu yang halal dan dilakukan melalui komitmen dan kerjasama berdua. Secara fisik Islam tidak memperbolehkan hubungan seksual dilaksanakan dalam kondisi yang tidak mendukung, misalnya pada saat istri dalam keadaan haid, dalam keadaan sakit dan kelelahan¹¹⁹.

Contoh lain dari perspektif umat Islam Indonesia yang secara umum mengikuti madzhab hukum Syafi'iyah, yang mengartikan akad

¹¹⁸ Sahal Mahfud dalam *Menakar Harga Perempuan*”, Bandung: Mizan, 1999, h. 113

¹¹⁹ Rr. Rina Antasari, *Gender dalam Perspektif Agama*, Makalah dalam Pengkajian Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, 2007, h. 5

pernikahan sebagai akad pemilikan (*'aqd at-tamlik*) yaitu bahwa dengan menikah seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*budh'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan, dari pihak perempuan yang dinikahi. Dalam konsep pernikahan seperti ini pihak lelaki adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istrinya, sekaligus pemilik anak yang dihasilkannya. Oleh karena itu, kapanpun, di manapun dan bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung dari pihak suami dan istri tidak punya pilihan lain kecuali melayani.⁷

Pada bagian lain dijabarkan bahwa keseimbangan hak-hak reproduksi laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam beberapa konsep hukum keluarga (*al-ahwal al-syakshiah*) yang meliputi: memilih jodoh, menentukan perkawinan, menikmati hubungan seksual, menikmati standar kesehatan seksual dan reproduksi, memiliki keturunan, menentukan jarak kehamilan, menentukan tata cara mengatur reproduksi, mengasuh anak sampai menentukan perceraian¹²⁰. Dalam al-Qur'an bahkan disebutkan dengan jelas bahwa fungsi reproduksi umat manusia yang utama, meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak, merupakan fungsi kemanusiaan yang sangat berat, sehingga diapresiasi demikian mendalam dalam surat al-Ahqaf, ayat 15. Dalam Surat Luqman, ayat 14 disebutkan bahwa beban berat reproduksi dilukiskan sebagai *wahn* *'ala wahnin* yaitu beban berat yang berlipat yang membuatnya menjadi ringkih di atas ringkih.

⁷Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997).hlm.105

¹²⁰Nasaruddin Umar, "Teologi Reproduksi", dalam Sri Suhandjati Syukri (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Jogjakarta: Gama Media, 2002, hh. 25-29

B. Perkembangan

Dalam berbagai hasil studi diketahui bahwa perempuan Indonesia lebih banyak bekerja di sektor domestik rumah tangga. Perempuan yang bekerja di ranah publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga, walaupun perjuangan emansipasi yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki, namun tetap saja perempuan yang bekerja di ranah publik masih pada posisi yang kurang menguntungkan, perempuan lebih cenderung terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan jabatan, disamping sering dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan-pekerjaan penting.

Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktivitas rumah tangga. Bahkan adSharon Bessel dalam tulisannya menyebut bahwa peran aktif perempuan Indonesia dalam politik juga terekam jelas pada periode perjuangan kemerdekaan dari Belanda tahun 1930-an hingga 1940-an¹²¹. Rekam jejak dalam kesetaraan hak berpolitik antara kaum pria dan perempuan juga terus berlanjut setelah Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Perempuan telah mendapatkan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sejak tahun 1945. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 memiliki semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan, di mana negara menjamin hak perempuan agar bisa berkiprah di semua bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan politik¹²².

Dalam kajian patriarki, Sylvia dalam bukunya *Theorising*

¹²¹ Sharon Bessel, "Women in Parliament in Indonesia: Denied a Share Of Power, Discussion Papers on policy and governance", Asia Pasific School of Economic and Government, Australian National University (ANU), sebagaimana dimuat dalam www.crawford

¹²² Sharyn Graham Davies dan Nurul Ilmi Idris, "Participating in Parliamentary Politics: Experiences of Indonesian Women 1995–2010", diakses dari *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, 2010, h. 81-97

Patriarchy, menyebut patriarki sebagai suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas dan mengisap perempuan. Dalam sistem ini melekat ideologi yang menyatakan laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan perempuan harus dikontrol oleh laki-laki, dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki. Pengertian patriarki berarti dominasi laki-laki. Namun, apabila diresapi lebih lanjut ternyata terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam meninjau patriarki, titik berat pandangan lebih kepada persoalan hirarki dalam semua sektor kehidupan. Sementara dominasi laki-laki (*male dominance*) lebih mengacu kepada persinggungan dan hubungan antar laki-laki dan perempuan yang terpengaruh oleh emosi.

Pemahaman ini memang bias dan mengetengahkan ketidakberimbangannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Patriarki lebih merambah kepada kondisi-kondisi yang hirarki, sementara dominasi laki-laki lebih merambah hubungan spesifik antara laki-laki dan perempuan. Mengikuti Goldhaber dalam teorinya bahwa patriarki adalah salah satu bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, hubungan politik yang dilandasi oleh ketidakberdayaan perempuan menunjukkan adanya permasalahan tersendiri yang ditimbulkan patriarki¹²³. Definisi gender yang diwacanakan konsep *nurture*, ternyata memisahkan antara aspek biologis dan sosial. Padahal, ada pula aspek biologis yang bersifat kodrati yang turut mempengaruhi konstruk sosial dalam membedakan peran dan kebiasaan antara laki-laki dan perempuan^{124, 54} Selain itu, pada kenyataannya

¹²³ Gerald M. Goldhaber, *Organizational Communication*. WCB Publisher, Dubuque, Iowa, Fifth Edition. 1990. hlm. 91.

¹²⁴ Sebagai contoh aspek biologis yang bersifat kodrati yang turut mempengaruhi konstruk sosial. Dalam tubuh manusia terdapat hormon *estrogen* yang mempengaruhi perbedaan struktur tubuh laki-laki dan perempuan, hormon ini menstimulus hormon *prolactin* agar berproses bersama hormon-hormon lain untuk memproduksi ASI dalam

Secara umum Keterwakilan perempuan dalam politik melalui pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking* dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian¹²⁵.

Argumen tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, argumen tersebut juga menunjukkan perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak di keluarkannya Undang Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (*affirmative action*) bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat nasional maupun lokal. Keterwakilan

kelenjar susu (*mammary glands*), kerja hormonal ini turut mempengaruhi bentuk fisik dan kondisi psikis ibu. Karena hal ini bersifat umum akhirnya timbullah konstruk sosial yang melazimkan seorang ibu menyusui anaknya. Proses serupa juga terjadi pada hewan-hewan mamalia. lihat “estrogen,” “prolactin,” dan “mammary gland” dalam Theodore Pappas et al., *Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite* (Ed. 16; Encyclopaedia Britannica, Inc., 2012) [DVD],

¹²⁵ Lihat Muhammad Zamroni, Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender, *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013, h. 103

perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%.

Munculnya keputusan Negara Republik Indonesia mengenai perpolitikan diNegeri ini, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2008 dengan di undang-undangkannya Lembaran Negara No.2 tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemilu yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik formal yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor10 tahun 2008 pada Pasal 8 Ayat (1) Butir (d).

Menurut Tari Siwi Utami, upaya maksimal pemberdayaan perempuan semacam itu menunjukkan adanya *political will* dari pemerintah yang apresiatif terhadap perkembangan pengarus-utamaan gender dalam pergulatan politik nasional. Hal ini bisa dilihat sebagai perkembangan yang cukup menggembirakan bagi aktivis perempuan yang *concern* terhadap pengarusutamaan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa selama Orde Baru pemberdayaan perempuan ini diwarnai dengan pembisuan dan kooptasi organisasi-organisasi perempuan serta seluruh organisasi independen lainnya. Bercokolnya lembaga Dharma Wanita atau PKK yang mengkoordinir karya perempuan pada masa orde baru menjadi saksi adanya kooptasi rezim orde baru dalam melanggengkan domestifikasi perempuan¹²⁶.

Ada masalah yang sangat strategis untuk dikaji lebih jauh, yaitu mengenai peran perempuan dalam komunikasi politik beserta segala

¹²⁶ Trisakti Handayani & Sugiarti.. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. 2002, h. 13.

kendala dan faktor pendukung keterlibatan mereka. Hal ini sangat penting diteliti karena dalam perspektif politik modern, logika-nya, agenda yang kongkrit untuk memajukan peran dan harkat perempuan Indonesia sudah selayaknya dijadikan salah satu tawaran utama oleh partai politik yang ingin melapangkan jalannya ke gedung parlemen. Hal ini didasari oleh fenomena bahwa 57% perolehan suara ditentukan oleh suara perempuan. Alasan lain apakah terjadi perluasan cakupan politik ke arah masalah-masalah yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan dan sebagainya. Bahkan setengah total jumlah penduduk di Indonesia adalah perempuan, maka mengabaikan perempuan Indonesia dalam pembuatan keputusan politik sama artinya dengan meminggirkan mayoritas penduduk Indonesia dari proses politik¹²⁷

Realita di lapangan memperlihatkan perkembangan yang turun naik menuju idealitas. Tingkat partisipasi perempuan di politik praktis berdasarkan laporan Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Data UNDP 2010 pada kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dideksripsikan sebagaimana dalam tabel berikut:

¹²⁷ Soetjipto AW. "Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik". Dalam Smita Notosusanto dan Purwandari EK (Peny). *Perempuan Pemberdayaan*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI. 1997, h. 3. Sebagai perbandingan lihat Mosse, J. Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995, h. 10; ⁹ Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996, h. 10.

TABEL 3.1
KEADAAN PARTISIPASI PEREMPUAN YANG DUDUK DI DPR
DALAM PEMILU

No	TAHUN	Jumlah Perempuan	Total Anggota	Proporsi (%)
1	1955		-	5.90
2	1971	33	460	7.17
3	1977	34	460	7.39
4	1982	38	460	8.26
5	1987	57	500	11.40
6	1992	61	500	12.20
7	1997	57	500	11.40
8	1999	40	500	8.00
9	2004	62	550	11.20
10	2009	104	560	18.60
11	2014	97	575	17.32
12	2019	117	575	20.52

Sumber: Berbagai data, diolah kembali 2020.

Berdasarkan Peta parlemen dengan karakteristik gender seperti tersebut dalam tabel meletakkan Indonesia di kluster negara dengan peringkat 82 untuk hal rasio perempuan di parlemen. Indonesia satu tingkat lebih tinggi daripada Amerika Serikat (18,3%), di mana jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen adalah 79 orang dari total 432 kursi¹²⁸. Berbagai aturan untuk meningkatkan jumlah perempuan di Parlemen belum bisa mencapai target, seperti termaktub dalam Pasal 65 UU No.12 tahun

¹²⁸ Sumber: IPU: Global Parliamentary Report-Data

2003 tentang Pemilihan Umum, Pasal 53 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, *“Daftar bakal calon ... memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.”* Sejalan dengan perkembangan peta politik di Indonesia, politik identitas juga menjadi bagian yang tidak bisa dinapikan.

Pemilu Presiden 2019 yang diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura. Sementara, pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dicalonkan oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Dua calon ini pernah bertarung pada pemilu presiden tahun 2014 lalu dengan selisih perolehan suara sebesar 6,3%. Saat itu, Joko Widodo mendapatkan suara sebesar 53,15%, dan Prabowo Subianto mendapatkan 46.85% suara. Dari 34 provinsi, pasangan Joko Widodo – M. Jusuf Kalla mengalami kekalahan di 10 provinsi yakni: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara¹²⁹.

Perkembangan politik identitas muncul pasca kontestasi pemilihan Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terutama pasca terjadinya gerakan massa aksi 212. Termasuk dalam hal tersebut tantangan terberat representasi perempuan di politik politisasi identitas atas nama agama dan moralitas. RUU PKS sebagai salah satu yang sedang diperjuangkan

¹²⁹ Menariknya pada Pemilu 2019 selain karena diikuti oleh kandidat yang telah bertarung pada pemilu sebelumnya, juga dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Untuk kali pertamanya dalam sejarah pemilu di Indonesia, akan digelar pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada hari yang sama. Pemilu 2019 nanti dikenal juga dengan sebutan “Pemilu Lima Kotak” karena pada saat yang sama dilakukan pemilihan presiden, pemilihan DPR-RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota dan pemilihan DPD. Dari sisi kontestasi, nuansa kompetisi pasangan calon diperkirakan akan kuat karena adanya pengaruh antara politik lokal di pilkada serentak 2018 dengan preferensi politik publik di tingkat nasional.

seringkali dicap sebagai pro-zina, pro-LGBT, dan liberal. Akibatnya politisasi identitas yang semakin mengeras, isu-isu yang terkait dengan perlindungan perempuan selalu dipertentangkan dengan agama. Politisasi identitas ini menghadapkan perempuan dengan sesama perempuan, dan pada akhirnya menghambat perjuangan demokrasi dan kesetaraan¹³⁰.

Konteks politik dan keragaman masyarakat di tingkat lokal yang berbeda-beda membuat gejala dan kecenderungan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta tak sepenuhnya bisa menjelaskan kondisi politik di daerah lainnya. Duplikasi model kampanye di Pilkada DKI Jakarta juga tak sepenuhnya bisa dilakukan di daerah lain. Dalam Pilkada Serentak 2018 lalu, Fernandes (2018) menunjukkan bahwa isu mengenai dinasti politik dan kinerja petahana sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat pada level provinsi dibandingkan isu politik identitas. Di beberapa daerah, sejumlah calon yang memiliki afiliasi dengan dinasti politik mengalami kekalahan, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Sejumlah petahana juga mengalami kekalahan seperti di Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku. Isu politik identitas relatif tidak menjadi isu sentral di setiap daerah, kecuali pada batas-batas tertentu di Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Papua seperti temuan CSIS (2018)⁴ dan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (2018)⁵. Dalam penelitian CSIS (2018), isu perbuatan *musyrik* yang dialamatkan pada salah seorang calon mempengaruhi penurunan suara pasangan tersebut dalam pilkada.

Di ranah politik perempuan berdasarkan hasil studi Iim Halimatusa'diyah yang mengutip dari Rosabeth Kanter bahwa ketika jumlah perempuan dalam sebuah organisasi kurang dari 15%, ada kecenderungan

¹³⁰Diakses dari “Diskusi Keterwakilan Perempuan dalam Agenda Politik Pasca Pemilu 2019”, <http://cakrawikara.id/>

mereka akan menghindari penanganan isu gender. Akan tetapi, ketika keterwakilan perempuan lebih dari 15%, besar kemungkinannya bagi mereka untuk membentuk aliansi dan memprioritaskan isu gender dalam agenda kerja. Perbandingan yang dinilai dari negara Jerman dimana keterwakilan perempuan di parlemen yang lebih dari 30% memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pembuatan kebijakan¹³¹.

Perempuan tidak berada di posisi strategis sebagai penentu kebijakan dalam parlemen. Hasil studi yang dilakukan Puskapol UI menunjukkan bahwa sekitar 40% anggota parlemen perempuan tidak pernah terlibat dalam penyusunan anggaran. Wajar bila sangat sulit bagi perempuan dapat terlibat dalam penentuan anggaran yang pro-perempuan dan anak. Ketidakterlibatan ini tidak selalu terkait dengan kualitas anggota perempuan, tapi karena kuatnya budaya patriarki. Konstruksi hubungan kekerabatan atau kekuasaan rujukan (*reference power*) dengan elit politik, atau mereka yang sukses karena modal finansial dan popularitas semata berpengaruh terhadap rendahnya dampak keterwakilan perempuan bagi perbaikan kebijakan sosial terutama yang terkait dengan kesejahteraan perempuan dan anak¹³².

Data yang juga hampir sama menjelaskan bahwa pentingnya Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. realitanya perkembangan yang diisyaratkan secara normatif berbanding terbalik dalam 2 kondisi yaitu: *Pertama*, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat

¹³¹ Im Halimatusa'diyah, "Semakin banyak perempuan di DPR, tapi riset ungkap kehadiran mereka mungkin tidak signifikan", diakses dari *theconversation.com*, tanggal 13 Juli 2020

¹³² Im Halimatusa'diyah, "Semakin banyak perempuan di DPR, tapi riset ungkap kehadiran mereka mungkin tidak signifikan"

Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik; *Kedua*, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi partai politik (parpol). Pada umumnya, parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi *vote getter* dan menaikkan elektabilitas¹³³.

Dari berbagai perspektif tersebut menunjukkan perkembangan politik perempuan dalam panggung politik baik nasional maupun lokal lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah. Upaya keterlibatan *Civil Society Organization* atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah penting dalam mendorong agenda politik perempuan. Salah satu agenda dalam upaya menguatkan dengan mengangkat sekat antara politik elektoral¹³⁴ dan non-elektoral¹³⁵. Gerakan perempuan diarahkan untuk lebih maju di politik non-elektoral atau ranah aktivisme. Pertentangan politisasi identitas yang memiliki keterkaitan erat dengan isu perempuan dihadapkan dengan

¹³³Siti Nurul Hidayah, "Keterwakilan Perempuan di Ranah Politik", *news.detik.com*.

¹³⁴Istilah elektoral (electoral) sering dikaitkan dengan politik pemerintahan. Pengertian elektoral adalah pemilihan atau yang berkaitan dengan pemilihan. Elektoral dalam demokrasi dapat diartikan sebagai pemilihan umum (pemilu) yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memilih wakilnya di parlemen dan kepala pemerintahan. Lihat Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept Of Representation*, Berkeley: University Of California, 1972, h. 38

¹³⁵Partisipasi politik non elektoral tidak dilihat dari keikutsertaan dalam pemilu melainkan sebuah tindakan yang berkaitan dengan kontroversi politik (*Contentious Politik*) seperti gerakan sosial boikot. Fenichel Pitkin, *The Concept Of Representation*, h. 39

perempuan lain sebagai instrumentalisasi perempuan untuk menghambat laju gerakan laki-laki dan perempuan di Indonesia.

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Oleh karena, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam segi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah pun juga tidak tinggal diam di dalam melakukan pencapaian hasil dari kesetaraan gender.

Keterlibatan dan kesadaran atas hak sipil dan politik perempuan dikaji dalam 3 faktor hambatan dalam memberikan pengembangan yaitu: *Pertama*, Faktor Sumber daya Perempuan. Secara umum perempuan belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena politik. Hal tersebut tidak lepas dari pendidikan stereotype sejak kecil yang didominasi lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga, alih alih *Gender Equality and Justice* belum bisa tercapai; *kedua*, Nilai-nilai Sosial Budaya dalam citra baku patriarki yang “menempatkan” laki-laki di posisi pemimpin, penentu

dan pengambil keputusan dengan kedudukan “superior”, sehingga perempuan menjadi warga negara kelas 2, didiskriminasikan dan dimarginalkan ditambah sistem politik Indonesia yang maskulinitas dengan menyampingkan berbagai variabel kebijakannya

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dilakukan yaitu 1) memperkuat peran partisipasi perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran partai politik.. Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan sistem ini masih belum dapat dilaksanakan; 2) secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmative action* sebagaimana di Argentina yang memberikan kuota 30%, Brazil 20%, India 33% kepada perempuan¹³⁶. Upaya mengembangkan politik perempuan dengan menyelesaikan hambatan seperti 1) pengaruh dan masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan; dan 2) kendala-kendala kelembagaan (*institusional*) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar diberbagai kelembagaan sosial dan politik. Beberapa perbedaan pandangan antara laki laki perempuan yang menjadi kontruksi di masyarakat

¹³⁶Soetjipto A.W. 2011, *Politik Harapan (Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi)*, Tangerang: PT Wahana Aksi Kritika. h.20

TABEL 3.2
PERBEDAAN KONSTRUKSI LAKI LAKI PEREMPUAN DALAM
BUDAYA¹³⁷

Status	Kondisi Fisik	Sifat	Pemikiran
Perempuan	Cantik	Penuh Kasih Sayang	Imaginatif
	Seksi	Penuh Rasa Simpati	Berdasarkan intuisi
	Menawan	Lembut	Artisitik
	Bersuara Lembut	Sensitif	Kemampuan Berbicara
	Manis	Sentimentil	Kreatif
	Kecil Mungil	Mudah Bersosialisasi	Penuh Rasa Cinta
Laki Laki	Atletis	Selalu Ingin Bersaing	Analisis
	Besar dan Tegap	Kurang Sensitif	Hebat dalam Urusan Angka
	Berotot	Mendominasi	Abstrak (tidak artistik)
	Tinggi	Petualang	Pintar Dalam Memecahkan Masalah secara logika (analitis)
	Bersuara	Agresif	Pintar Memberi Alasan

¹³⁷ Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender Dan Feminisme, Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garuda Wacana, 2016; Sebagai perbandingan lihat Heri Junaidi, “Kesetaraan Dan Keadilan Gender: Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Pesisir Laut Sungang Kabupaten Banyuasin II Sumatera Selatan, Palembang: P3RF, 2019.

	Tinggi		
	Kuat	Berani	Tidak berdasarkan intuisi

C. Budaya dan dinamika Peran Politik Era Kontemporer

Secara maknawi, budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu *budhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* dengan arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata *culture* yang berasal dari bahasa latin yaitu *colore* yang berarti mengolah atau mengerjakan¹³⁸. Sehingga budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Seperti dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa budaya sangat berperan dalam membentuk perbedaan antara laki laki dan perempuan dalam konstruksi sosial.

Di Indonesia, secara absolut, jumlah perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Meskipun demikian, perempuan bukanlah berarti beban pembangunan, melainkan justru merupakan potensi pembangunan. Caranya sudah tentu tidak dengan membiarkan perempuan tetap terpuruk dalam kubangan kemiskinan dan kelemahannya, tetapi sesegera mungkin harus dilakukan upaya pemberdayaan agar perempuan dapat duduk sejajar dengan laki-laki mengisi pembangunan. Relasi kuasa menjadi hambatan utama pada kelompok kelompok (perempuan) yang sudah pernah mengikuti berbagai sosialisasi gender untuk membangun apa yang harapan dalam sosialisasi. Status laki laki yang tetap ingin dalam posisi “memerintah” dan status perempuan dalam posisi “menerima

¹³⁸ Abu Bakar M. Luddin, *Konseling: Teori dan Praktek*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010, h. 102

perintah” merupakan data awal yang ditemukan. Alih alih kekerasan dalam rumah tangga misalnya menjadi jawaban atas gugatan relasi budaya yang telah kokoh terbangun. disamping berbagai faktor lain yang mengikuti. Seperti faktor ekonomi, faktor “takut dan malu”.

Kecenderungan laki-laki diorientasikan kebidang publik dan perempuan kebidang domestik telah memproduksi ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin¹³⁹. Perempuan lebih dipandang bertanggung jawab terhadap keluarga dan segala kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti pengasuhan anak. Laki-laki terlibat langsung dalam bidang ekonomi dan politik (sebagai kegiatan publik) yang dianggap sebagai institusi utama dalam masyarakat modern¹⁴⁰. Dalam proses sosialisasi perempuan cenderung dihubungkan dengan kegiatan domestik tersebut, yang dianggap sebagai kegiatan yang “kurang” penting dalam perkembangan masyarakat modern yang bertumpu pada proses produksi dan birokrasi. Asosiasi semacam ini telah mereproduksi ketimpangan gender yang terus menerus, karena dalam proses sosialisasi perempuan disosialisasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran sosial budaya yang kemudian pilihan-pilihannya ditentukan oleh laki-laki atau dalam kerangka struktural yang patriarkal.

Partisipasi politik perempuan dalam politik lokal secara tekstual sudah dinyatakan dijamin oleh berbagai peraturan. Rumusan partisipasi politik perempuan yang tidak tertera dalam peraturan daerah tidak serta merta berarti bahwa perempuan tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam politik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Women Research*

¹³⁹ Rae Lesser Blumberg, *Gender, Family and Economy: The Triple Overlap*, London: Sage Publication, 2010, h. 11

¹⁴⁰ Janet Saltzman Chafez, “The Gender Division of Labor and The Reproduction of Disadvantage: Toward an Integrated Theory,” dalam Rae Lesser Blumberg (ed), *Gender Family and Economy* (London : Sage Publications, 2009), h.75

Institute (WRI) berkaitan dengan kebijakan di berbagai daerah yang mendukung keterwakilan di Parlemen daerah dan pengambilan keputusan dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh walikota perempuan pertama di Jawa Barat memiliki pejabat struktural perempuan, namun realitanya pemerintahan diseleggarakan bias gender. Salah satu indikator angka kematian yang tinggi di wilayah tersebut tidak menjadi prioritas pemerintah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 14 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi merepresentasikan perempuan sebagai yang berwenang di ranah domestik dan peran publik yang diberikan pada perempuan adalah pada sektor kesejahteraan sosial. Ini artinya Peraturan Daerah tersebut menempatkan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Peran publik perempuan dinyatakan sebatas keterlibatan dalam organisasi sosial atau organisasi perempuan. Masalah Pemberdayaan Perempuan adalah usaha untuk mendukung perempuan meningkatkan usaha keluarga, untuk menjadi pemimpin di bidang Kesejahteraan Sosial adalah merupakan rumusan peran serta perempuan dalam pembangunan. Dalam beberapa Surat Keputusan diletakkan peran perempuan seksi konsumsi¹⁴¹

Kedua, Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan Tasikmalaya dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa kepentingan perempuan menjadi bagian yang terpisah dari keseluruhan aktivitas politik lokal dan direpresentasikan oleh satu seksi,

¹⁴¹ Surat Keputusan (S.K.) Walikota Sukabumi No. 133 Tahun 2001 tentang Susunan Personalia Pelaksana Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2001. Panitia yang ditunjuk Walikota dalam S.K. itu terdiri dari 90% laki-laki dan 10% perempuan. Di dalam S.K. itu, perempuan ditempatkan sebagai Seksi Konsumsi

yakni Seksi Pemberdayaan Perempuan. Meskipun tidak ada larangan tertulis bagi perempuan untuk aktif terlibat dalam struktur politik lokal, namun ketika ada lima Camat perempuan yang terpilih, terjadi polemik tentang pengangkatan mereka yang oleh anggota DPRD dianggap tidak sesuai dengan visi Islami Kabupaten ini. Hal ini merupakan perwujudan dari ideologi patriarkis yang dibentuk oleh budaya serta interpretasi agama. Sehingga ketika keputusan publik untuk memberi kesempatan kepada perempuan berpartisipasi dalam ranah publik sebagai pemimpin ditingkat lokal maka dalam tataran pelaksanaan dihambat oleh interpretasi dari pemahaman keagamaan¹⁴².

Ketiga, Pada Kabupaten Gianyar dengan Peraturan Daerah dijelaskan arah pembangunan kabupaten ini wajib; mengidentifikasi isu-isu gender untuk dijadikan arah dasar rencana dan pelaksanaan pembangunan, Meningkatkan pemahaman konsep gender melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, Memasukkan konsep gender ke dalam kurikulum muatan lokal, dari SD hingga perguruan tinggi, Mendorong partisipasi dan meningkatkan promosi perempuan dalam jabatan-jabatan formal berdasarkan kemampuan intelektualnya. Akan tetapi intensi yang muncul dalam Perda tersebut tidak konsisten dengan Renstra Kabupaten Gianyar. Seperti Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian *Perbekel* (Lurah). Dalam Perda itu, secara khusus dalam Pasal 6 diungkap tentang persyaratan calon *perbekel*, yaitu “*Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak*

¹⁴²Baca “Diprotes Pengangkatan 5 Camat Wanita di Tasik” dan “Jadi Polemik diangkatnya 5 Wanita: Bupati Tasik dituduh Melecehkan Dewan” dalam *Harian Priangan*, 23 dan 25/8/2001

terputus-putus, kecuali putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.”

Penggunaan kata *putra* mengandung pengertian laki-laki, hal itu menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki peluang untuk duduk sebagai kandidat *perbikel*. Interpretasi atas Perda itu akan menjadi lain, jika menggunakan kata “warga desa.” Fakta itu diperkuat oleh Peraturan Daerah tentang Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa. Dalam pasal 9 pada Perda itu dimuat tentang persyaratan menjadi kelian Banjar dinas, yaitu “*Terdaftar sebagai penduduk anggota banjar dan bertempat tinggal tetap di banjar bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra banjar yang berada di luar desa yang bersangkutan.*”

Keempat, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sejak tahun 2001 menjadi wilayah otonomi khusus dan karenanya berhak menyelenggarakan pemerintahannya dengan kekhasan tertentu. Jika pada daerah yang lain, otonomi bertumpu pada Kabupaten/Kota, maka di NAD otonomi bertumpu pada propinsi yang menghasilkan peraturan-peraturan yang menjadi acuan penetapan peraturan dan pelaksanaannya di Kabupaten/Kota. Karena itu, Perda Propinsi NAD-lah yang dalam penelitian ini digunakan sebagai pembahasan. Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi NAD 2001-2005 yang merupakan Qanun No. 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa salah satu Arah Kebijakan dalam bidang Sosial Budaya, butir n berisi “*mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan di dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, keluarga dan masyarakat.*” Dalam bidang politik propinsi arah kebijakan yang tercantum dalam Perda yang sama adalah “*Memasyarakatkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip*

persamaan antar laki-laki dan perempuan serta dan anti diskriminasi dalam berbangsa dan bernegara.” Sementara salah satu Arah Kebijakan Agama propinsi adalah *“Menyiapkan sumber daya perempuan yang ahli dalam bidang agama.”* Sebagai ilustrasi, menurut data *Banda Aceh dalam Angka* tahun 2001, tidak ada perempuan yang duduk memangku jabatan di DPRD Kota Banda Aceh. Ketiga Arah Kebijakan ini tampak memberi kemungkinan ruang yang lebih terbuka bagi perempuan untuk melakukan aktivitas di ruang publik, walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit pentingnya menghapus diskriminasi yang menghambat akses perempuan untuk memegang jabatan dalam struktur politik formal.

Kelima, Kabupaten Mataram Nusa Tenggara Barat, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan dijamin oleh Peraturan Daerah Nomor. 27 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 3 tentang musyawarah pembangunan bermitra masyarakat, yaitu: Musyawarah pembangunan bermitra masyarakat adalah suatu pola musyawarah dalam pengelolaan pembangunan dengan menemukan masalah, penyebab dan potensi untuk penanganannya dengan prinsip dasar partisipatif, transparan, akuntabilitas, responsif yang bermitra masyarakat yang dilaksanakan mulai lingkungan/RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kota yang harus melibatkan Toma, Toga, pemuda, petani, buruh, nelayan, LSM, Parpol, ormas Secara implisit, cuplikan di atas dapat diinterpretasikan bahwa perempuanpun memiliki ruang untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pengambilan kebijakan. Realitas menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam politik dan kebijakan publik di tingkat lokal di kota Mataram masih rendah, dimana anggota DPRD yang perempuan hanya 3 orang sementara jumlah anggota dewan yang laki-laki 32 orang.

Berbagai contoh tersebut memperlihatkan proses sosialisasi tersebut berimplikasi pada pembatasan pilihan hidup perempuan. Sesuatu yang berada di luar dapur, anak, rumah tangga, dianggap bukan sebagai tempat yang sesuai bagi mereka. Keluarga, sekolah, bacaan, dan televisi telah menjadi sumber pengetahuan tentang bagaimana menjadi perempuan yang ideal, yang sesuai dengan tatanan sosial. Proses internalisasi terus mengakar dalam institusi tersebut dan menjadi dasar dari gambaran keterlibatan perempuan dalam berbagai proses sosial di mana laki-laki tetap diutamakan. Proses semacam ini merupakan konstruksi yang secara terus menerus menegaskan suatu realitas objektif yang memiliki daya paksa dalam konstruksi sosial gender¹⁴³.

Nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga dan institusi lain dapat berarti sesuatu yang memang dihasilkan oleh keluarga itu sendiri dan pada saat yang sama juga merupakan artikulasi dari nilai dan norma yang berlaku secara sosial. Perbedaan domestik dan publik ditentukan oleh proses pemaknaan yang bersumber dari dunia makna (*univers of meaning*) yang merupakan pedoman kehidupan¹⁴⁴. Pengaruh akar sosial budaya dalam mengasosiasikan perempuan sebagai kelompok orang yang memiliki ciri tertentu telah memberi warna dalam keterlibatan ekonomi perempuan. Pemaknaan keterlibatan ekonomi perempuan ditentukan oleh sistem ideologi yang memberi kemungkinan dan batas dalam etos kerja dan kemudian membentuk etika kehidupan yang bersifat evaluatif.

Proses sosialisasi perempuan menyebabkan terjadinya proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai dengan sifat

¹⁴³ Lebih luas lihat Peter Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Penguin Books, 2000

¹⁴⁴ Peter Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York: Penguin Books, 2000, h. 50

perempuan. Dapat dilihat kecenderungan bahwa perempuan terlibat dalam sektor-sektor yang sudah bersifat “menerima perintah”, seperti sekretaris, resepsionis, waiterss, atau pembantu rumah tangga¹⁴⁵. sementara laki laki teraktualisasi sebagai orang “memberi perintah”¹⁴⁶. Alih alih Perempuan sebagai penerima perintah, di dalam suatu struktur kekuasaan, berada pada posisi yang lemah dan terlibat secara mendalam dengan hubungan-hubungan personal yang mempengaruhi ukuran-ukuran kedudukan dan kesempatan. Marginalisasi tersebut seperti diungkapkan velzen sebagai *a proses by which power relations between womwn and men change in such a way that women are increasingly cut off from having accses to vital resource, wich become monopolised by men*¹⁴⁷, yaitu sebuah proses dimana relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki berubah sedemikian rupa sehingga perempuan semakin terputus dari akses terhadap sumberdaya vital yang dimonopoli oleh laki-laki.

Pada saat pekerjaan yang diambil perempuan itu dapat dikatakan sebagai pekerjaan marginal, maka AcEwen Scolt menilai proses marginalisasi itu merupakan proses yang dimulai dalam keluarga, di sekolah, dalam bacaan, televisi, dan dikuatkan secara sah oleh nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan etika-etika kehidupan yang tersusun dengan kokoh sejalan dengan proses pembentukan identitas masyarakat, yang dipengaruhi oleh pertemuan masyarakat tersebut dengan berbagai sistem ideologi. Subordinasi perempuan karena itu merupakan pilihan-pilihan yang

¹⁴⁵ Lebih luas lihat Rosabeth Moss Kanter, *Men and Women of The Corporation* New York: Basic Books, 2005

¹⁴⁶ Lebih luas lihat Rendall Collins, “Women and Men in the class Stucture,” dalam R.I. Blumberg (ed), *Gender, Family and Economy:The Triple Overlape* London: Sage Publication, tt.

¹⁴⁷ Anita van Velzev, “*Who’s the Boss?: Marginalisation and power in Food-Processing Household Enterprises, West Java, Indonesia*” , *Desertasi Doktor*, University of Amsterdam, 1994 h. 139

dilakukan oleh perempuan sendiri, sebagai hasil dari interaksi dan negosiasi antara kepentingan-kepentingan perempuan dan kepentingan umum dalam suatu masyarakat.

Gerakan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari proses membangun sadar politik perempuan bukan juga bermaksud menciptakan perempuan yang lebih unggul dibandingkan dengan kaum laki-laki, melainkan merupakan upaya pemenuhan hak perempuan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan memengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan nonmaterial yang penting. Pendek kata, pemberdayaan tidak menekankan pada pentingnya meningkatkan status perempuan secara relatif terhadap laki-laki, tetapi berupaya memberikan kekuasaan pada perempuan melalui pendistribusian kembali kekuasaan di dalam dan di antara mereka.

Sejalan dengan waktu hingga era kontemporer memperlihatkan suatu premis bahwa perjuangan politik perempuan Indonesia untuk mendapatkan kesetaraan yang sama dengan laki-laki sebagaimana yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan terutama amanat perundang-undangan¹⁴⁸. Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires tentang Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan pada Desember 2017 silam, keterlibatan Indonesia kembali diupayakan terutama dalam konteks penjaminan Hak Asasi Manusia ditengah belum ada sinkronisasi antara gerakan politik perempuan ekstra parlementarian dengan politik perempuan parlementarian. Hal ini dikarenakan adanya persoalan kultur representasi yang berbeda antara gerakan politik perempuan formal dengan informal. gerakan politik informal

¹⁴⁸ Lebih Luas lihat Asima Yanti Siahaan, "Decentralisation in Indonesia: Bringing Governance to Women." Paper Presented at DevNet Conference, Massey University, New Zealand, 2002

perempuan lebih mengarah pada pola representasi substantif karena mereka secara nyata bertindak atas (acts for) atas isu perempuan yang diwakilinya.

Pasca Indonesia turut serta di dalam kesepakatan *World Trade Organization* bertajuk Deklarasi Bersama Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (*Joint Declaration on Trade and Women's Economic Empowerment*) di Buenos Aires pada Desember 2017 tersebut menuai beberapa pandangan salah satu indikator gambaran proporsi demografis terkait gender di Indonesia berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2010-2035, pada 2015 rasio jenis kelamin penduduk Indonesia adalah sebesar 101, artinya dari seratus penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki di Indonesia. dan memperlihatkan bahwa bRasio jenis kelamin ini akan mencapai 100,17 pada 2035, artinya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan mencapai jumlah yang hampir sama.

Realitas yang berbeda menunjukkan bahwa tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berdasarkan hasil tilikan Satuan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2014 adalah sebesar 50,22 persen, terpaut sekitar 27 persen dengan TPAK laki-laki yang bernilai 83,05 persen. Angka TPAK ini menunjukkan bahwa dari 100 perempuan usia 15 tahun ke atas, hanya 50 orang yang tersedia untuk berpartisipasi di pasar kerja¹⁴⁹. Konstruksi sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah karena berbagai problem politik ekonomi menjadikan Indonesia menjadi objek industri manufaktur dan pertanian pangan (beras), dan kemudian sejak 2000an Indonesia menjadi objek bagi industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan sawit). Kebijakan eksploitasi waktu dan tenaga bagi buruh

¹⁴⁹Indra Kusuma Wardana, Rusdi J. Abbas, Indonesia Di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017 (*Indonesia at a Crossroads: The Urgency of “Gender Equality and Justice Act” in Indonesia After Buenos Aires Joint Declaration in 2017*), *Jurnal HAM*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2018, h. 154

perempuan yang memperlihatkan pemisahan yang terbangun dari berbagai sisi dan aspek¹⁵⁰. Banyak anak perempuan yang meninggal, kurang gizi, busung lapar, serta tingkat pendidikan dan kemampuan baca tulis yang buruk, akses terhadap kredit, keterampilan, secara produksi lain terbatas dibanding laki-laki. Rendahnya dukungan dalam bentuk kebijakan infrastruktur dan fasilitas peningkatan .

Kasus Aice, salah satu buruh perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim PT. Alpen Food Industry (AFI) yang diabaikan penyakit endometriosisnya malah diancam perusahaan akan menghentikannya dari pekerjaan. Ia kemudian bertahan hingga akhirnya, dia pun mengalami pendarahan hebat akibat bobot pekerjaannya yang berlebihan. Elitha terpaksa melakukan operasi kuret pada Februari lalu, yang berarti jaringan dari dalam rahimnya diangkat. Dari berbagai studi

¹⁵⁰Dalam lintasan sejarah, setiap kelompok masyarakat mempunyai konsepsi ideologis tentang jenis kelamin termasuk sebagai kriteria yang penting dalam pembagian kerja. Pekerjaan yang diperuntukkan bagi laki-laki umumnya yang dianggap sesuai dengan kapasitas biologis, psikologis, dan sosial sebagai laki-laki, yang dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki otot lebih kuat, tingkat resiko dan bahayanya lebih tinggi karena bekerja di luar rumah, dan tingkat keterampilan dan kerjasamanya lebih tinggi Adapun pekerjaan yang diperuntukkan bagi perempuan yang dikonsepsikan sebagai orang yang lemah dengan tingkat resiko lebih rendah, cenderung bersifat mengulang, tidak memerlukan konsentrasi, dan lebih mudah terputus-putus. Oleh karena itu, tingkat keterampilan perempuan dianggap rata-rata lebih rendah di banding laki-laki. Kualitas laki-laki lebih konsisten kepada pekerjaan maskulin yaitu memburu binatang, mengerjakan logam, melebur biji-biji, pekerjaan soldir, pertukangan kayu, membuat instrumen musik, menangkap dengan perangkap, membuat kapal, pertukangan batu, mengerjakan tulang-tulang, tanduk dan kulit kering, menambang, dan mengangkut. Perempuan lebih konsisten kepada pekerjaan feminin, yaitu mengumpulkan bahan bakar (kayu), mempersiapkan minuman, meramu dan menyediakan bahan makanan dari tumbuhan-tumbuhan liar, produksi bahan susu, mencuci, mengambil air dan memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dalam masyarakat industri, kaum perempuan diupayakan untuk terlibat di dalam kegiatan ekonomi yang dialokasikan pada bidang-bidang tertentu seperti pekerjaan tulis-menulis, kesekretariatan, jasa, dan yang berhubungan dengan kegiatan pengasuhan dan perawatan seperti guru, perawat. Laki-laki mendominasi industri hulu yang produktivitasnya lebih tinggi, sementara perempuan terlibat dalam industri hilir, yang menangani proses akhir dari sebuah produk (*finishing*), yang upah produktivitasnya lebih rendah. Lebih luas lihat Khusnul Khatimah, "Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Pada Sektor Pekerjaan, *Jurnal YINYANG*, Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009, h. 158-180

tersebut memperlihatkan Kondisi yang dialami oleh kaum perempuan Indonesia era kontemporer lebih baik dari sisi pendidikan dibandingkan masa Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Meutia, Wardah Hafidz, dan Myra Diarsi ketika masih hidup. Kukungan budaya dan adat masih mengelayuti kehidupan perempuan, sementara era kontemporer persaingan kerja menjadi dinamika yang hadir dalam kehidupan diluar rumah.

Politik pendidikan bagi perempuan ebih mudah menerima akses dan partisipasi dalam pendidikan. Angka perempuan buta huruf pun juga jauh berkurang setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai persentase perempuan yang buta huruf pada tahun 2009 hingga 2020 yaitu, dari 9,20 persen menjadi 4,69 persen. Namun, dari sisi intelektualitas, kaum perempuan dinilai belum banyak memberikan kontribusinya berupa gagasan maupun perubahan nyata terhadap kemajuan masyarakat. Data United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistic pada tahun 2019, peneliti perempuan di Indonesia hanya mencapai 33 persen, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di dunia, yaitu hanya 30 persen. Hal ini membuktikan kontribusi gagasan perempuan di Indonesia maupun di dunia masih jauh dikatakan cukup dalam bidang pengembangan pendidikan. Objek dan subjek menjadi political will dalam kehidupan.

Kesempatan perempuan di Indonesia didasarkan amanat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang berisi dalam proses seleksi institusi publik harus mengakomodir setidaknya 30 persen keterwakilan gender. Yang kemudian hal ini merupakan usaha pemerintah

untuk memberikan persamaan hak terhadap perempuan dan laki-laki. Realitasnya lagi-lagi, dari 30 persen kesempatan keterwakilan gender di parlemen, hingga saat ini, perempuan hanya mampu mengisi sampai 11 persen saja. Ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia belum mampu mengisi kesempatan yang diberikan untuk mendukung kelanjutan perjuangan pejuang hak perempuan sebelumnya itu. Era perempuan kontemporer, bukan lagi mengenai bagaimana memperjuangkan hak perempuan untuk diberikan kesempatan yang sama halnya dengan laki-laki di berbagai aspek pendidikan, publik (politik) dan ekonomi. Tetapi, perempuan kontemporer memiliki tugas dan peran dalam berjuang untuk mengisi kesempatan yang ada dan telah diberikan hingga saat ini. BAB I

Sebagaimana wacana dipahami bahwa Gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *social constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum laki-laki dan wanita melalui proses sosial dan budaya yang panjang¹⁵¹. Sekarang ini semakin dipahami oleh masyarakat bahwa citra perempuan adalah sesuatu yang dibentuk oleh wacana di luar dirinya, dan bukan berasal dari perempuan sendiri. Bagaimanapun, permasalahannya bukan sekedar menunjukkan ada ketidakadilan, atau ada wacana dominan yang bukan milik perempuan, melainkan membongkar struktur dibelakang representasi yang tidak adil tersebut.

Pada dimensi ekonomi politik, beberapa kebijakan yang mengarah program pemerataan untuk semua propinsi di Indonesia dan peningkatan kualitas perempuan yang selama ini merupakan fokus pembinaan juga masih menjadi masalah yang paling menonjol di Indonesia. Hal yang tidak

¹⁵¹Lihat beberapa pandangan Mansour Fakih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Tim Risalah Gusti (peny), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hh. 45-46

kalah pentingnya eksistensi *legal formal* yang telah dibuat dan diaplikasikan yaitu: *Pertama*, Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 “*Setiap warga negara baik perempuan maupun laki-laki, mendapatkan kesempatan setara untuk mengecap pendidikan* “; *Kedua*, Instruksi Presiden No.9 thn 2000 tentang Keputusan untuk melakukan *Gender Mainstreaming*, *setiap institusi pemerintah harus mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap tahapan pembangunan*; *Ketiga*, Kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Bidang Pendidikan yang menyebutkan “*terwujudnya persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berkeadilan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan, menurunkan tingkat keniraksaraan penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang jenis dan jalur pendidikan*”; *Keempat*, Program pendidikan tinggi; dan *Kelima*, Program pendidikan luar sekolah yang meliputi paket A/B/C, pemberantasan buta huruf (keaksaraan fungsional). Semua program tersebut akan dianalisis dengan melihat akses dan pemerataan pendidikan; mutu dan relevansi pendidikan; dan manajemen pendidikan.

Diakui ataupun tidak, perempuan telah cukup aktif dalam berbagai bidang kehidupan, walaupun kuantitas tidak sebanyak laki-laki dalam sektor publik. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pembangunan masih netral Gender yang memberikan dampak tersendiri bagi perempuan. Kondisi netral Gender didasari atas asumsi bahwa kebijakan dan program dibuat memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki. Padahal perempuan tidak akan pernah sama dengan laki-laki karena memiliki perbedaan kodrati dan Gender. Upaya merekonstruksi pembangunan menuju pembangunan berwawasan Gender memerlukan rencana pembangunan responsif Gender dan sekaligus

perubahan kebijakan pembangunan yang mengarah pada indentikasi ada tidaknya kesenjangan Gender dari sisi kekuasaan, status, dan kemampuan. 4 faktor utama sebagai indentifikasi teori Gender dalam pembangunan adalah:

1. Profil Kegiatan. Yaitu bagaimana interaksi perempuan dalam salah satu proyek pembangunan dari sisi waktu, tempat kerja, beban kerja, pendapatan;
2. Faktor akses, yang menilai tingkat keseimbangan dan persamaan dalam memperoleh akses kredit/modal, rumah, tanah, informasi, dan pendidikan;
3. Faktor kontrol dengan melihat tingkat penguasaan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima sumber-sumber daya pembangunan
4. Faktor partisipasi dengan melihat bagaimana perempuan dan laki-laki berfartisipasi dalam program pembangunan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Seperti contoh, dalam kepengurusan suatu usaha, berapa perbandingan jumlah pengurus laki-laki dan perempuan; berapa jumlah laki-laki dan perempuan sebagai anggota biasa, maupun sebagai simpatisan;
5. Faktor manfaat dari hasil pembangunan, mulai dari sisi pendapatan, sampai pada kesejahteraan yang didapat antara laki-laki dan perempuan¹⁵². Dengan demikian usaha memahami hak-hak tersebut tidak lepas dari pengkajian mendalam tentang (1) pandangan sosial kedudukan laki-laki dan perempuan; (2) tipologi kebijakan itu sendiri; dan (3) kondisi objektif yang membentuk terjadinya pembagian hak dan kewajiban serupa itu

¹⁵²Eva Lidya, "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berwawasan Gender", *Artikel Umum*, Bulletin Bakohumas Kota Palembang, 2003, h. 6

Dari aspek transformasi awal pembagian *species* manusia dalam fakta biologis kedalam katagori *maskulinitas* dan *feminitas* juga menjadi acuan dasar sebuah terminologi atas gender. Pertanyaan sehari-hari ketika orang tua ditanya kelahiran anaknya,” laki-laki atautkah perempuan?” menumbuhkan dasar adanya sebuah perbedaan, yang selanjutnya menjadi perdebatan berkesinambungan ketika memasuki interpretasi tanggung jawab sosial budaya. Itulah sebabnya pembicaraan disekitar reproduksi manusia selalu sarat dengan nilai moral dan etika apalagi dikaitkan dengan pandangan mitologis terhadap fisik manusia. Terminologi budaya dasar, laki-laki cenderung dikultuskan, mengingat Adam pernah menjadi objek “sujud” kedua sesudah Tuhan, sementara perempuan dimitoskan sebagai makhluk penggoda yang dilukiskan sebagai setan betina (*female demon*) yang membawa manusia jatuh kebumi¹⁵³. Mitos tersebut berkembang terutama pada masyarakat tradisional, termasuk pada mitos keperawanan; selaput dara; menstruasi; anak perempuan harus manis, menurut, menerima, mendengarkan, dan selalu mendukung dan bersikap *caring*. Selama terminologi tersebut masih melingkari siklus kehidupan manusia, upaya membangun citra terminologi kesetaraan gender “positif” dan seimbang sulit tercapai.

Berbagai marginalisasi kaum perempuan yang masuk kedalam berbagai sektor kehidupan karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradapan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun

¹⁵³Nasaruddin Umar, “Teologi Reproduksi”, dalam Sri Suhandjati (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Jogjakarta: Gama Media, 2002, h. 21.

ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, marginalisasi yang merupakan merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/ pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Seperti 1) banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki; 2) peluang untuk menjadi pimpinan dilingkungan TNI (jenderal) lebih banyak diberikan kepada laki-laki daripada perempuan; 3) Banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki seperti industri garmen dan industri rokok karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran.

Kedua, Subordinasi adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi tenaganya. Seperti 1) banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti “guru taman kanak-kanak”. “sekretaris”, atau “perawat”, yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan laki-laki seperti direktur, dosen diperguruan tinggi, dokter, dan tentara. Hal tersebut berpengaruh pada perbedaan gaji yang diterima oleh perempuan; 2) peminggiran perempuan dari beberapa jenis kegiatan baik dibanding pertanian dan industri serta bidang tenaga kerja yang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki; 3) seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian keluar negeri, ia harus mendapat izin dari suami. Tetapi

apabila suami yang akan pergi ia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari istri.

Ketiga, Pandangan streotype merupakan suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. beberapa contoh 1) label kaum perempuan sebagai ”ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi; 2) label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*a main breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sampingan saja (*a secondary breadwinner*) sehingga kurang dihargai. Aktifitas di ranah pemerintah hanyalah merupakan ”perpanjangan” dari peran domestiknya. Misalnya karena perempuan dianggap pandai merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja dibagian penjualan; 3) Apabila laki-laki marah, maka dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan.

Keempat, Kekerasan merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. seperti 1) Istri menghina / mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami; 2) perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik sosial / etnis atau antar negara; 3) Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah; 4) orang tua memukul dan mengahajar anaknya.

Kelima, Beban ganda adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis kegiatan sehari-hari. seperti 1) hasil observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja dilura rumah, selain bekerja diwilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan (*double burden*). Seperti contoh sederhana seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan menyediakannya diatas meja, kemudian merapikan kembali sampai mencuci piring-piring yang kotor. Seorang bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan, mereka akan meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang mereka pakai. Apabila yang mencuci isteri, walaupun ia bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas pelayanan yang dianggap sebagai kewajibannya¹⁵⁴.

Gerakan perempuan terlihat dalam Undang-undang mengenai pemilihan umum, partai poltik berkewajiban mencalonkan perempuan sebagai calon anggota eksekutif sebanyak 30%, namun pad a pemilihan umum tahun 2004 baru mampu mengakomodasi kursi perempuan sebanyak 10 atau 7%, hanya 28 orang dari jumlah total anggota parlemen (sebanyak 550) untuk periode 2004 -2009. Angka ini belum bisa mewakili aspirasi perempuan dalam politik sebagai wakil rakyat. Hadirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30% kaum perempuan untuk duduk

¹⁵⁴ Berbagai inormasi lihat Freedman, Estelle B. (ed.). *The Essentsial Feminist Reader*. New York: The Modern Library. 2007; Catherine Villanueva Gardner,. *Historical dictionary of feminist philosophy*. Maryland: Scarecrow Press. 2006, sebagai penguatan dapat juga dilihat Carol Gilligan,.. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development* . Cambridge, assachusetts, & London: Harvard University Press, Cet. 38. 2003; , Sugi Hastuti dan Siti Hariti Sastriyani. *Glosarium Seks dan Gender*. Yogyakarta: Carasvati Books, 2007.

di kursi legislatif sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis. Hal ini terlihat dari hasil pemilu 2009 memberikan kenaikan perwakilan/representasi perempuan di DPR. Dilihat dari pencalonan perempuan, rekapitulasi KPU menunjukkan jumlah keseluruhan caleg perempuan mencapai 34,6% atau setara 3.910 caleg perempuan dari total 11.130 caleg untuk DPR RI. Dari 38 partai politik peserta pemilu, PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) merupakan partai dengan pencalonan perempuan terbanyak (45%). Sedangkan yang paling rendah adalah Partai Patriot yaitu 19,66%. Sebanyak 8 partai menawarkan lebih dari 40% calon perempuan, 24 partai lainnya mencapai 30%, sedang 6 partai yang gagal mencalonkan minimal 30% perempuan.

Terdapat 5 partai yang menempatkan caleg perempuan pada nomor urut 1 (satu) terbanyak yaitu PBUI (38,4%), PPPI (32,5%), Partai Pelopor (30,4%), PIB (28,9%) dan Partai Buruh (28,9%). Partai yang lolos parliamentary threshold adalah Partai Demokrat yang tertinggi menempatkan caleg perempuan pada urutan nomor 1 (satu) (18,2%), sedangkan partai yang paling sedikit menempatkan calon legislatif. Dalam nilai-nilai ajaran Islam, terminologi gender dan konteks emanisipasi atas hak-hak reproduksi telah diberikan secara seimbang. Keseimbangan tersebut telah memberikan konsep keserasian dan keselarasan (*kafa'ah*) yang dapat dilihat dari konsep hukum keluarga, seperti: 1) Hak bersama dalam memilih jodoh; 2) hak bersama menentukan perkawinan dalam kerangka syura (musyawarah dan mufakat); 3) Hak menikmati hubungan seksual bersama; 4) hak bersama mengasuh anak. Dalam kerangka nilai pendapatan nirketrampilan aspirasi reproduksi ternyata cukup berdampak¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Studi lintas sektoral di Amerika membuktikan, meskipun penghasilan perempuan selalu naik dari waktu ke waktu, kenaikan itu tetap tidak bisa mengejar kenaikan penghasilan laki-laki. Artinya, setiap pekerjaan diberi standar harga dari nilai praktisnya

Berdasarkan hal-hal tersebut, dialog terminologi yang interaktif sebagai upaya memisahkan antara unsur mitologi dari teologi reproduksi merupakan kegiatan yang mendesak dan penting, karenanya kaum agamawan dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati jender di Indonesia berusaha memberikan pemahaman terhadap gender. Hal tersebut dengan pertimbangan sekunder yang diarahkan era globalisasi dengan perkembangan *science* dan teknologi komunikasi berdampak kuat terhadap kehidupan manusia termasuk bangsa Indonesia.

Dinamika yang kemudian dikembangkan dalam teori konflik Karl Marx yang melihat masyarakat secara konstan berubah komposisinya. Sehingga dalam tingkat pengembangan struktur budaya, kondisi psikologi perempuan, dan interpretasi keagamaan merupakan faktor-faktor penentu yang membentuk pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Ketiga factor tersebut secara dialektik saling tarik menarik dalam membentuk pandangan, keyakinan dan kebiasaan dalam memposisikan laki-laki dan perempuan selalu tunduk pada norma-norma dan nilai-nilai kultural dan prinsip-prinsip doktrinal agama yang diwarisi secara turun temurun. Konflik kondisi psikologis kaum perempuan juga biasanya akan tertundukkan oleh kekuatan normatif budaya dan doktrin agama. Dalam sisi konflik era modern, kondisi psikologi perempuan sering menolak setiap nilai dan norma tradisi dan agama yang dipandang menempatkan mereka pada posisi tidak layak, dan tidak jarang muncul kepermukaan dalam suatu bentuk gerakan; yaitu suatu gerakan feminis yang menuntut hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki.

yang digunakan untuk membandingkan nilai intrinsik perbedaan pekerjaan untuk menentukan gaji. Kehamilan dan merawat bayi yang mengambil cuti libur panjang mengarahkan pengusaha untuk tidak mempromosikan perempuan karena alasan tersebut

Pada umumnya dalam apresiasi teori konflik, masyarakat tradisional dimanapun di dunia ini cenderung mengunggulkan kaum laki-laki dan kaum perempuan. *Streotype* tentang feminitas dan maskulinitas menurut cherist Weedon seperti dikutip oleh Zhulhayatin, disosialisasikan pada tataran yang hirarkis dan fungsional dengan nilai laki-laki dewasa sebagai baromernya¹⁵⁶. Dalam hal ini, laki-laki dewasa berperan sebagai penentu keputusan baik di sektor domestik sebagai kepala keluarga maupun di sektor publik sebagai pembuat tata budaya. Dalam tataran seperti, perempuan dan anak-anak merupakan pihak-pihak melaksanakan laki-laki dewasa.

Struktur kebudayaan lainnya yang membentuk konflik adalah ketegasan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan dari sejak kecil telah diarahkan pada satu pola dan ide tertentu yaitu penonjolan maskulin bagi laki-laki dan feminis bagi perempuan. Konsekwensinya, laki-laki lebih banyak mendapat nilai prioritas pada sektor publik manapun, sementara idealita perempuan untuk wacana daerah Indonesia adalah cakap 3 M (*macak, masak, manak*), sementara suami adalah borjuis. Penindasan semacam ini menjadi sentral kritik yang kemudian Weber mengusulkan suatu kumpulan dimensi untuk menambah ukuran ekonomi yang dapat memberikan kontribusi pada sistem ketidaksamaan dan potensi perubahan social. Menurut Weber, kelas adalah basis ekonomi ketidaksamaan; organisasi yang longgar sekitar kelas kaya dan kelas miskin. selain dimensi kelas, Weber menambahkan status sosial yakni pandangan mengenai kehormatan yang dapat diberikan oleh latar belakang keluarga; aktivitas pekerjaan dan bentuk-bentuk reward lainnya, termasuk sumber-sumber penghasilan.

¹⁵⁶Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Problema Peningkatan Sumber Daya Perempuan", dalam E.D. Binar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesian dan Kemodernan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998, h. 305

Dalam berbagai kajian menegaskan bahwa perempuan telah cukup aktif dalam berbagai bidang kehidupan, walaupun kuantitas tidak sebanyak laki-laki dalam sektor publik. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan pembangunan masih netral Gender yang memberikan dampak tersendiri bagi perempuan. Kondisi netral Gender didasari atas asumsi bahwa kebijakan dan program dibuat memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki. Padahal perempuan tidak akan pernah sama dengan laki-laki karena memiliki perbedaan kodrati dan Gender.

Upaya merekonstruksi pembangunan menuju pembangunan berwawasan Gender memerlukan rencana pembangunan responsif Gender dan sekaligus perubahan kebijakan pembangunan yang mengarah pada indentikasi ada tidaknya kesenjangan Gender dari sisi kekuasaan, status, dan kemampuan. 4 faktor utama sebagai identifikasi teori Gender dalam pembangunan adalah:

1. Profil Kegiatan. Yaitu bagaimana interaksi perempuan dalam salah satu proyek pembangunan dari sisi waktu, tempat kerja, beban kerja, pendapatan;
2. Faktor akses, yang menilai tingkat keseimbangan dan persamaan dalam memperoleh akses kredit/modal, rumah, tanah, informasi, dan pendidikan;
3. Faktor kontrol dengan melihat tingkat penguasaan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima sumber-sumber daya pembangunan
4. Faktor partisipasi dengan melihat bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam program pembangunan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Seperti contoh, dalam pengelolaan suatu usaha, berapa perbandingan jumlah pengurus laki-laki dan perempuan; berapa

jumlah laki-laki dan perempuan sebagai anggota biasa, maupun sebagai simpatisan;

5. Faktor manfaat dari hasil pembangunan, mulai dari sisi pendapatan, sampai pada kesejahteraan yang didapat antara laki-laki dan perempuan¹⁵⁷.

Dengan demikian usaha memahami hak-hak tersebut tidak lepas dari pengkajian mendalam tentang (1) pandangan sosial kedudukan laki-laki dan perempuan; (2) tipologi kebijakan itu sendiri; dan (3) kondisi objektif yang membentuk terjadinya pembagian hak dan kewajiban serupa itu. Beberapa catatan atas partisipasi politik perempuan dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.2
PEREMPUAN SEBAGAI PENGAMBIL KEPUTUSAN
DI BERBAGAI NEGARA¹⁵⁸

No	Nama Presiden	Negara	Tahun
1	Khertek Anchimaa Toka	Tuva	1940
2	Suhbaataryn Yanjmaa	Mongolia	1953
3	Isabel Martinez de Peron	Argentina	1974
4	Lidia Guelier Tejada	Bolivia	1979
5	Vigdís Finnbogadóttir	Iceland	1980
6	Maria Lee Pedini Angelini	San Marino	1981
7	Agatha Barbara	Malta	1982
8	Gloriana Ranocchini	San Marino	1984

¹⁵⁷Eva Lidya, "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berwawasan Gender", *Artikel Umum*, Bulletin Bakohumas Kota Palembang, 2003, h. 6

¹⁵⁸ Sumber: www.ipu.org.

9	Carmen Pereira	Guinea Bissau	1984
10	Corazon Aquino	Philippines	1986
11	Ertha Pascal Trouillot	Haiti	1990
12	Sabine Bergmann-Pohl	German Democratic Republic	1990
13	Violeta Barrios de Chamorro	Nicaragua	1990
14	Mary Robinson	Ireland	1990
15	Sylvie Kinigi	Burundi	1993
16	Chandrika Kumarantunge	Sri Lanka	1994
17	Ruth Perry	Liberia	1996
18	Rosalía Arteaga Serrano	Ecuador	1997
19	Mary McAleese	Ireland	1997
20	Janet Jagan	Guyana	1997
21	Ruth Dreifuss	Switzerland	1998
22	Vaira Vīķe-Freiberga	Latvia	1999
23	Mireya Elisa Moscoso de Arias	Panama	1999
24	Tarja Halonen	Finland	2000
25	Gloria Macapagal Arroyo	Philippines	2001
26	Megawati Sukarnoputri	Indonesia	2001
27	Nino Burjanadze	Georgia	2003
28	Ellen Johnson Sirleaf	Liberia	2006
29	Michelle Bachelet	Chile	2006
30	Dalia Itzik	Israel	2007
31	Pratibha Patil	India	2007
	Perdana Menteri		
32	Sirimavo Bandaranaike	Sri Lanka	1960; 1970;

			1994
33	Indira Gandhi	India	1966; 1980
34	Golda Meir	Israel	1969
35	Elisabeth Domitien	Central African Republic	1975
36	Margaret Thatcher	United Kingdom	1979; 1983; 1987
37	Maria de Lurdes Pintasilgo	Portugal	1979
38	Mary Eugenia Charles	Dominica	1980
39	Gro Harlem Brundtland	Norway	1981; 1986; 1990
40	Milka Planinc	Yugoslavia	1982
41	Benazir Bhutto	Pakistan	1988; 1993
42	Kazimiera Prunskiene	Lithuania	1990
43	Khaleda Zia	Bangladesh	1991
44	Edith Cresson	France	1991
45	Hanna Suchocka	Poland	1992
46	Kim Campbell	Canada	1993
47	Tansu Ciller	Turkey	1993
48	Sylvie Kinigi	Burundi	1993
49	Agathe Uwilingiyimana	Rwanda	1993
50	Chandrika Kumarantunge	Sri Lanka	1994
51	Claudette Werleigh	Haiti	1995
52	Shiekh Hasina Wajed	Bangladesh	1996
53	Janet Jagan	Guyana	1997
54	Jenny Shipley	New Zealand	1997

55	Helen Elizabeth Clark	New Zealand	1999/2005
56	Irena Degutiene	Lithuania	1999
57	Maria das Neves	Sao Tome and Principe	2002
58	Luisa Dias Diogo	Mozambique	2004
59	Maria de Carmo Silveira	Sao Tome and Principe	2005
60	Portia Simpson-Miller	Jamaica	2006

TABEL 3.3
PRESIDEN DAN PERDANA MENTERI PEREMPUAN DI ASIA
PASIFIK¹⁵⁹

Tahun	Presiden		Perdana Menteri	
	Total	Asia-Pasifik	Total	Asia-Pasifik
1950 – 1959	1	1	0	0
1960 – 1969	0	0	3	2
1970 – 1979	2	0	4	1
1980 – 1989	3	1	8	2
1990 – 1999	11	1	16	6
2000-2020	8	3	5	1

¹⁵⁹ Sumber: *www.ipu.org*.

TABEL 3.4
PERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN
DI BERBAGAI NEGARA¹⁶⁰

No	Negara	Sistem Parlemen	Tahun	Jumlah Perwakilan Perempuan	%
1	Australia	DPR	2007	40 dari 150	26.7
		Senat	2007	27 dari 76	35.5
2	Kiribati	Dewan Nasional	2007	2 dari 46	4.3
3	Marshall Islands	Parlemen	2007	1 dari 33	3.0
4	Federated States of Micronesia	Kongres	2005	0 dari 14	0
5	Nauru	Parlemen	2008	0 dari 18	0
6	New Zealand	DPR	2008	41 dari 122	33.6
7	Palau	Dewan	2008	0 dari 16	0
		Perwakilan Rakyat		2 dari 13	15.4
		Senat			
8	Papua New Guinea	Parlemen Nasional	2007	1 dari 109	0.9
9	Samoa	DPR	2006	4 dari 49	8.2
10	Solomon Islands	Parlemen Nasional	2006	0 dari 50	0
11	Tonga	DPR	2008	1 dari 32	3.1
12	Tuvalu	Parlemen	2006	0 dari 15	0

¹⁶⁰ Inter-Parliamentary Union (IPU) www.ipu.org:

13	Vanuatu	Parlemen	2008	2 dari 52	3.8
14	Republik Rakyat China	Kongres Rakyat Nasional	2008	637 dari 2987	21.3
15	Republik Rakyat Korea	Dewan Mahkamah Masyarakat	2003	138 dari 687	20.1
16	Republik Korea	DPR	2008	41 dari 299	13.7
17	Japan	DPR Dewan Nasional	2005 2007	45 dari 480 44 dari 242	9.4 18.2
18	Armenia	Parlemen Nasional	2007	11 dari 131	8.4
29	Azerbaijan	Parlemen Nasional	2005	14 dari 123	11.4
20	Kazakhstan	DPR Senat	2007 2008	17 dari 107 2 dari 47	15.9 4.3
21	Kyrgyzstan	Supreme Council	2007	23 dari 90	25.6
22	Mongolia	State Great Hural	2008	3 dari 74	4.1
23	Tajikistan	DPR Dewan Nasional	2005 2005	11 dari 63 8 dari 34	17.5 23.5
24	Turkmenistan	Dewan Nasional	2008	? dari 124	0
25	Uzbekistan	Parlemen Nasional Senat	2004 2005	21 dari 120 15 dari 100	17.5 15.0
26	Afghanistan	House of the	2005	67 dari 242	27.7

		People House of Elders	2005	22 dari 102	21.6
27	Bangladesh	Parlemen	2008	19 dari 300	6.3
28	Bhutan	Dewan Nasional	2008	4 dari 47	8.5
		Senat	2007	6 dari 25	24.0
29	India	DPR	2004	49 dari 541	9.1
		Dewan Nasional	2008	23 dari 243	9.5
30	Republik Islam Iran	Dewan Perwakilan Islamik	2008	8 dari 286	2.8
31	Maldives	People's Majlis	2005	6 dari 50	12.0
32	Nepal	Parlemen Legislatif	2008	197 dari 594	33.2
33	Pakistan	Dewan Nasional	2008	76 dari 338	22.5
		Senat	2006	17 dari 100	17.0
34	Sri Lanka	Parlemen	2004	13 dari 225	5.8
35	Kamboja	Dewan Nasional	2008	20 dari 123	16.3
		Senat	2006	9 dari 61	14.8
36	Indonesia	DPR	2004	64 dari 550	11.6
37	Lao People's Democratic Republic	Dewan Nasional	2006	29 dari 115	25.2
38	Malaysia	DPR	2008	24 dari 222	10.8
		Senat	2008	17 dari 59	28.8
39	Philippina	DPR	2007	49 dari 239	20.5
		Senat	2007	4 dari 23	17.4

40	Timor Leste	Parlemen Nasional	2007	19 dari 65	29.2
41	Singapur	Parlemen	2006	23 dari 94	24.5
42	Thailand	Dewan Perwakilan Nasional	2007	56 dari 480	11.7
		Senat	2008	24 dari 150	16.0
43	Viet Nam	Parlemen Nasional	2007	127 dari 493	25.8

TABEL 3.5
REPRESENTASI PEREMPUAN DI DPR-RI¹⁶¹

Periode	Perempuan		Laki-Laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950 – 1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	96,2
1955 – 1960	17	6,3	272	93,7
Konstituante: 1956 – 1959*	25	5,1	488	94,9
1971 – 1977	36	7,8	460	92,2
1977 – 1982	29	6,3	460	93,7
1982 – 1987	39	8,5	460	91,5
1987 – 1992	65	13,0	500	87,0
1992 – 1997	65	12,5	500	87,5
1997 – 1999	54	10,8	500	89,2

¹⁶¹ Sumber: Sekretariat DPR 2001. Data dirumuskan ulang oleh Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum, CETRO.

1999 – 2004	45	9,0	500	91,0
2004 – 2009	62	11,3	488	88,7

TABEL 3.6

CALON LEGISLATIF TERPILIH DPR-RI PERIODE 2009 – 2014

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Kursi Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Nanggro Aceh Darussalam (NAD)	11	–	11
2	Sumatra Utara	28	2	30
3	Sumatara Barat	14	–	14
4	Riau	10	1	11
5	Kepulauan Riau	2	1	3
6	Jambi	6	1	7
7	Sumatra Selatan	16	1	17
8	Bangka Belitung (BABEL)	3	–	3
9	Bengkulu	3	1	4
10	Lampung	13	5	18
11	DKI Jakarta	16	5	21
12	Jawa Barat	70	21	91
13	Banten	17	5	22
14	Jawa Tengah	68	9	77
15	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	7	1	8

16	Jawa Timur	66	21	87
17	Bali	9	–	9
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	10	–	10
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	12	1	13
20	Kalimantan Barat	9	1	10
21	Kalimantan Timur	6	2	8
22	Kalimantan Selatan	11	–	11
23	Kalimantan Tengah	4	2	6
24	Sulawesi Utara	4	2	6
25	Sulawesi Tengah	5	1	6
26	Sulawesi Selatan	23	3	26
27	Sulawesi Barat	3	–	3
28	Sulawesi Tenggara	4	1	5
29	Gorontalo	2	1	3
30	Maluku	3	1	4
31	Maluku Utara	3	–	3
32	Papua	7	3	10
33	Papua Barat	2	1	3
Jumlah		456	93	549

TABEL 3.7

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SELURUH INDONESIA¹⁶²

No.	Nama Provinsi	Gubernur	Wakil Gubernur	Tahun Terpilih
		Jenis Kelamin		
1	Nangro Aceh Darussalam	L	L	2007
2	Sumatra Utara	L	L	2008
3	Sumatra Barat	L	L	2005
4	Riau	L	L	2008
5	Sumatra Selatan	L	L	2008
6	Jambi	L	L	2005
7	Bengkulu	L	L	2005
8	Lampung	L	L	2009
9	Kepulauan Bangka Belitung	L	L	2007
10	Kepulauan Riau	L	L	2005
11	DKI Jakarta	L	L	2007
12	Jawa Barat	L	L	2008
13	Jawa Tengah	L	P	2008
14	D.I.Yogyakarta	L	L	2008
15	Jawa Timur	L	L	2009
16	Banten	P	L	2006
17	Kalimantan Barat	L	L	2008
18	Kalimantan Tengah	L	L	2005

¹⁶² Sumber: Data Terpilih Departemen Dalam Negeri 2009 dan telah diolah oleh Peneliti ADB

19	Kalimantan Selatan	L	L	2005
20	Kalimantan Timur	L	L	2008
21	Sulawesi Utara	L	L	2005
22	Sulawesi Tengah	L	L	2006
23	Sulawesi Selatan	L	L	2008
24	Sulawesi Tenggara	L	L	2008
25	Gorontalo	L	L	2007
26	Sulawesi Barat	L	L	2006
27	Bali	L	L	2008
28	N.T.B	L	L	2008
29	N.T.T.	L	L	2008
30	Maluku	L	L	2008
31	Maluku Utara	L	L	2008
32	Papua	L	L	2006
33	Papua Barat	L	L	2006

TABEL 3.8
DATA PERWAKILAN PEREMPUAN DI PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

No	Nama Provinsi	Jumlah Bupati/ Walikota	Jumlah Wakil Bupati/ Walikota	Jumlah Kab./ Kota	Tahun Terpilih	Keterangan Perwakilan Perempuan
		L/P	L/P			
1	Nangro Aceh Darussalam	23/0	23/0	23	2007	

2	Sumatra Utara	33/0	33/0	33	2008	
3	Sumatra Barat	19/0	19/0	19	2005	
4	Riau	12/0	12/0	12	2008	
5	Sumatra Selatan	15/0	14/1	15	2008	Wakil Bupati Kab. Musi Rawas
6	Jambi	10/1	10/1	11	2005	
7	Bengkulu	10/0	10/0	10	2005	
8	Lampung	14/0	14/0	14	2009	
9	Kepulauan Bangka Belitung	7/0	6/1	7	2007	Wakil Bupati Kabupaten Bangka
10	Kepulauan Riau	6/1	6/1	7	2005	1. Walikota TJ. Pinang. 2. Wakil Walikota Batam
11	DKI Jakarta	5/1	6/0	6	2007	Walikota Jakarta Pusat
12	Jawa Barat	26/0	26/0	26	2008	
13	Jawa Tengah	32/3	33/2	35	2008	1. Bupati Kab. Pekalongan 2. Wakil Bupati Kab. Semarang 3. Bupati Kab. Kendal 4. Bupati Kab. Karanganyar

						5. Wakil Bupati Kab. Pati.
14	D.I.Yogyakarta	5/0	5/0	5	2008	
15	Jawa Timur	36/2	38/0	38	2009	1. Bupati Kab. Tuban 2. Bupati Kab. Banyuwangi
16	Banten	8/0	8/0	8	2006	
17	Kalimantan Barat	14/0	14/0	14	2008	
18	Kalimantan Tengah	14/0	14/0	14	2005	
19	Kalimantan Selatan	13/0	13/0	13	2005	
20	Kalimantan Timur	14/0	14/0	14	2008	
21	Sulawesi Utara	14/1	14/1	15	2005	1. Bupati Kab. Bolaang Mangondow 2. Bupati Kab. Kepulauan Talaud
22	Sulawesi Tengah	11/0	11/0	11	2006	
23	Sulawesi Selatan	24/0	23/1	24	2008	Bupati Kab. Kepulauan Talaud

24	Sulawesi Tenggara	12/0	11/1	12	2008	Wakil Bupati Kab. Kolaka Utara
25	Gorontalo	6/0	6/0	6	2007	
26	Sulawesi Barat	5/0	5/0	5	2006	
27	Bali	9/0	9/0	9	2008	
28	N.T.B	10/0	10/0	10	2008	
29	N.T.T.	21/0	21/0	21	2008	
30	Maluku	11/0	9/2	11	2008	1. Wakil Bupati Kab. Seram Bagian Timur 2. Wakil Walikota Ambon
31	Maluku Utara	9/0	9/0	9	2008	
32	Papua	29/0	29/0	29	2006	
33	Papua Barat	11/0	11/0	11	2006	
Jumlah		488/10	486/11	497		

BAB IV

GERAKAN POLITIK PEREMPUAN PEMILU 2019: ANALISIS PETA ARUS TIM SAYAP GERAKAN EMAK EMAK DAN SRIKANDI DI INDONESIA

A. Deskripsi Kerja

Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya subjek penelitian yaitu Yaitu Sampel partisipan (*sampling participant*) *purposif sampling*, sampel adalah akademisi perempuan, ketua Lembaga perempuan Pro Demokrasi, Pusat Studi Gender; dan Forum PUSPA Sriwijaya. Dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur untuk menggali penilaian atas berbagai informasi yang muncul dalam wacana dokumentasi/teks yang didapat dari pesan media, e-media, dan berita media sosial yang otoritatif.

Daftar wawancara dilakukan dengan meminta kesediaan mengisi jawaban yang disediakan melalui *google form*. Melalui hal tersebut didapatkan beberapa respon para partisipan sebanyak 10 orang sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL 4.1
DATA PARTISIPAN PENELITIAN

No	Kualifikasi	Singkatan	Jlh (orang)
1	Akademisi Perempuan (dosen dan guru)	AP	3
2	Pusat Studi Gender dan Anak UIN Raden Fatah	PSGA	2
3	Forum PUSPA Sriwijaya	PUSPA	2
4	IWAPI Sumatera Selatan	IWAPI	1

5	Lembaga Pro Demokrasi C-Gress Palembang	LPD	2
Jumlah			10

Sumber: Olah Data, 2020

Jawaban subjek penelitian sebagai partisipan penelitian ini dideskripsikan pada sub bab selanjutnya.

B. Alasan Gerakan Kaum Perempuan Indonesia Pada Pemilu 2019

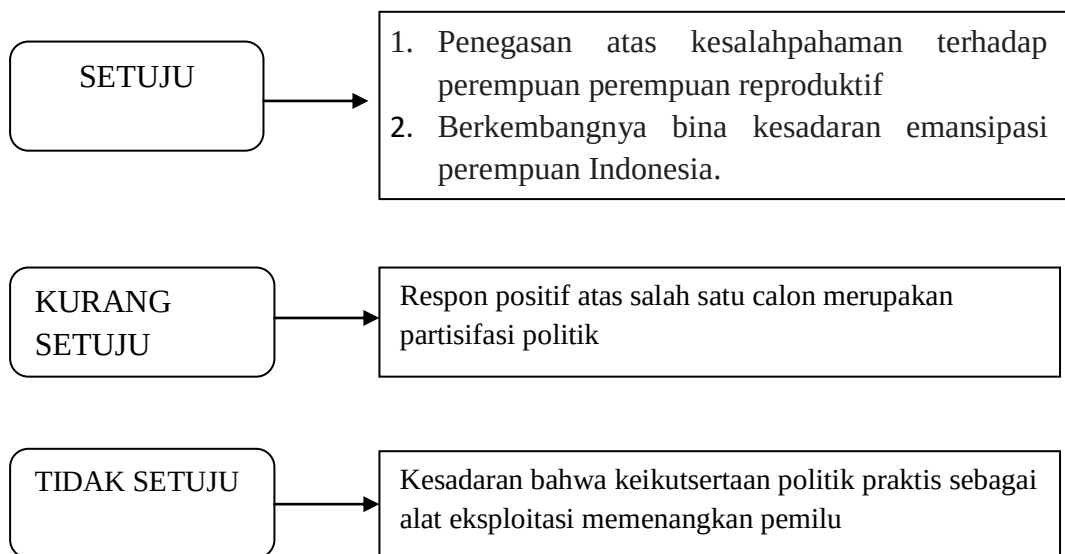
Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa Emak-emak menjadi diskursus penting di tahun politik 2019, Secara cepat, eksistensi emak-emak maupun srikandi dalam politik jadi rebutan banyak pihak. Berdasarkan data setengah dari total 197 juta pemilih sementara untuk Pemilu 2019 nanti adalah perempuan. Pertanyaan awal untuk menggali alasan terjadinya gerakan perempuan pada masa pemilu berupa setuju dan atau ketidaksetujuan atas gerakan perempuan pada Pemilu 2019 merupakan gerakan partisipasi politik untuk mendukung salah satu calon pasangan Presiden serta alasan mengikuti kegiatan tersebut. *Kelompok Partisipan Pertama* menjawab Setuju dengan alasan bahwa aktifitas mereka menunjukkan sikap partisipasi aktif perempuan yang selama ini dianggap sebagai gender perempuan reproduktif (kasur, sumur, dapur), dan hal tersebut juga membuktikan berkembangnya bina kesadaran emansipasi perempuan Indonesia.

Kelompok Partisipan kedua memberikan pernyataan Kurang Setuju karena perempuan tidak harus melakukan aksi partisipasi dengan membangun koalisi dan bersuara di lapangan. Melalui suara pada masing masing rumah tangga dan memberikan respon positif pada masing masing pasangan calon merupakan partisipasi yang tepat dan berdayaguna;

Kelompok Partisipan ketiga memberikan jawaban Tidak setuju, karena keikutsertaan mereka dalam gerakan menunjukkan ketidaksadaran perempuan bahwa mereka hanya dijadikan alat yang dieksploitasi untuk memenangkan pertarungan dan mendapatkan kekuasaan. Dari jawaban tersebut memperlihatkan tiga katagori dalam menilai alasan dasar terhadap aktifitas gerakan partisipasi perempuan dalam perpolitikan praktis. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

GAMBAR 4.1

RESPON PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DAN ALASAN



Menilai alasan baik yang setuju maupun yang kurang setuju maupun tidak setuju memperlihatkan Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas sistem politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik itu

laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas. Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Dinilai dari alasan tersebut kegiatan partisipasi dari sisi rambu rambu dapat dibenarkan. Surbakti misalnya mengkategorikan kegiatan partisipasi politik, yaitu:

Pertama, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. *Kedua*, kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Termasuk dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

Keempat, kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu memengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategorisasi partisipasi politik. *Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak

tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi¹⁶³.

Dalam pandangan partisipan pada pertanyaan atas politik identitas dengan membuat kubu melalui penyebutan nama emak-emak dan srikandi. Mereka memiliki pandangan yang berbeda beda. Sebagian partisipan menyatakan bahwa penyebutan istilah emak emak dan atau srikandi menunjukkan bahwa perempuan dengan semua pandangannya memiliki jati diri untuk konsisten pada apa dan siapa yang menjadi pilihan, karena itu tidak ada masalah membuat kelompok semisal *the power of emak emak* ataupun srikandi Indonesia¹⁶⁴.

Alasan kelompok partisipan juga memberikan pernyataan bahwa penegasan identitas gerakan partisipasi politik perempuan dengan menyebut berbagai simbol bukan menjadi bagian penting dalam pembahasan. Bagi kelompok ini, substansi gerakan moral dengan mengejar keterwakilan perempuan di parlemen menjadi hal yang utama, sebab selama ini perempuan masih saja menjadi bagian *second class*, dan hadirnya perempuan melalui gerakan perempuan mengatasnamakan emak emak

¹⁶³ *Surbakti Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. 2009, h. 122.* Dalam perspektif gender yang di usung oleh kalangan feminis terdapat adagium yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam bidang politik maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan baik yang bersifat struktural maupun kultural dapat ditiadakan

¹⁶⁴ Deskripsi wawancara, 2020

maupun srikandi sebagai wujud agar perhatian terhadap agenda hak hak perempuan diperhatikan¹⁶⁵.

Selain kedua kelompok partisipan cenderung tidak terlalu menyukai istilah tersebut, mereka memberikan alasan bahwa emak emak yang dikonotasikan negatif sebagai kelompok perempuan yang tidak berdaya, atau penyebutan istilah srikandi sebagai ekspresi kemandirian dan kemandirian perempuan. Sebab perempuan hadir sebagai kodratnya untuk ikut andil dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masing masing. Walaupun ingin melakukan gerakan partisipasi terhadap salah satu calon pasangan presiden yang dipilihnya cukup dengan memberikan penjelasan positif terhadap pasangan yang dipilih dan memberikan pandangan seimbang terhadap pasangan lain melalui kelompok kelompok kerja, maupun dalam keluarga masing masing¹⁶⁶.

Pemahaman atas alasan ketiga partisipan yang berhubungan dengan alasan penyebutan emak emak dikonotasikan jauh dari istilah ‘the power of ibu bangsa’, kata emak emak tidak memiliki nilai motivasi kecuali hanya sekedar bahasa gaul dan humor, dan terkesan melecehkan kaum perempuan. Sementara kata “ibu bangsa” memiliki jaringan sejarah terutama pada masa Kongres Perempuan Indonesia tahun 1935. Untuk penilaian yang lain menunjukkan bahwa kata “emak” tidak menasionalis. Sebab kata tersebut dari bahasa Betawi, sementara di wilayah lain dengan penyebutan berbeda. Alasan yang berbeda disebabkan tidak perlu menilai pada kosa kata tapi lebih pada substansi. sementara untuk sebagian yang menilai bahwa apapun namanya “emak emak”, “ibu bangsa” sama sama memiliki nilai bias. Emak emak dimaknai dari perempuan kalangan bawah yang mudah menjadi

¹⁶⁵ Deskripsi wawancara, 2020

¹⁶⁶ Deskripsi wawancara, 2020

sasaran program politik, satu sisi “ibu bangsa” bisa dinilai kelompok kelas atas (*borjuis*) yang memperjuangkan keinginan mereka dan memperjuangkan kelompok “emak emak” dari kelompok bawah. Ibu juga menunjukkan kelas sosial priyayi.

Dalam pertanyaan “Apa alasan utama yang ibu nilai atas gerakan perempuan pada pemilu 2019?” dalam berbagai jawaban partisipan terutama akademisi menilai strategi ikut menyuarakan kampanye Three Ends (Akhir kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Akhir Perdagangan Manusia. Akhir Kesenjangan Ekonomi bagi Perempuan)¹⁶⁷. Sementara kelompok PUSPA dan Iwapi Sumatera Selatan menilai bahwa menyuarakan kekecewaan rendahnya kuota perempuan di Legislatif wujud dari Adanya perlakuan historis (perbudakan dan penindasan) menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama mencapai aspirasi mereka selama beberapa generasi. Mereka menambahkan bahwa menjadi peringatan atas berbagai persoalan perempuan yang masih terus menggayuti kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti pemberlakuan diskriminatif atas larangan perempuan keluar malam, upaya membangun kesetaraan gender¹⁶⁸.

Partisipan dari Pusat Studi Gender dan Lembaga Perempuan Pro Demokrasi menyatakan bahwa mereka menjadi bagian pendukung untuk program sandang pangan dan papan terjangkau bagi semua keluarga di Indonesia sekaligus mendukung gerakan moral keluarga bahagia dengan anak-anak yang agamis. Dari aspek penilaian memperlihatkan bahwa alasan mereka secara umum adalah persoalan ibu rumah tangga. sehingga isu-isu yang dimunculkan seperti jika salah satu memang akan berimplikasi pada tidak akan ada lagi azan, tidak ada pengajian untuk anak-anak, tidak ada

¹⁶⁷ Deskripsi wawancara, 2020

¹⁶⁸ Deskripsi wawancara, 2020

perempuan berkerudung; perempuan bisa menikah dengan perempuan, pria dengan pria. Sementara pasangan lain berupaya mengambil keuntungan dengan isu penurunan harga pangan sehingga terjangkau pada komunitas emak emak.

Hal urgen lainnya para pendukung adalah mereka yang aktif dalam organisasi masyarakat dan memiliki jejaring sosial yang kuat. Hubungan politik dan perempuan dilihat dari dasar dalam arena teologi, terutama dalam agama Islam tentang pola relasi gender dalam Islam, karena dianggap telah terjadi dominasi laki-laki dalam masyarakat di sepanjang zaman, wanita masih sebagai manusia nomor dua, masih dipandang lebih rendah daripada laki-laki disepanjang zaman, demikian kritik Asgar Ali Engeneer kepada para fuqaha dalam menjelaskan posisi perempuan dalam al-Qur'an¹⁶⁹. Kalangan feminisme hampir seluruhnya sepakat bahwa, agama yang diwahyukan adalah agama yang seksis, dalam arti bahwa agama-agama tersebut adalah agama yang mensahkan superioritas laki-laki, baik dalam wilayah domestik ataupun wilayah publik. Ketidakadilan yang dijustifikasi agama dalam pandangan kaum feminis adalah pangkal penindasan terhadap wanita. Mereka juga sepakat bahwa rekonstruksi terhadap ajaran tradisional agama adalah hak yang mutlak dilakukan untuk sejauh mungkin mengeliminasi perbedaan status yang demikian jauh antar wanita dan laki-laki.

Dari perspektif tersebut konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan diajukan oleh kalangan feminis untuk menegaskan bahwa tafsir agama atas superioritas laki-laki adalah sesuatu yang menjadi pokok rekonstruksi. Dalam perspektif inilah, kalangan feminis Islam melakukan serangkaian kegiatan nyata seperti gugatan kepatuhan mutlak wanita terhadap laki-laki dan

¹⁶⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Jogjakarta: Benteng, 1990, h. 45

bentuk kongkret subordinasi wanita serta eksklusi wanita dari wilayah publik¹⁷⁰. Aktifnya perempuan di dunia publik didorong oleh berbagai alasan, antara lain untuk menghilangkan ketergantungan kepada suami disamping meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagian kaum feminis melihat penyebab utama adanya ketidakadilan bagi perempuan di dalam dunia pendidikan adalah karena sistem patriarkhal yang berlaku di masyarakat setempat.

Selain itu, juga melihat hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, karena itulah yang kemudian menentukan keterbelakangan perempuan di berbagai bidang. Konsep dasar peran dan kiprah perempuan dilingkungan sosial juga terus diperhitungkan. perempuan harus menjadi garda terdepan dalam mengajak masarakat memilih calon legislatif (caleg) serta calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dengan cerdas. Memilih cerdas yang dimaksud, yakni memilih caleg maupun capres dan cawapres yang memiliki komitmen besar untuk membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia dengan nilai-nilai luhur dalam berpolitik.

TABEL 4.2
PENILAIAN ALASAN ATAS GERAKAN PEREMPUAN PADA
PEMILU 2019

No	Kelompok	Deskripsi Alasan
1	Prospektif	Strategi ikut menyuarakan kampanye Three Ends (Akhir kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Akhir Perdagangan Manusia. Akhir Kesenjangan Ekonomi bagi Perempuan)

¹⁷⁰Muncul gugatan senada dari 14 mazhab feminis di dunia diantaranya, feminisme post moderen.

2	Emosional	Menyuarakan kekecewaan rendahnya kuota perempuan di Legislatif wujud dari Adanya perlakuan historis (perbudakan dan penindasan) menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama mencapai aspirasi mereka selama beberapa generasi.
3	Responsif	Mengingatkan berbagai persoalan perempuan yang masih terus menggayuti kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti pemberlakuan diskriminatif atas larangan perempuan keluar malam, upaya membangun kesetaraan gender
5	Harapan	Menjadi bagian pendukung untuk program sandang papan dan pangan terjangkau bagi semua keluarga di Indonesia sekaligus mendukung gerakan moral keluarga bahagia dengan anak anak yang agamis

Sumber: Olah Data, 2020

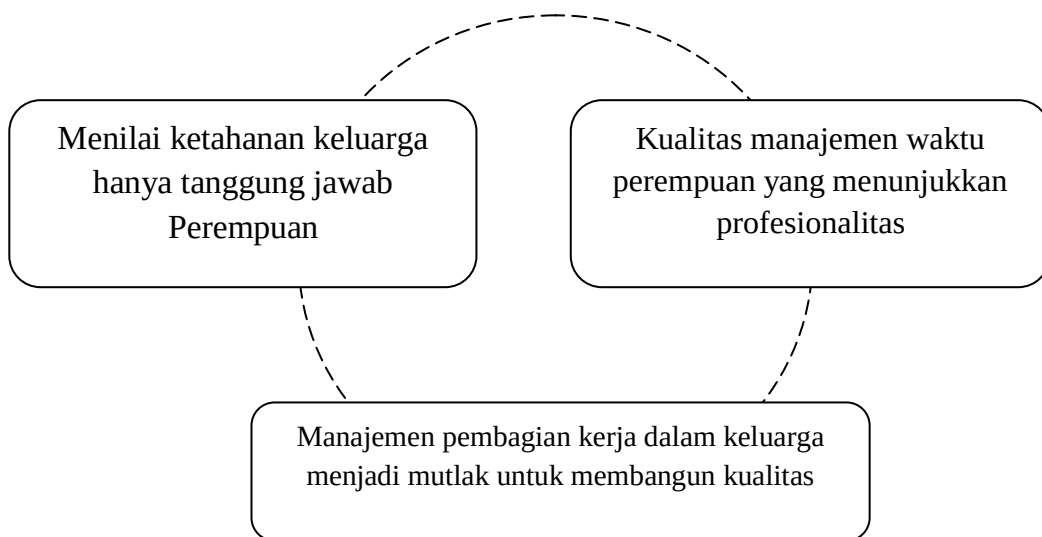
Ketika ditanyakan respon “Dari sisi ekonomis, gerakan perempuan yang mengatasnamakan emak emak maupun srikandi pada masa pemilu dapat menggoyahkan ketahanan keluarga”. Ada tiga pandangan atas pertanyaan tersebut. *Pandangan pertama* memberikan pernyataan yang dideskripsikan bahwa Jika ada yang memberikan pernyataan tersebut menunjukkan masih adanya kesalahpahaman atas konsep ketahanan keluarga yang dianggap sebagai tanggung jawab moral perempuan mutlak.. *Pandangan yang lain* menjelaskan bahwa tidak ada yang bermasalah dengan rumah tangga mereka, sebab perempuan bisa mengatur waktu sesuai

dengan proporsi mereka. Mereka yang karier saja mampu melakukan aktifitas rumah dan pekerjaan sekaligus, apalagi hanya sekedar gerakan partisipasi agar aspirasi mereka di perhatikan.

Pada hampir bersamaan *pandangan ketiga* bahwa untuk sebagian bisa saja terjadi, jika perempuan tidak mampu hadir sesuai dengan kapasitas mereka. Kapan waktu untuk keluarga dan kapan waktu pergerakan, namun hal yang perlu diingat bersama bahwa ketahanan keluarga bukan hanya tanggung jawab istri, tapi juga suami sebagai imam dan kepala keluarga, serta kesadaran bersama anak anak dan semua yang ada dalam rumah tangga mereka. Dari aspek tersebut dapat digambarkan padangan mereka adalah sebagai berikut

GAMBAR 4.2

GERAKAN PARTISIPASI POLITIK AKTIF PEREMPUAN TERHADAP
LEMAHNYA KETAHANAN KELUARGA¹⁷¹



¹⁷¹ Analisis data 2020

Menilai pandangan tersebut, konsep Prabowo-Sandi yang membuat program emak emak pada Agustus 2018 dengan anggota lebih dari 3000 yang tersebar di seluruh Indonesia menargetkan kepada kelompok yang terkena dampak paling besar dari masalah ini, yakni perempuan berpenghasilan menengah ke bawah. Mereka percaya bahkan perempuan yang tidak peduli politik akan menuntut perubahan ketika masalah ekonomi ini terus diganggu.

Berbeda dengan emak-emak Prabowo-Sandi, kelompok partisan perempuan Jokowi beragam dan terorganisasi secara sporadis. Mereka tampak mengusung berbagai isu menggunakan perspektif gender, yaitu *Pertama*, peningkatan dalam layanan kesehatan dasar, terutama untuk kesehatan reproduksi, *Kedua*, sistem pendidikan gratis yang menjamin anak perempuan mendapatkan pendidikan dan mencegah pernikahan anak. *Ketiga*, lebih banyak peluang untuk program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan bantuan bagi penyandang cacat melalui Program Keluarga Harapan. *Keempat*, reformasi agraria yang memberi lebih banyak keuntungan bagi perempuan adat.”

Kelompok relawan perempuan pendukung Jokowi lainnya fokus pada isu ekonomi. Misalnya adalah Pertiwi, kelompok relawan perempuan yang membantu akses permodalan dan industri rumah tangga, dengan klaim telah membantu lebih dari 4 juta perempuan miskin. Pada prinsipnya Perempuan adalah kunci keberhasilan negara dan memerlukan dorongan agar mereka memiliki posisi penting dalam keluarga dan masyarakat. Sebagai ibu dari bangsa, perempuan mendidik anak-anak, meningkatkan mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, dan menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat¹⁷².

¹⁷² Sebagai Perbandingan Masa Orde Baru dengan kampanye bahwa menjadi perempuan yang ideal berarti menjadi ibu dan istri, yang tanpa pamrih mendukung pekerjaan suaminya sambil mendidik anak-anak untuk menjadi warga negara yang baik.

Kelompok partisan perempuan adalah cermin dari gejala ini. Mereka mengadvokasi masalah-masalah yang berputar di sekitar peran mereka semata-mata sebagai ibu dan ibu rumah tangga seperti harga bahan pokok. Mengemukanya peran kelompok partisan perempuan ini dapat dirayakan sebagai contoh keterlibatan politik yang sebagian besar digerakkan sendiri oleh pihak perempuan Indonesia. Namun, isu yang mereka perjuangkan masih terjebak dalam ideologi gender yang dicanangkan negara dalam budaya patriarki, yang mengasumsikan masalah perempuan identik dengan masalah ibu.

C. Ciri, dan Target Gerakan Perempuan pada Masing Masing Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu 2019

Adanya pernyataan bahwa Pada umumnya gerakan perempuan pada masing masing calon presiden dan wakil presiden terkoordinir, informan memberikan pernyataan dengan beberapa pernyataan sebagaimana dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 4.3
RESPON ATAS KOORDINASI GERAKAN PEREMPUAN MASA
PEMILU 2019¹⁷³

No	Respon	Deskripsi Alasan
1	Setuju	Memang gerakan perempuan pada pemilu 2019 terkoordinir dengan agenda dan langkah langkah yang jelas terukur

Ideologi masa tersebut menjadikan dari seorang individu yang bebas menjadi seseorang yang identitasnya dimiliki orang lain: suami atau anak-anak. Mereka bisa aktif dalam ruang publik selama mereka mewakili keluarga, bukan diri mereka sendiri. Wacana itu diteruskan dari generasi ke generasi dan, dalam kasus perempuan, dibungkus lebih kuat dalam gagasan kodrat, atau sifat bawaan seorang perempuan.

¹⁷³ Analisis data 2020

2	Tidak setuju	Gerakan perempuan yang mengatasnamakan emak emak maupun srikandi pada waktu melakukan aktifitas masing masing sesuai dengan nurani masing masing dan atau nurani kelompok kecil dalam mengaspirasi keinginan perempuan daerah
3	Sebagian terkoordinir dan sebagian tidak	Sebagian terkoordinir dalam jalur visi misi dan tujuan pada masing masing kelompok, sementara sebagian lain mengatasnamakan baik emak emak maupun srikandi melakukan aktifitas di luar program yang sudah dibuat, seperti melakukan isu-isu melalui media sosial atas kelemahan salah satu pasangan calon presiden, membagi berbagai sembako pada masa yang bukan waktunya dan atau membagikan sembako atas nama salah satu calon presiden.

Dari jawaban tersebut memperlihatkan koordinasi dilakukan dengan memberi perhatian pada politik identitas dalam tiga pandangan teoritis yaitu primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme. *Primordialisme* dengan cara pandang kelompok sosial tertentu diidentikan dengan gambaran wilayah, agama, kebudayaan serta organisasi sosial sebagai satu hal yang sudah diberikan tidak bisa dibantah dan ditolak. Identitas jenis ini lebih pada sebuah karakteristik perbedaan. Sementara *Konstruktivisme* merupakan identitas sebagai Konstruksi Sosial yang situasional yang dapat membangun

dan dibangunI identitas ini terikat dengan identitas agama dan ras pun etnik bisa masuk di dalamnya. Identitas *Instrumentalisme* merupakan alat memanipulasi dan mobilisasi lebih menitik-beratkan pada perhatian proses manipulasi dan mobilisasi politik, kebangsaan, agama, ras serta bahasa¹⁷⁴.

Ketiga hal tersebut menjadi relevan ketika politik dimaknai sebagai kekuasaan dan legislasi¹⁷⁵. Pemaknaan politik yang demikian kemudian bermuara pada lahirnya ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik. Kaum perempuan selalu diarahkan untuk mampu menempatkan diri dan berkiprah di elite kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi negara yang membuat Undang-Undang¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Lebih luas lihat Arie Setyaningrum, "Memetakan Lokasi bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial", *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edisi 2, 2005, hlm. 19; sebagai perbandingan lihat iwanto Tirtosudarmo, Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm.15

¹⁷⁵ Dalam perspektif fiqh siyasah, Politik ialah yang menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak atas peraturan perundang-undangan, kebijakan public, tata negara dalam bentuk formalitas, sehingga syariat Islam dianggap sebagai solusi bagi yang ideal untuk negara. Konsep dasar ini merupakan Terminologi Islam politik (*political Islam*) mempunyai 2 pemahaman: *Pertama*, ia merupakan bagian dari proses kegiatan politik dalam sebuah struktur sistem politik baik yang telah berjalan dalam sebuah pemerintahan, seperti Iran ketika dibawah pemerintahan Ayatullah Khomeini, maupun yang sedang berupaya masuk dalam jaringan struktur politik di Indonesia, seperti Indonesia berasaskan Pancasila sementara mayoritas rakyat di Indonesia berpredikat muslim. Struktur politik yang berlaku adalah struktur politik berwawasan nasionalisme, bukan berwawasan Islam. *Kedua*, personal yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil dari salah satu komunitas sebuah agama yang memberikan kontribusi penting dalam penguatan Islam politik pada masa kepemimpinannya.

¹⁷⁶ Siti Muslikhati., *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan. Islam*, Jakarta: Gema Insani, Jakarta 2004, H. 69

Pertanyaan yang mengarah pada berbagai sikap kaum perempuan atas gerakan perempuan pada masa pemilu 2019 direspon oleh partisipan dengan berbagai pandangan. Kelompok partisipan menilai dalam 3 sikap perempuan yaitu 1) Partisipasi aktif dengan semua aktifitas pergerakan baik dari kelompok *power of emak emak* maupun dari kelompok srikandi; 2) hanya simpatisan dan sekedar memberi respon; 3) tidak respek bahkan terkesan menilai negatif seperti dengan ucapan, "ngapain ikut ikut seperti tidak pekerjaan saja di rumah". Dari kelompok yang partisipasi aktif melakukan berbagai kegiatan sejak awal menjelang Pemilu 2019, bahkan sebelum kampanye resmi digelar oleh panitia pemilu, kelompok emak-emak bergerak secara masif di tempat-tempat pengajian atau tempat kajian intens melakukan gerakan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apalagi setelah kampanye resmi diadakan dimanapun digelar selalu dihadiri oleh kaum emak-emak.

Dalam dunia media, aktivitas media sosial kaum emak-emak juga tidak luput dari dukungan terhadap salah satu pasangan calon tersebut yaitu dengan memberikan konten informasi mengenai program, kebaikan-kebaikan individu pasangan calon tersebut, informasi mengenai keluarganya, bahkan sampai informasi hoaks yang menyudutkan pasangan calon lainnya. Kawalan hasil pemilu dengan sejumlah massa menggelar yang dianggap banyak kesalahan. Penelusuran data ditemukan emak emak yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat¹⁷⁷,

¹⁷⁷ Lihat Anhari, I. "Emak-emak Ikut Aksi "Gerak" Di Depan Bawaslu. Rmol.Id News, 2019, May 9. Retrieved from <https://politik.rmol.id/read/2019/05/09/389233/emak-emak-ikut-aksi-gerak-di-depan-bawaslu>; sebagai perbandingan lihat juga Ankesa, H., Amanah, S., dan Asngari, P. S. "Partisipasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan

Kasus politik di Jakarta, kaum perempuan dengan populasi melimpah melakukan demonstrasi dengan menangis, membentak, sampai melempar air kemasan bekas ke dalam rutan, ke arah petugas kepolisian. Di atas mobil komando, seorang perempuan berusia 30-an tak dapat menahan air matanya. Ia berorasi seraya menjerit dan menangis mengekspresikan kekesalan atas penahanan salah seorang calon gubernur yang mereka “sayangi dan baggakan”. Pangkal kemarahannya adalah putusan hakim yang memvonis hukuman dua tahun penjara. Beberapa relawan perempuan bahkan berangkat lebih awal kendati harus berhadapan dengan massa anti-salah seorang calon gubernur.

Ibu-ibu di Balik Kemenangan Anies-Sandi Berdasarkan data BPS DKI Jakarta 2016, hampir 20 persen penduduk Jakarta adalah ibu rumah tangga. Itu artinya, di Jakarta ada 1,49 juta perempuan yang fokus mengurus rumah tangga. Ini jumlah yang besar. Wajar jika para ibu-ibu ini menjadi target elektoral dan saat terlibat dalam politik, bisa *all out*. Para ibu jugalah yang membuat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa memenangkan putaran kedua Pilkada DKI. Exit poll dari lembaga riset Indikator Politik Indonesia menemukan hampir 54 persen responden ibu rumah tangga memilih Anies-Sandi, Ahok-Djarot hanya sebagian 46 persen. Berarti, lebih dari separuh 1,49 juta memilih Anies-Sandi¹⁷⁸.

Simpatisan menilai dengan memberikan beberapa akses data bukti bahwa perempuan semua bersikap mau dan siap selalu menjadi partisipasi aktif dengan semua gerakan perempuan yang sesuai dengan pilihan mereka baik di kelompok power of emak emak maupun kelompok srikandi. Ardi

dalam Penanganan Sampah di Sub DAS Cikapundung, Provinsi Jawa Barat”. Jurnal Penyukuhun, 12(2), 105–113, 2016

¹⁷⁸ Lebih luas lihat Aqwam Fiazmi Hanifan, "The Power of Emak-Emak" dalam Politik Jakarta", diakses dari <https://tirto.id/coui>

membuat laporan bahwa Gerakan Emak-Emak Peduli Rakyat (Gempar) berdemonstrasi di depan Mabes Polri di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi bersama Laskar Macan Asia itu mendesak Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut pelaku persekusi Ustaz Abdul Somad yang saat itu ditolak di beberapa tempat saat mengisi ceramah. Kelompok tersebut juga menuntut pemerintahan Jokowi menurunkan harga bahan pokok hingga tarif dasar listrik, di antara barisan emak-emak yang membawa perkakas dapur rumah tangga¹⁷⁹.

Dalam laporan juga didapatkan bahwa perayaan hari perempuan internasional biasanya ditandai dengan aksi *Women's March* secara serentak oleh para perempuan dan aktivis lain yang peduli pada hak-hak perempuan ditandai oleh kecerdasan kedua calon *memframing* para pendukung perempuan dalam balutan istilah-istilah yang lekat dengan perempuan. Pada politik sebelumnya, *framing* seperti ini tidak pernah terjadi. Untuk sebagian menilai bahwa para pendukung ini hanya diarahkan pada hasrat perolehan suara terbanyak saja tanpa dilatih untuk peka pada isu-isu perempuan. Ini artinya juga bahwa istilah Srikandi yang berafiliasi pada perempuan pendukung Jokowi-Ma'ruf dan Emak-Emak yang identik dengan pendukung Prabowo-Sandi bukanlah terjadi secara natural tetapi dibentuk.

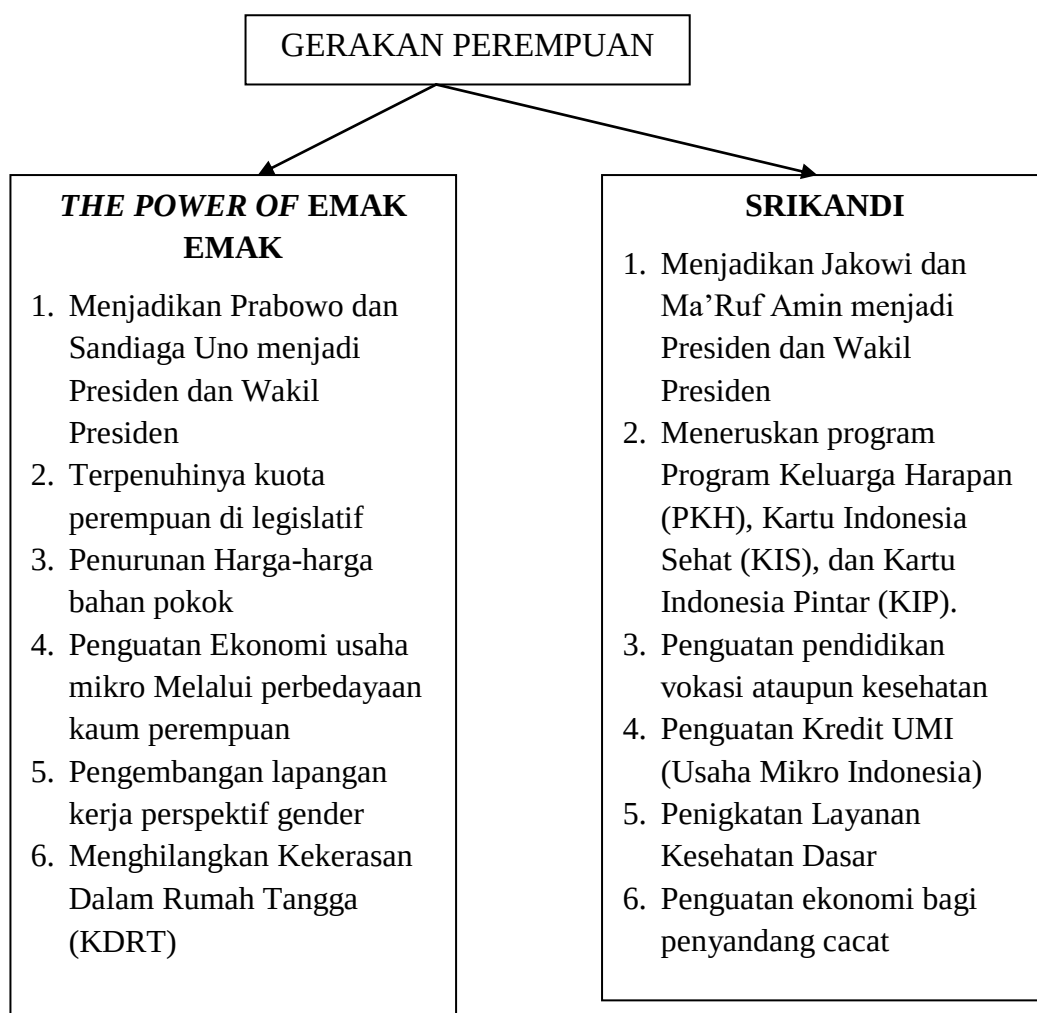
Framing Jokowi-Ma'ruf atas pendukungnya dengan istilah Srikandi maupun ibu bangsa bermakna mencoba memposisikan perempuan juga berdaya layaknya Srikandi. Maka, istilah ini digunakan seolah untuk menganalogikan bahwa perempuan kuat, cerdas, dan berada pada lingkup kelas menengah keatas. Pasangan Prabowo-Sandiaga memilih istilah emak-emak yang mengasosiasikan istilah ini pada makna kemajuan dan mengangkat

¹⁷⁹ Lihat laporan Ardi Sumandoyo, "Emak-Emak 212 dan Jaringan Orde Baru di Belakang Prabowo-Sandiaga", diakses dari <https://tirto.id/diav>

martabat kaum perempuan. Persoalan soal keberpihakan pada isu perempuan menjadi soal lain. Respon simpatisan berkembang dengan pandangan bahwa perempuan tetap diposisikan sebagai orang luar dalam politik (political outsiders). Artinya, mereka hanya menjadi alat meraup suara, tapi ditinggalkan ketika proses pengambilan keputusan terjadi. Selanjutnya dari pandangan partisipan menilai target yang ingin dicapai terhadap gerakan perempuan hasil jawaban tersebut terlihat dari gambar berikut:

GAMBAR 4.3

TARGET GERAKAN PEREMPUAN MASA PEMILU 2019



Dari sisi tersebut memperlihatkan bahwa kelompok partisan perempuan pro-Jokowi memiliki beragam agenda, dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga peluang ekonomi bagi perempuan untuk bekerja dari rumah. Emak-emak Prabowo program mengatasi masalah ekonomi bagi perempuan, dan Problem Kekerasan Dalam rumah Tangga. Pernyataan tersebut memiliki keinginan bersama kaum perempuan dalam gerakan mereka yaitu 1) Penurunan harga papan sandang dan pangan, Mereka percaya bahkan perempuan yang tidak peduli politik akan gagal untuk meminta perubahan ekonomi keluarga; 2) Kesetaraan gender yang di legalkan lewat perundangan dan Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)¹⁸⁰; 3) Terpenuhi kuota perempuan di pengambil kebijakan dan di dewan legislatif. Sementara sebagian lain menilai tidak ada target khusus hanya sekedar memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa kaum perempuan bisa dan mampu berpartisipasi. Konsep yang dilakukan hanya menyebarkannya di lingkungan taklim (kelompok belajar Islam) dan majelis taklim ibu ibu di berbagai masjid. Strategi "kepung" (keliling kampung) menjadi salah satu langkah memberikan pembelajaran politik bagi ibu ibu, disamping *media media sosial on line*¹⁸¹.

Berbeda dengan emak-emak Prabowo-Sandi, kelompok partisan perempuan Jokowi beragam dan terorganisasi secara sporadis. Seperti Perempuan Keren, Energik, Religius Dan Nasionalis (Perempuan KEREN secara eksplisit mengadvokasi pemberdayaan perempuan dan isu-isu

¹⁸⁰Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tengah bergulir di DPR RI. Dalam perdebatan RUU PKS, Gerindra mengambil posisi berlawanan dengan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menolak RUU tersebut, menganggapnya mempromosikan hubungan seks pra-nikah dan hubungan sesama jenis.

¹⁸¹Beberapa hastag yang dipakai selama masa tersebut seperti #PEPESKepung dan #PEPESDatangKelar

berbasis gender. Mereka berpendapat perempuan tidak boleh dibatasi untuk urusan rumah tangga saja. Kelompok lain Sayap Perempuan Bravo 5 memberikan 4 alasan penting ikut menjadi barisan yaitu:

Pertama, Peningkatan dalam layanan kesehatan dasar, terutama untuk kesehatan reproduksi perempuan, membentuk JKN, sistem layanan kesehatan nasional] menyediakan layanan pengiriman gratis termasuk konsultasi sebelum dan sesudah kelahiran. *Kedua*, sistem pendidikan gratis yang menjamin anak perempuan mendapatkan pendidikan dan mencegah pernikahan anak. *Ketiga*, lebih banyak peluang untuk program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan bantuan bagi penyandang cacat melalui Program Keluarga Harapan. *Keempat*, reformasi agraria yang memberi lebih banyak keuntungan bagi perempuan adat. Kelompok yang juga melakukan gerakan di jalur Jakowi dan Amin adalah Pertiwi yang mengusung isu ekonomi dengan mengkampanyekan Mekaar yang membantu akses permodalan dan industri rumah tangga¹⁸².

Berdasarkan penelaahan data dari aspek aktifitas yang ke masalah problem responsif gender sebagai gerakan utama dua calon kepada partisipasi perempuan berdasarkan kajian kedua kubu dimana di era Tahun 1990, UNDP (*United Nations Development Programme*) menambahkan satu indikator baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, jika sebelumnya hanya diukur dengan pertumbuhan GDP (*Growth Domestic Product*) kini ditambah dengan HDI (*Human Development Index*) yang salah satu ukurannya adalah konsep kesetaraan gender (*gender equality*). Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa faktor kesetaraan gender harus selalu diikutkan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan

¹⁸²Dyah Ayu Kartika, "What Will Indonesian Women Win This Election?". Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD Paramadina), 2019

nasional. Perhitungan yang dipakai adalah GDI (*Gender Development Index*), yaitu kesetaraan antara pria dan wanita dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, serta GEM (*Gender Empowerment Measure*), yang mengukur kesetaraan dari partisipasi politik¹⁸³

Berdasarkan hasil data diketahui bahwa tindakan *affirmatif action* yaitu kuota 30 % bagi perempuan Indonesia yang terangkum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terutama Pasal 65 Tahun 2003 memperlihatkan keberhasilan langkah kesetaraan gender. keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan dalam menyelesaikan perdebatan kenyataan historis dan berkelanjutan tentang rendahnya representasi perempuan Indonesia di semua tingkat pengambilan keputusan¹⁸⁴. Selajutnya berkaitan dengan reformasi politik yang bertransisi menuju kehidupan politik yang demokratis telah memperlebar peluang bagi perempuan dan sektor sektor masyarakat lainnya untuk mengekspresikan

¹⁸³ Lihat *Human Development Report*, 1995

¹⁸⁴ Di parlemen nasional, perwakilan perempuan hanya 9.2 persen dari total anggota parlemen, jauh lebih rendah dari 'rekor' periode sebelumnya, yakni 12.5 persen. Sebelum Pemilihan Umum 2009, pemerintah bersama DPR kembali melakukan perubahan dan mensahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi yaitu: *Pertama*: UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai pengganti Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Partai Politik. Dalam konsideran secara tegas dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. UU ini secara signifikan mendukung keterwakilan perempuan dalam partai politik, hal itu jelas dinyatakan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris dan pendirian dan pembentukan Partai Politik tersebut menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Ketentuan ini merupakan tindakan afirmasi untuk mendorong percepatan partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia. Hal yang sama pernah dinyatakan pada ayat (1) Pasal 65 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa "setiap partai politik yang berpartisipasi dapat mengajukan calon untuk DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk setiap daerah pemilihan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

pandangan mereka serta merumuskan dan menyuarakan tuntutan mereka tentang kesadaran dan kepekaan gender yang lebih besar di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, legislasi, dan politik pemilu. Berhubungan dengan krisis ekonomi tahun 1997 yang menyulut maraknya tuntutan pada representasi perempuan di semua tingkatan dan seluruh aspek kehidupan politik. Krisis itu telah memperburuk kondisi hidup kaum perempuan, sehingga mendorong mereka bangkit menyuarakan kebutuhan mereka, sekaligus mempertahankan hak-haknya¹⁸⁵.

Dalam kajian atas Peraturan Yang Menjamin Hak Perempuan Dalam Politik mereka tafsirkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), menyatakan secara tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap warga negara baik laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang setara dalam segala bentuk kehidupan di masyarakat, termasuk dalam kegiatan politik¹⁸⁶.

¹⁸⁵Hasil rangkuman Ruth Lister (2003) dari berbagai gagasan para sarjana feminis mengenai peran warga negara, terutama hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan partisipasi politik. Seperti juga di Indonesia, perempuan dianggap sebagai warga negara, tanpa pembedaan yang tersurat dalam hak dan kewajiban dengan warga negara laki-laki. Akan tetapi yang penting adalah untuk membedakan antara peran aktif dan peran pasif sebagai warga negara. Lister menyitir Mary Dietz yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah terminologi yang menjadi lawan peran pasif warga negara sebagai 'pemilik hak'. Partisipasi politik berarti secara aktif melakukan sesuatu dalam kaitan dengan kewajiban sebagai warga negara, yakni mempengaruhi kebijakan publik. Lister mengutip Diemut Bubeck yang menyarankan bahwa kerja domestik dan pengasuhan seharusnya juga menjadi kewajiban warga negara, sehingga beban kerja ini tidak hanya diletakkan pada pundak perempuan dan menghalangi perempuan memiliki ruang kemungkinan yang lebih luas untuk bergerak, tanpa dihalangi kewajiban kultural sebagai pengurus ranah domestik yang dibebankan kepadanya. Disamping itu Lebih luas lihat anoname, "Partisipasi Perempuan dalam Politik di Indonesia". IDEA, 2003. h. 3.

¹⁸⁶ Jaminan lain dalam Konstitusi, diantaranya dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain dalam UUD 1945, hak-hak warga negara untuk berpartisipasi dalam melaksanakan demokrasi juga diatur dalam UU Politik, UU Pemilihan Umum, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemerintah Daerah dan peraturan-peraturan

Bentuk Partisipasi politik perempuan adalah 1) pemberi suara para perempuan mendapatkan data informasi melalui media seperti media elektronik dan media cetak, namun ada juga perempuan yang mendapatkan informasi tentang pilihan politik melalui diskusi-diskusi informal dan himbauan dari tokoh-tokoh partai politik. Dalam memberikan suara perempuan mendatangi tempat pemungutan suara dimana mereka terdaftar sebagai pemilih. Inilah letak perbedaan dalam sistem pemberian suara dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu setiap pemilih benar-benar tercatat sebagai individu yang memiliki hak pilih dalam daftar pemilih tetap¹⁸⁷; 2) Mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan setiap pemilih dapat memilih dengan bebas partai sekaligus calon yang dianggap sesuai bagi harapan mereka; 3) Menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum; 4) menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum; 5) menjadi anggota partai politik; 6) Menjadi tim sukseksi pasangan calon; 7) menguatkan gerakan yang mereka bentuk dan atau diikuti

lainnya telah dibentuk sejak tahun 1999, namun setiap periode pemilihan umum yang baru selalu dilakukan penyempurnaan pada setiap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

¹⁸⁷ Secara nasional, sejak pemilu tahun 1955, unsur perempuan selalu terwakili di DPR dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), persentase keterwakilan mereka sangat minim. Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi wanita Indonesia dalam upaya memperluas peran publik mereka, khususnya dalam politik. Dalam forum ini organisasi-organisasi perempuan dari berbagai kelompok etnis, agama dan bahasa dipersatukan. Kemunculan dan perkembangan organisasi-organisasi ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas diri perempuan, seperti meningkatkan kemampuan manajemen, memperluas wawasan, dan mengembangkan jaringan. Dalam konteks politik, organisasi-organisasi yang melatih dan meningkatkan kapasitas diri perempuan ini merupakan jaringan yang efektif untuk merekrut kandidat anggota legislatif. Pada pemilihan umum pertama, tahun 1955, beberapa calon anggota legislatif perempuan merupakan anggota organisasi perempuan yang berafiliasi pada partai. Pada pemilu berikutnya, ada kecenderungan bahwa kandidat anggota legislatif berasal dari kalangan pimpinan organisasi-organisasi perempuan yang bernaung di bawah partai atau berafiliasi dengan partai.

D. Dampak Gerakan Perempuan Dalam Pemilu Terhadap Perkembangan Struktur Gender Dalam Kepemimpin Indonesia Masa Depan

Hasil penelaahan data diawali dengan faktor yang mempengaruhi pola seleksi antara laki-laki dan perempuan sebagai anggota legislatif dan dampak yang muncul, antara lain, *Pertama* asas patriarkal yang masih kuat mengakar dengan sikap pantas dan atau tidak pantas, dimana arena politik pantas untuk laki-laki, dan tidaklah pantas bagi Perempuan untuk menjadi anggota parlemen; *Kedua*, Tim seleksi para kandidat dilakukan oleh tim yang kesemuanya laki laki dimana ada pandangan bahwa kesadaran mengenai kesetaraan gender dan keadilan masih rendah, dampaknya proporsionalitas tidak terjadi di politik partai, sehingga perempuan tidak memperoleh banyak dukungan dari partai-partai politik karena struktur kepemimpinannya didominasi oleh kaum laki-laki.

Ketiga, Representasi perempuan dalam parlemen tidak dipahami sehingga media tidak media tidak terlalu responsif atas keadaan mereka tersebut; *Keempat*, jaringan organisasi sosial politik perempuan belum memberikan berbagai kontribusi real dalam memperjuangkan representasi perempuan, disamping Lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk belum memberikan kajian komperhensif atas pengarusutamaan gender disemua sektor kehidupan; *Kelima*, Kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan memberikan kecendrungan terlibat dalam usaha pembelaan atau memilih peran-peran yang non-partisan dengan berbagai pertimbangan¹⁸⁸.

¹⁸⁸ Analisis data Wawancara, 2020

GAMBAR 4.3
RESPON ATAS POLA SELEKSI PERSPEKTIF GENDER DI RANAH
PEMILIHAN LEGISLATIF



Sumber: Analisis data, 2020

Pada respon pernyataan bahwa “meningkatnya kuota anggota legislatif dari kalangan perempuan akibat gerakan perempuan dalam pemilu 2019”, para partisipan memberikan penilaian berbeda beda yang dikatagorikan dalam tiga deskripsi jawaban yaitu¹⁸⁹:

Pertama, setuju atas pernyataan tersebut, karena aktifitas perempuan dalam pergerakan menyuarakan aspirasi kaum perempuan. Hal tersebut dilihat dari indikator pemberian ruang perempuan untuk mendialogkan aspirasinya. Salah satu yang dicontohkan dari ungkapan salah satu calon

¹⁸⁹ Analisis deskriptif pernyataan partisipan penelitian atas statemen soal, 2020

legislatif perempuan dari Partai Golkar. Christina Aryani dihadapan kaum perempuan bahwa 1) adanya keinginan mengawal kepentingan perempuan, kepentingan dan perlindungan anak dan kaum marginal; 2) mengawal proses legislasi dan pembuatan Pasal yang bisa merugikan ke ranah responsif gender, sehingga perempuan tidak lagi termarginalkan.

Kedua, penilaian hanya pada salah satu akibat saja, sebab agenda gerakan kaum perempuan sebagai gerakan sayap yang tidak memiliki dampak penting. ketika proses penghitungan suara selesai memang meningkatnya jumlah perempuan yang lolos ke DPR RI dari 17,3% pada Pemilu 2014 menjadi 20,4% pada Pemilu 2019. Dari sisi lain tidak semua perempuan yang lolos secara tegas memiliki perspektif gender, beberapa bahkan menyatakan diri mereka anti-feminis. Watak patriarkal di partai politik Indonesia dan pergeseran masyarakat ke arah yang lebih konservatif, menambah rintangan dalam advokasi kebijakan gender yang lebih progresif. Karena itu partisipan menilai tidak sederhana membangun indikator keberhasilan gerakan perempuan dengan peningkatan perolehan suara perempuan di legislatif.

Ketiga partisipan yang menjawab tidak terlalu punya arti, karena gerakan mereka hanya untuk memberikan eksistensi keberadaan mereka pada salah satu pasangan calon presiden, atau partisipasi-simpatian atas salah satu calon yang ditawarkan. Disamping itu mereka menilai bahwa gerakan perempuan tersebut relatif rapuh, pelaku dan simpatian bertambah dalam gerakan perempuan, namun gerakan mereka kurang solid dan memiliki masalah dalam melibatkan individu dan komunitas akar rumput.

Selanjutnya jawaban partisipan atas pertanyaan “Apakah dengan keikutsertaan perempuan melalui media pergerakan masing masing dapat memberikan perhatian pada agenda pasangan calon presiden setelah

terpilih? Terbgai dalam beberapa pandangan seperti dideskripsikan sebagai berikut¹⁹⁰: *Pertama*, Bisa menjadi perhatian bagi presiden dan wakil presiden terpilih dan dibuktikan dengan agenda agenda kementerian yang konsisten dan meningkat terhadap kualitas kesetaraan gender; *Kedua*, Tidak ada yang memberikan perhatian, sebab setelah pemilu 2019, apa yang diperjuangkan perempuan hanya sebatas wacana, yang ada mengembangkan apa yang sudah ada saja; *Ketiga*. Penilaian bukan masalah diperhatikan atau tidak diperhatikan, dalam penilaian keikut sertaan perempuan dalam gerakan politik praktis menunjukkan bahwa perempuan sudah peka atas konsep responsif gender.

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu yang selalu menjadi perhatian. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Sejak tahun 2002, mayoritas para aktivis politik, tokoh-tokoh perempuan dalam partai politik, kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) setuju akan perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. kebutuhan hal tersebut berdasarkan dari nilai kesadaran bahwa semua prioritas dan agenda politik harus dideskontruksi dari sistem politik tradisional. Ini artinya kaum perempuan dapat tampil memegang berbagai posisi publik jika membangun nilai nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Kehadiran mereka di ranah kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 untuk menegaskan bahwa keterwakilan politik perempuan berarti juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan- keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan

¹⁹⁰ Analisis deskriptif pernyataan partisipan penelitian atas statemen soal, 2020

berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Secara umum Banyak LSM seperti Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), Jaringan Perempuan dan Politik (JPP), dan Solidaritas Perempuan (SP); semuanya bekerja keras untuk memberdayakan kaum perempuan. LSM-LSM memiliki jaringan yang luas dan aktivitas mereka menembus batas-batas wilayah, baik provinsi maupun daerah tingkat satu di Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan partisipasi mereka sangat bergantung pada kemauan partai politik untuk merekrut ‘perempuan-perempuan potensial’ yang berasal dari luar basis tradisional mereka¹⁹¹.

Dari konstruksi teori Fungsionalisme maupun teori nature berkesinambungan dengan dampak gerakan politik perempuan yang sejalan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Indonesia. seperti dijelaskan bahwa GBHN tersebut menegaskan bahwa partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata. Adanya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan, sering dikaitkan dengan upaya menumbuhkan rasa memiliki ("*sense of ownership*" atau "*sense of belonging*") terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan adanya rasa memiliki ini pada gilirannya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*). Dari aspek tersebut maka pembangunan pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan ke- makmuran kepada semua masyarakat, kepada laki-laki

¹⁹¹ Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results.*" Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "*Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.*"

maupun perempuan, kepada yang kaya maupun yang miskin.

Dampak gerakan tersebut dalam kajian tambahan partisipan penelitian menyatakan bahwa salah satu misi Islam adalah pembebasan manusia dari berbagai bentuk anarki dan ketidakadilan. Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan terutama golongan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan¹⁹². Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. Rasulullah juga

¹⁹²Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. Rasulullah juga mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil (*equity*) dan setara (*equality*) dalam hak, kesempatan dan hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan, dengan kondisi saling mendukung/ melengkapi dan saling menghormati/ menghargai. Kesetaraan gender: Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Bias gender disebabkan penafsiran atas perempuan dipandang inferior dengan landasan tafsir yang mengandung bias misoginis. Hal tersebut dapat jadi karena adanya beberapa hal, antara lain ialah sebagai berikut: (1) Pemahaman terhadap pengertian gender dan seks dalam mendefinisikan peran seringkali belum pas. (2) Metode penafsiran yang selama ini digunakan, masih banyak mengacu pada pendekatan tekstual, bukan kontekstual; sebagai konsekuensi qaidah ushul yang biasa dijadikan pegangan jumhur ulama tafsir (*al ibrah bi umum al lafdzi, la bi khusus as sabab*), (3) Umumnya mufassir adalah kaum laki-laki, (4) Banyak dikesankan bahwa kitab suci al-Qur'an banyak memihak laki-laki dan mendukung sistem patriarkhi, yang oleh kalangan feminis dipandang bisa merugikan perempuan, dan (5) Pengaruh kisah Israiliyat yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah. Bias gender tidak hanya terjadi dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat, melainkan juga muncul dalam pemahaman hadis Nabi Muhammad. Bahkan, bias gender juga ditemukan dalam penafsiran banyak literatur Islam klasik (kitab kuning), terutama dalam penafsiran kitab-kitab fiqh yang pada umumnya sering dianggap mutlak kebenarannya, ini artinya. pandangan yang menginterpretasikan bahwa Islam menganggap wanita itu lemah, tidak cerdas, tidak layak menjadi pemimpin, derajat wanita di bawah tingkatan laki-laki, dan pandangan-pandangan lain yang meminggirkan wanita pada dasarnya karena kesalahan dalam menginterpretasikan teks-teks agama yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, penafsiran ini perlu diluruskan dan perlu dicarikan solusinya, atau dengan kata lain, perlu adanya reinterpretasi Lihat: Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010, h. 2; perbandingan lihat juga Khariri, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita", Ying-Yang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak., STAIN Purwokerto, Vol. 4 (1) 1, 2009; Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 268-290.

mengajarkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada masa *jahiliyyah* perempuan sempat mendapatkan perlakuan bias gender seperti: diperkosa, simpanan laki-laki, beban ganda, kekerasan nafsu laki-laki, dan sebagainya. Setelah Islam datang, laki-laki posisinya setara dengan perempuan. Beberapa perempuan pada masa Rasulullah Saw dan para shabat yang bekerja.

Beberapa menjadi sejarah seperti Ummu Satim binti Malhan yang merias pengantin antara lain: Shafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad. Bahkan istri Nabi Muhammad Zainab binti Jahezy juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau bersedekah. Selain itu, Siti Khatijah juga sebagai *bisnis woman*. Raithah, istri sahabat Nabi, Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Bahkan pada masa Raja Sulaiman, Ratu Bilqis menjadi sudah menjadi Ratu satu jagad dunia. Prinsip dasar kesetaraan seperti dideskripsikan sebagai berikut: (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. al-Hujurat 13), (2) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah (QS. al-Baqarah: 30), (3) Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (QS. al-A'râf: 172), (4) Adam dan Hawa adalah aktor yang sama-sama aktif terlibat dalam drama kosmis (QS. al-A'raf: 22), dan (5) Laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya (QS. al-Nahl: 97). Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Menurut Asghar, al-Qur'an lah yang pertama kali memberikan mereka (perempuan) hak-hak yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam aturan yang legal¹⁹³.

¹⁹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta:

Islam sendiri bukan agama patriarki yang merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan lelaki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk meng- gambarkan sistem sosial dimana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa Gerakan Kaum Perempuan Indonesia Pada Pemilu 2019 mereka menunjukkan berbagai sikap yang pada khususnya menegaskan bahwa gerakan perempuan masa pemilu untuk menjelaskan jati diri bahwa kaum perempuan dapat ditampilkan sebagai bagian dari proses perpolitikan di Indonesia, bukan hanya sekedar kasur sumur dan dapur. Alasan mereka untuk menyuarakan program *Three Ends* (Akhir kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Akhir Perdagangan Manusia. Akhir Kesenjangan Ekonomi bagi Perempuan. Mereka juga menegaskan alasan bahwa partisipasi aktif perempuan baik dari sebutan emak emak maupun Srikandi adalah menyuarakan *Three Ends* (Akhir kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Akhir Perdagangan Manusia. Akhir Kesenjangan Ekonomi bagi Perempuan). Alasan lain Menyuarakan kekecewaan rendahnya kuota perempuan di Legislatif wujud dari Adanya perlakuan historis (perbudakan dan penindasan) menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama mencapai aspirasi mereka selama beberapa generasi

Ciri, dan Target Gerakan Perempuan pada Masing Masing Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilu 2019 memiliki mata rantai yang sama tapi berbeda ciri mereka terkoordinir dan seporadis dengan target peningkatan kuota perempuan di legislatif, penurunan harga barang pokok dan peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Dampak yang terlihat adalah peningkatan pemahaman politik kaum perempuan yang selama ini masih dalam kajian marginalisasi, penguatan

pengambil kebijakan dari kaum perempuan untuk memperjuangkan aspirasi mereka, sebagai bagian oposisi ekstra parlementer untuk mengingatkan janji janji presiden dan wakil presiden.

B. Rekomendasi

Gerakan politik kaum perempuan pada pemilu 2019 merupakan bagian dari komunikasi politik yang terus dapat dilaksanakan sebagai proses pendidikan politik. Konsep emak emak maupun srikandi sebaiknya bukan hanya sekedar jargon ueporia sesaat, tapi menjadi dasar peningkatan kualitas perempuan untuk menguatkan partisipasi politik. Berbagai bantuan pasca pemilu yang diberikan oleh presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih perlu menjadi starting point untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan disemua sektor kehidupan dan sekaligus sebagai bagian dari pendidikan anak perempuan pada generasi berikutnya.

Adanya benturan budaya bukan menjadi sebuah batu sandungan namun menjadi bagian dari strategi membangun kesadaran untuk semua dimasa yang akan datang dimainkan perempuan-perempuan melalui berbagai macam saluran baik dengan menyampaikan pesan-pesan politik dengan aktif di berbagai sistem politik, seperti partai politik, legislatif, organisasi masyarakat dan lainnya. Sebagai komunikator politik, perempuan tidak banyak yang terlibat dalam struktur organisasi partai politik atau pun menjadi anggota legislatif. Selanjutnya tipologi komunikator politik perempuan, bisa diklasifikasikan menjadi perempuan sebagai politisi, perempuan sebagai komunikator profesional, dan perempuan sebagai aktivis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1987
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009 cet.1
- Ali Engineer, Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Jogjakarta: Benteng, 1990
- Alih Nugroho, *Relasi Industrial pada Pasar Tenaga Kerja Fleksibel dan Perjuangan Buruh Menuntut Upah Layak serta Jaminan Kerja di Kawasan Industri Bekasi*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2017
- Ambarsari, Dwi, *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan* , Cet. I, Surakarta: Patti, 2002
- Ananda Ara, Faisar, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010
- Anas Qasim Ja'far, Muhammad, *Mengembalikan hak-hak politik perempuan sebuah perspektif Islam*. Jakarta: Azan. 2001
- Anwar, Yozar, *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Yayasan Sumpah Pemuda, 1990
- Ayu Kartika, Dyah, *"What Will Indonesian Women Win This Election?"*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD Paramadina), 2019
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Bakar M. Luddin, Abu, *Konseling: Teori dan Praktek*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010
- Basrowi dan Sukidin. *Teori-Teori Perlawanan Dan Kekerasan Kolektif*. Surabaya: Insan Cendikia, 2003
- Berger, Peter dan Thomas Luckmann, *The Social Contruction of Reality: ATreatise in the Sociology of Knoelage*, New York: Penguin Books, 2000

- Bhasin, Hmala dan Nighat Said Khan, *Persoalan-Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Jakarta: Gramedia dan Yayasan Kalyanamitra, 2006
- Blackburn, Susan, *Woman and the State in Modern Indonesia*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2004
- Bogdaner, Vernon (ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Political Science*, Oxford, Blackwell, 1993
- D.W.Rossides, *The History and Nature of Sociological Theory*, Boston: Houghton Mifflin, 1978
- Della, Donatella Porta dan Mario Diani, *Social Movements: An Introduction*, 2nd Edition, London: Wiley-Blackwell, 2005
- Donatella della Porta, Mario Diani, *Social Movements: An Introduction*, 2nd Edition, England: Wiley-Blackwell, 2008
- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, Jakarta: Bina Aksara, 2000
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, “Problema Peningkatan Sumber Daya Perempuan”, dalam E.D. Binar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesian dan Kemodernan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998
- E. Tamburaka, Rustam. *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat, Dan Politik*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2006
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Eleonora Wieringa, Saskia, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Garba Budaya dan Kalyanamitra*, Jakarta, 1999
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IX, 2005
- Fauzi, Ikhwan, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender* (Cet. I; Bandung: Amzah, 2002)
- Fenichel Pitkin, Hanna, *The Concept Of Represtation*, Barkeley: University Of California, 1972
- Fraser, Nancy, *Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory*, USA: University of Minnesota Press, 2005

- Geertz, Clifford,, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, terj. Aswab Mahasin, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981
- Gherardi, *Gender, Symbolism, and Organizational Cultures*, London: Sage, 1995, lihat juga Nasaruddin Umar, “Teologi Reproduksi”, dalam Sri Suhandjati (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Jogjakarta: Gama Media. 2000
- Hafidz, Wardah, “Sumbangan Gerakan Perempuan Dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia, Dalam Suntingan Fauzi Ridjal, et el, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000
- Handayanirakat, Trisakti, *Memperjuangkan Hak Asasi Perempuan*, dalam Suara Wanita, Malang: Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan. Universitas Muhammadiyah Malang. 2008
- Hartono A. Jais, *Polemik Presiden Wanita* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)
- Heywood, Andrew, *Global Politics*, London: Macmillan, UK
- Humm, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2002
- Huntington, Samuel,. *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth*, 2006
- I Ophelia dan Evi Nmanai Khartawangsa, *Sukses Finansial Lewat Astrologi Dan Peta Kehidupan*, Jakarta : Buku Kompas, 2010
- Indiah Rahayu, Ruth, “Konsstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari tutur Perempuan”, Hasil penelitian Historiografi Nasional. 2007
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Gaung Persada, 2009, cet.1
- Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach, Quintan Wicktorowick, 2007
- Jayawardena, Kumari, *Feminism and Nationalism in The Third World*, London: Zed Book, 2000
- Ju Lan, Thung, Musiana Adenan, Yasmin Sungkar, Eko Widodo, Yo Paramitha Abdurachman Perempuan yang Mendahului Zaman: In Search of Living Tradition and Act, Jakarta: Yayasan Obor, 2010

- Junaidi, Heri, *Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Masyarakat Pesisir Laut Sungsang, Kabupaten Banyuasin II Sumatera Selatan*, Palembang: Rapah Press, 2017
- Junaidi, Heri, *Temu Kenali Metode Penelitian Kualitatif*, Palembang: UIN RF, 2018
- Junaidi, Heri, *Wong Kito Galo: Penelusuran gerakan Pluralisme di Sumatera Selatan*, Palembang: Refah Press, 2012
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita, Mengenal Gadis Remaja dan wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 2004
- Kurniawan, Deni. *Kamus Istilah Politik Dan Kewarganegaraan*. Bandung: Yramawidia, 2006
- Laswell, Harold, *Propaganda Technique in The world War*. India: Gueere Mundela, 2013
- Lesser Blumberg, Rae, *Gender, Family and Economy: The Triple Overlap*, London: Sage Publication, 2010
- Lidya, Eva, “Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berwawasan Gender”, *Artikel Umum*, Bulletin Bakohumas Kota Palembang, 2003
- M. Echols, Jhon dan Hassan Shadily, *an English – Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1993
- M.Muhyiddin dan Abdul Latif Subki, *al-Muhtâr Min Sihhatu al-Lughah*, Beirut: Dar al-Suur, 1934
- Madjid, Nurcholish, *Membangun Oposisi Menjaga Momentum Demokratisasi*, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2000
- Manzûr, Ibnu, *Lisân al-Arab*, juz 9, Beirut: Dâr al-Fikr, 200.
- Mariana, Anna, *Perbudakan Seksual “Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru”*, Jogjakarta: Marjin Kiri, 2015
- Miriam, Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung : Mizan, 2000
- Moss Kanter, Rosabeth, *Men and Women of The Corporation* New York: Basic Books, 2005
- Muhammad Ziyadah, Asma, *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

- Muhammad, Hussein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2009
- Mujiburrahman, *Mengislamkan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008
- Muslikhati, Siti., *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan. Islam*, Jakarta: Gema Insani, Jakarta 2004
- Muthahari, Murtadlo. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995
- Nope, Marselina, *Jerat Kapitalisme Atas Perempuan*. Yogyakarta: Resist Book, 2005
- Nurani, Farida, *Buruh Migran Perempuan: Afiriasi Kebijakan Bagi Kaum Marginal*, Malang: Universitas Brawijaya, 2017
- Nuryanti, Reni, Bachtiar Akob, *Perempuan Dalam Historiografi Indonesia (Eksistensi Dan Dominasi)*, Jogjakarta: deepublish, 2019
- Pals, D. L. *Seven Theories of Religion (Terjemahan)*. Yogyakarta: Penerbit Qalam. 2001
- Peters, B.Guy, *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge, 2002
- Prithi Kumar, Raj, *Nature and scope of political science*, tp: Discovery Publishing, 2005
- Purwanto, Bambang, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris*, Jogjakarta: Ombak, 2006
- R. Hadiz, Vedi, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* yang diterbitkan oleh Cambridge University Press, 2016
- Rizkiyansyah, F. K. *Mengenal Pemilu Menatap Demokrasi*. Bandung: IDEA. Publishing, 2007
- Robertson, David, *Dictionary of Politics*, England: Penguin Book, 1993,
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender Dan Feminisme, Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Garuda Wacana, 2016
- Ross dan Rothman, *Theory And prachitice in Ethnic Conflict of Management*, USA: Academic Press, 2010
- Röttger-Rössler, Birgitt, Jan Slaby, *Affect in Relation: Families, Places, Technologies*, New York: Routladge, 2018

- Ruhaini Dzuhayatin, Siti, "Problema Peningkatan Sumber Daya Perempuan", dalam E.D. Bainar, *Wacana Perempuan Dalam Keindonesian dan Kemodernan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998
- Rusnila, *Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Islam*, Pontianak: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
- S Handayani, Christina dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Jogjakarta: LkiS, 2011, cet. III
- S. Wieringa, *Sexual Politics in Indonesia*, London: Plagrave Micmilan and ISS, 2002
- Saltzman Chafez, Janet, "The Gender Division of Labor and The Reproduction of Disatvantage: Toward an Integreted Theory," dalam Rase Lesser Blumberg (ed), *Gender Family and Economy*, London : Sage Publications, 2009
- Samuel Huntington, *The thrid wave of Democratization in the late twientieth century*, London, University of Oklohoma Press, 1991
- Setiawan, Hersri, *Kamus Gestok*, Jogjakarta: Galang Press, 2003
- Soltau, Roger, *Introduction to Politics*, London: Longman Green
- Subhan, Zaitunah, *Perempuan dan Politik dalam Islam* , Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010
- Subhan, Zaitunah, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004
- Sukarno, *Sarinah*, Bandung: terbitan Syabas Books, 2012
- Surbakti, Ramlan,. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010
- Suryakusumma, Julia, *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu, 2011
- Umar , Nasaruddin, "Teologi Reproduksi", dalam Sri Suhandjati (ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Jogjakarta: Gama Media, 2002
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001

van Velzev, Anita, *“Who’s the Boss?: Marginalisation and power in Food-Processing Household Enterprises, West Java, Indonesia”* ,
Desertasi Doktor, University of Amsterdam, 1994

Wahyu, Kamus Sosiologi, Surabaya: Victory Inti Cpta, 2014

Wahyuni, Sri, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*, Jogjakarta:
Gafurapublishing, 2014

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al Munawwir*, Jogjakarta: Unit
Pengadaan buku Ilmiah al-Munawwir, 1984

Yanti Siahaan, Asima, “Decentralisation in Indonesia: Bringing Governance to Women.” Paper Presented at DevNet Conference, Massey University, New Zealand, 2002

Young, Oran, *System Of Political Analysis*, Englewood, New Jersey: New Jersey University Press, 1968

Jurnal

Farhah, “Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam, *Jurnal Dauliyah*,
Volume 4, Nomor 2, Juli 2019, h. 22

Gills, Barry dan Joel Rocamora, “Low Intensity Democracy”, *Third World Quarterly*, Vol. 13. No, 3, h. 501-523

Hardjaloka, Loura, “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi”, *Jurnal Konstitusi*,
Volume 9, Nomor 2, Juni 2012

Hardjaloka, Loura, “Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi”, *Jurnal Konstitusi*,
Volume 9, Nomor 2, Juni 2012

Irma Sakina, Ade dan Dessy Hasanah”Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia”*Social Work Jurnal*, VOLUME: 7. NO. 1, 2018

Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan”, *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, vol. 1.
Nomor. 2, Desember 2014, h. 165

Khariri, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita”, Ying-Yang: *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak.*, STAIN Purwokerto, Vol. 4 (1) 1, 2009

- Khatimah, Khusnul, “Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Pada Sektor Pekerjaan, *Jurnal YINYANG*, Vol.4 No.1 Jan-Jun 2009, h. 158-180
- M. Thahir Maloko, “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Tinjauan Alqur’an Dan Hadis, *Jurnal AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013*
- Muhammad, “Akuntabilitas Pengawasan Pemilu Yang Berkualitas Dan Beradab”, dalam *ADIL, Jurnal Hukum*. Volume. 3 Nomor..1. h. 125
- Mulia dan Anik, 2019 dikutip dari Yusuf Fadli, “Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, No. 1, April 2019, h. 41-63
- Ni Nyoman Rahmawati, “Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender (Kajian Budaya, Tradisi, dan Agama Hindu)” .*Jurnal Studi Kultural* Volume 1 No. 1 Januari 2016
- Saskia Wieringa, “Two Indonesian Women’s Organization: Gerwani and PKK, *Bulletin of concerned Asian Scholars*, Vol 25. No. 2
- Setyaningrum, Arie, “Memetakan Lokasi bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial”, *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edisi 2, 2005, hlm. 19
- Very Wahyudi, Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender, *Politea, Jurnal Politik Islam*, Vol. 1No,1 (Jan-Jun) 2018, h. 63
- Wasisto Raharjo Jati, “Historitas Politik Perempuan Indonesia”, *Jurnal Paramita* Vol. 24, No. 2 - Juli 2014
- Wiji Rahayu, Angger, “Perempuan Dan Belenggu Peran Kultural”, *Jurnal Perempuan*, edisi 29 Januari 2015
- Yusuf Fadli, “Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, 2017

Web

<http://cakrawikara.id>

<http://etd.repository.ugm.ac.id>

<https://lektur.id>

<https://www.kompas.com>

<https://www.puskapol.ui.ac.id>

Mudjia Rahardjo, “Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif”, www.uin-malang.ac.id

news.detik.com

theconversation.com

[www. Kamusbesar.com](http://www.Kamusbesar.com)

www.antaranews.com

www.ipu.org.

www.pinterpolitik.com

www.wri.or.id/editoria

INDEKS

A

agama, 5, 30, 39, 65, 68, 69, 70,
71, 74, 79, 80, 81, 82, 90, 100,
102, 117, 142, 148, 149, 158,
164, 166
Allah, 8, 15, 26, 27
Al-Quran, 27, 32
argumentasi, 46
aspek, 12, 37, 45, 47, 54, 80, 81,
85, 87, 101, 107, 109, 112, 138,
141, 145, 155, 157, 163, 164

B

bahasa, 21, 22, 24, 25, 31, 38, 39,
49, 51, 60, 72, 76, 97, 140, 149,
158
Betawi, 140
budaya, 1, 5, 30, 31, 42, 43, 47,
48, 76, 78, 79, 80, 81, 92, 97,
98, 100, 101, 103, 108, 109,
112, 117, 118, 147, 166, 168

D

demokrasi, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13,
17, 18, 20, 32, 33, 34, 46, 58,
62, 78, 91, 93, 138, 156, 157
Demokrasi, 3, 11, 14, 18, 34, 53,
63, 68, 78, 135, 136, 141, 155,
163, 169, 173
demokratisasi, 2, 4, 95
demonstrasi, 22, 139, 151
derajat, 3, 15, 27, 164

Dinamika, 13, 20, 117, 171
dominasi, 2, 62, 70, 80, 85, 142

E

ekonomi, 4, 9, 10, 25, 43, 53, 54,
57, 66, 76, 80, 94, 98, 101, 103,
106, 107, 109, 118, 143, 146,
154, 155, 157, 162, 166, 190,
194
emek emak, 1, 4, 16, 40, 139, 140,
142, 144, 146, 148, 150, 151,
167, 168
emansipasi, 3, 14, 42, 73, 76, 84,
136

F

feminis, 26, 30, 61, 117, 118, 139,
142, 143, 149, 157, 161, 164
fuqaha, 29, 69, 142

G

gender, 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 19,
30, 31, 44, 46, 47, 48, 54, 70,
85, 87, 89, 92, 94, 95, 97, 98,
99, 100, 101, 103, 105, 106,
108, 110, 112, 116, 136, 139,
141, 142, 144, 146, 147, 154,
155, 156, 159, 161, 162, 163,
164, 165
generalisasi, 19

H

Hadist, 29

historis,, 5

I

Ibu, 73, 75, 141, 151

Indonesia, 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 104, 105, 106, 108, 109, 116, 117, 118, 121, 126, 136, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 149, 151, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 187, 189, 190, 193, 194

Instrumen, 42

Islam, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 20, 24, 25, 27, 31, 39, 46, 50, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 80, 82, 83, 109, 112, 116, 126, 142, 149, 154, 164, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193

istri, 9, 58, 75, 77, 81, 82, 83, 99, 113, 145, 146, 165

J

jaringan, 44, 45, 54, 107, 140, 149, 158, 159, 163

K

kehidupan, 3, 6, 7, 21, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 59, 68, 69, 70, 71, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 94, 101, 103, 104, 105, 108, 110, 112, 117, 119, 141, 144, 156, 157, 159, 164, 166, 168, 190

kelompok, 2, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 38, 39, 47, 53, 58, 65, 66, 68, 74, 86, 97, 103, 107, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 150, 151, 154, 158, 162, 166

kodrat, 10, 27, 30, 31, 60, 109, 147

Konstruksi, 1, 10, 26, 55, 71, 92, 106, 148, 174

kritis, 9, 45, 47, 49, 52, 53, 54

kuantitas, 21, 110, 111, 119, 149

kuasa, 42, 66, 97

kultural, 25, 30, 31, 42, 44, 47, 117, 139, 157

L

laki-laki, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 42, 47, 49, 50, 57, 61, 69, 71, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 138, 139, 142, 143, 157, 159, 163, 164, 165, 166

Lembaga, 18, 51, 53, 55, 93, 117,
135, 136, 141, 159, 162, 187,
194

M

manusia, 5, 15, 16, 26, 27, 32, 39,
43, 46, 54, 57, 68, 79, 83, 85,
94, 112, 117, 142, 156, 163,
164
manuver, 2
masyarakat, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 21, 22, 23, 24, 32, 37, 38,
40, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 60,
61, 62, 65, 66, 68, 76, 79, 80,
87, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 101,
102, 104, 107, 108, 109, 112,
113, 117, 118, 141, 142, 143,
144, 146, 154, 156, 157, 159,
161, 162, 163, 164, 168
media, 16, 18, 22, 23, 51, 63, 135,
148, 150, 154, 158, 159, 161,
188
mobilisasi, 10, 45, 46, 52, 69, 149
mutualisme, 14

N

negara, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14,
23, 32, 33, 34, 35, 37, 45, 46,
48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59,
61, 62, 66, 71, 72, 75, 78, 84,
89, 92, 95, 110, 113, 114, 137,
138, 146, 147, 149, 155, 156,
157, 186
Negara, 14, 22, 23, 24, 33, 35, 51,
54, 55, 59, 66, 68, 70, 75, 78,

87, 120, 124, 156, 157, 163,
170, 174, 188, 189

O

organisasi, 4, 5, 43, 51, 52, 53, 56,
72, 73, 74, 77, 78, 86, 87, 91,
99, 118, 142, 148, 158, 159,
168
orisinal, 19
otoriter, 2, 3, 6, 10, 20, 62

P

partisipan, 19
patriarkal, 3
peluang, 4, 7, 34, 36, 62, 101,
113, 146, 154, 155, 156
pemerintahan, 2, 3, 8, 13, 24, 32,
33, 35, 36, 39, 66, 68, 72, 76,
93, 99, 101, 149, 152, 157
pemilu, 1, 2, 4, 11, 12, 16, 18, 20,
24, 33, 34, 35, 36, 37, 55, 62,
63, 64, 68, 69, 77, 90, 93, 116,
136, 141, 144, 147, 150, 157,
158, 160, 162, 167, 168
pemimpin, 5, 6, 7, 32, 35, 38, 65,
68, 72, 76, 86, 94, 99, 100, 164
pendidikan, 2, 4, 5, 14, 25, 27, 43,
53, 54, 66, 73, 79, 84, 94, 100,
107, 108, 109, 110, 111, 118,
119, 143, 146, 154, 155, 156,
159, 167, 168
penelitian, 12, 13, 15, 16, 17, 19,
20, 30, 42, 44, 48, 55, 91, 98,
101, 135, 136, 160, 162, 164

Perempuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
 30, 31, 32, 40, 41, 42, 44, 45,
 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
 62, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100,
 101, 102, 103, 104, 105, 106,
 107, 108, 109, 110, 111, 112,
 113, 114, 115, 116, 117, 118,
 119, 120, 135, 136, 137, 138,
 139, 140, 141, 142, 143, 144,
 145, 146, 147, 148, 149, 150,
 151, 152, 153, 154, 155, 156,
 157, 158, 159, 160, 161, 162,
 163, 164, 165, 166, 167, 168,
 169
 politik, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24,
 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43,
 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 55,
 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78,
 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 90,
 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 101,
 102, 105, 106, 109, 114, 115,
 120, 136, 137, 138, 139, 141,
 142, 146, 147, 148, 149, 150,
 151, 152, 153, 154, 156, 157,

158, 159, 161, 162, 163, 167,
 168, 169
 Program, 4, 88, 110, 146, 155,
 187, 189, 194
 psikologis, 24, 25, 57, 107, 117

R

relasi, 14, 42, 44, 58, 66, 70, 79,
 98, 104, 142, 165
 responden, 16, 17, 19, 151

S

sejarawan, 14
 sosial, 1, 4, 10, 13, 14, 16, 18, 21,
 22, 24, 25, 26, 30, 31, 39, 43,
 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 58,
 59, 65, 77, 78, 79, 80, 85, 86,
 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101,
 103, 107, 109, 111, 112, 114,
 118, 120, 135, 141, 142, 143,
 148, 150, 154, 159, 162, 166
 Srikandi, 1, 4, 40, 41, 42, 152,
 167

W

wanita, 5, 13, 14, 24, 26, 27, 109,
 142, 156, 158, 164, 172

GLOSARIUM

agama/aga·ma/ *n* ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya: -- *Islam*; -- *Kristen*; -- *Buddha*;
-- **samawi** agama yang bersumberkan wahyu Tuhan, seperti agama Islam dan Kristen;

bahasa¹/ba·ha·sa/ *n* **1** *Ling* sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri; **2** percakapan (perkataan) yang baik; tingkah laku yang baik; sopan santun: *baik budi* -- *nya*;-- *menunjukkan bangsa*, *pb* budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat

seseorang (baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan);

budaya/bu·da·ya/ *n* **1** pikiran; akal budi: *hasil* --; **2** adat istiadat: *menyelidiki bahasa dan* --; **3** sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju): *jiwa yang* --; **4** *cak* sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah;

demokrasi/de·mo·kra·si/
/démokrasi/ *n* *Pol* **1** (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; **2** gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara;

dinamika/di·na·mi·ka/ *n* **1** *Fis* bagian ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan; **2** gerak (dari dalam); tenaga yang menggerakkan; semangat;

dominasi/do·mi·na·si/ *n* **1** penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (dalam bidang politik, militer, ekonomi, perdagangan, olahraga, dan sebagainya); **2** *Ling* hal tergantungnya suatu konstituen sintaktis pada simpai di atasnya;

ekonomi/eko·no·mi/ /ékonomi/ *n* *Ek* **1** ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); **2** pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; **3** tata kehidupan perekonomian (suatu negara); **4**

cak urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara);

emansipasi/eman·si·pa·si/ /émansipasi/ *n* **1** pembebasan dari perbudakan; **2** persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria): *Kartini adalah tokoh -- wanita Indonesia*;

-- **wanita** proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju

instrumen/in·stru·men/ /instrumén/ *n* **1** alat yang dipakai untuk me-ngerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas; **2** sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpul-

kan data sebagai bahan pengolahan; **3** alat-alat musik (seperti piano, biola, gitar, suling, trompet); **4** *ki* orang yang dipakai sebagai alat (diperalat) orang lain (pihak lain); **5** dokumen resmi seperti akta, surat obligasi;

Islam/Is·lam/ *n* agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.;

istri/is·tri/ *n* **1** wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; **2** wanita yang dinikahi: *almarhum meninggalkan seorang -- dan dua orang anak*;

-- **gelap** perempuan simpanan; perempuan piaraan (yang tidak dinikahi);

konstruksi/kon·struk·si/ *n* **1** susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan

sebagainya): *rumah itu kokoh karena -- nya beton bertulang*; **2** *Ling* susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata: *makna suatu kata ditentukan oleh -- dalam kalimat atau kelompok kata*;

kultural/kul·tu·ral/ *a* berhubungan dengan kebudayaan: *film kita harus mengandung nilai -- yang tinggi*

lembaga/lem·ba·ga/ *n* **1** asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); **2** bentuk (rupa, wujud) yang asli; **3** acuan; ikatan (tentang mata cincin dan sebagainya); **4** badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; **5** *ark* kepala suku (di Negeri Sembilan); **6** pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial

berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan;*adat diisi -- dituang, pb* hendaklah segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaan;

mutualisme/mu·tu·a·lis·me/ *n* hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan antara dua organisme, misalnya semut dan kutu daun

perempuan/pe·rem·pu·an/ *n* **1** orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; **2** istri; bini: -- *nya sedang hamil*; **3** betina (khusus untuk hewan);*bunyi -- di air, pb* ramai (gaduh sekali);

politik/po·li·tik/ *n* **1** (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): *bersekolah di*

akademi --; **2** segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: -- *dalam dan luar negeri*; *kedua negara itu bekerja sama dalam bidang -- , ekonomi, dan kebudayaan*; *partai --*; *organisasi --*; **3** cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan: -- *dagang*; -- *bahasa nasional*;

program/prog·ram/ *n* **1** rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan: *beberapa partai menyetujui -- pemerintah*; **2** *Komp* urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu;

BIODATA PENELITI



Peneliti bernama lengkap Heri Junaidi, Berasal dari keluarga Bengkulu, dan mengabdikan sebagai dosen Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pendidikan awal dari SDN No. 110 Palembang, SMP Tarbiyah Curup Rejang Lebong Dan kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo hingga selesai tahun 1990.

Strata 1 pada jurusan Perdata Islam Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang hingga mendapat gelar sarjana pada tahun 1994. Melanjutkan S2 pada program pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan gelar magister (MA) pada tahun 2002. Masuk pada program S3 pada tahun 2009 pada sekolah pascasarjana di Universitas yang sama selesai mendapat gelar Doktor Ekonomi Syariah 18 bulan kemudian dengan disertasi berjudul *Efisiensi Berkeadilan pada Kasus Usaha Songket Palembang*. Pendidikan non formal diikuti di beberapa negara seperti Belanda, Filipina dan Jerman dalam Bidang Pengembangan Perguruan Tinggi Islam

Anak dari pasangan Umar Usman dan Mariana memiliki berbagai pengalaman pekerjaan seiring dengan perkembangan akademik diantaranya pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Daruraja Cikalong Wetan Bandung (1989) dan Kepala Yayasan TK-SD-SMP-SMA Al-Manar Cikajang Garut Jawa Barat (1999). Membangun kursus dan bimbingan showdown (2000), dari tahun 2000 sampai tahun 2008 menjadi

guru honor di SD Negeri No. 1 Palembang, SD Negeri No. 33 Palembang, SMP Ethika Palembang, SMU Muhammadiyah VII Palembang, SMA Yanusa Jakarta Selatan. Di tahun yang sama mengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Palembang, Universitas Palembang, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Palembang pada mata kuliah metodologi, fiqh Muamalah dan Bahasa Inggris hingga kemudian menjadi dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.

Alumni Training of Trainer Lemhanas Pada Tahun 2017 pernah sebelumnya menjabat sebagai Bina Skripsi, Sekrtaris Program Studi, Ketua Program Studi Magester Ekonomi, Kepala Pusat Penjamin Mutu Pendidikan IAIN Raden Fatah Palembang, dan kepala laboratorium terpadu Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah , Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), menjadi wakil Rektor II IAIN Raden Fatah Dan Wakil Rektor II Masa Transisi menuju UIN Raden Fatah Palembang. Jabatan sekarang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah tahun 2020-2024.

Dalam keorganisasian pernah menjadi Ketua Theater Islam Darussalam (Therisda) Pondok Modern Gontor Ponorogo (1987-1989, Hakim Bahasa Rayon Pondok Modern Gontor Ponorogo (1990), Sekertaris Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII) Provinsi Sumatera Selatan (2000), Direktur Lembaga Pemerhati Ekonomi, Sosial dan Keagamaan el-Fikra Kampung Utan-Ciputat (2001-2002) Presidium III Ikatan Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2001-2002), Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Sumatera Selatan Jakarta (2001), Wakil Bidang Pengembangan keilmuan Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI

Orwil Sumatera Selatan (2005), Sekretaris Umum Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) IAIN Raden Fatah Palembang (2005-2010);Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang (2007-2009).

Karya ilmiah yang sudah dimiliki baik ditulis sendiri maupun bersama-sama tim adalah. *Pertama*, **dalam bentuk buku** yaitu: Terjemahan Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam kontemporer tentang isu-isu global (Jakarta: Ford Foundation-Paramadina, 2000, 2002); Paradigma Ilmu Syari'ah (Jogjakarta: Gama Media, 2003); Anatomi Fiqh Zakat (Jogjakarta: gama media, 2004); Negara Bangsa dan Negara Syari'ah dalam Perspketif (Jogjakarta: Gama Media, 2005); Figh Muamalah Kontemporer (Palembang: P3RF, 2004); Komunikasi Ulama Umara Sumatera Selatan (Palembang: P3RF, 2006); Profil Pengembangan Wisata Islami Kota Pagar Alam (Palembang: P3RF, 2007); Penjaminan Mutu IAIN Raden Fatah Palembang (Palembang: P3RF, 2008); Standar Penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk Jurnal (Palembang: P3RF, 2008); Wacana Bilik Kampus: Kumpulan Karya Sanggar Kerja Penulisan Karya Ilmiah (Palembang: P3RF, 2009); Jendela Ilmiah Kampus: Kumpulan Tulisan Terpilih Dosen IAIN Raden Fatah Palembang (Palembang: P3RF, 2009); Peta Alumni IAIN Raden Fatah Palembang 2000-2009 (Palembang: P3RF, 2010); Menggagas Fiqh Lingkungan Hidup (Jogjakarta: Gama Media, 2009); Membangun Daerah Berbasis Agama: Belajar dari Musi Banyu Asin (Jogjakarta: Gama Media, 2010); *Standar SAP IAIN Raden Fatah Palembang* (Palembang: P3RF, 2010). 3 buku dalam proses Menulis dan editing adalah: (1) Fiqh Gender; (2) Meretas Pemikiran Ekonom Kapitalis dan Muslim Kontemporer; (3) Dari Bilik Kamar Kost Ciputat [tulisan lepas masa proses kuliah dalam catatan Face book].

Kedua, Penelitian regional dan nasional, Sejarah Kudeta Dalam Kebudayaan Islam: Analisa Siyasah Kesultanan Palembang Darussalam (2001); Bina Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat di 11 Kabupaten/Kota wilayah Sumatera Melalui Peran Ulama (2002); Gerakan Oposisi Ormas Islam Ekstra Parleментар Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (2001); Gagasan Sistem Ekonomi Sayyid Quthb (Studi Tematik Atas Kitab *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*) [2002]; Islam Dan Politik di Indonesia (Studi Analisa Atas Kegagalan Mazhab Islam Politik di Indonesia) [2003]; Problematika Mahasiswa IAIN Raden Fatah Dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah (2003); Respon Mahasiswa IAIN Raden Fatah Terhadap Program Kekerasan dan Sensualitas di Media Televisi (2004); Filsafat “*Wong Kito Galo*”: Penelusuran Sosial Ekonomi Masyarakat Palembang Studi Penelusuran Sikap Masyarakat Pluralistik di Kawasan Sumatera Selatan (2004); Negara Bangsa Versus Negara Syari’ah (Pandangan Ulama Sumatera Selatan Antara Penentang dan Pendukung) [2005]; Rekonstruksi Lingkungan Belajar di Kota Perdagangan (Studi Pemikiran di Perguruan Tinggi Palembang (2005); Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Pendidikan dan dan Pendidikan Luar Sekolah di Wilayah Sumatera Selatan (2005); Teologi Maut: Memaknai Konsep Jihad Kelompok Radikalisme (2006); Analisis Pemikiran Ekonomi H.M. Soeharto (2007); Pemahaman Majelis Taklim Perempuan Kota Palembang Terhadap Pembagian Tugas Bidang Ekonomi Keluarga (2007); Respon Dosen IAIN Raden Fatah Palembang Terhadap Fiqh Lintas Agama (2008); Studi Kebijakan IAIN Raden Fatah Palembang Berwawasan Gender Melalui Gender Analysis Pathway (GAP) [2008]; Survey Dosen Ideal Menurut Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang (2009); Pergeseran Peran Ulama Era Otonomi

Daerah di SUMatera Selatan (2009); Peta Potensi Alumni IAIN Raden Fatah Palembang (2010); Reproductive Health in Madrasah's Curriculum of South Sumatra, Partnership Research Program Ministry For Women Empowerment And Child Protection, Flinders University and Center For Gender Studies (PSG) IAIN Raden Fatah Palembang (2011)

Ketiga, Hasil Karya Ilmiah dalam Jurnal Regional, Nasional dan Internasional diantaranya: Pendidikan Keberagaman: Peluang dan tantangan menuju kehidupan pluralistik di Indonesia (concencia, 2000); Model pembelajaran berbasis Emotional Spritual Quentient (concencia, 2000); Pendidikan Keluarga Berbasis Tauhidiah (concencia, 2001); Ekonomi dan Intervensi Spritualitas (Nurani, 2001); Islam Liberal: Benarkah Sekulerisasi Berkedok Muslim (Nurani, 2002); Islam dan Substansialisme (Nurani, 2002); Pola Relasi Gender Dalam Islam (al-Fatah, 2002); Membangun Desa Madani (al-Fatah, 2003); Moralitas Pembangunan Masyarakat dalam Perspektif Agama-Agama (al-Fatah, 2003); Gerakan Kudeta Kesultanan Palembang Darussalam: Benarkah Perebutan Kepentingan Keturunan (intizar, 2004); Intervensi spritualitas dalam dunia ekonomi umat (Nurani, 2005); Manuskrip Islam Pesantren: Telaah Konsep berbasis Sumatera Selatan (Makalah juara II Penulisan Karya Tulis Ilmiah Kalangan Akademisi Tingkat Propinsi, 2005); Respon Komunitas Santri Pedesaan Dan Perubahan Sosial (jurnal al-Fatah, 2006); Nikah Sirri: Subbordinasi Perempuan Berbungkus Hukum (Jurnal an-nissa, 2006); Tenunan Songket Melayu Palembang: *Sejarah, Filosofi, Dan Perkembangannya* (Jurnal Internasional di Malaysia, 2007); Feminisme dan Gender Menurut Islam (2007); Respon Komunitas Santri Pedesaan Dan Perubahan Sosial (jurnal al-Fatah, 2008); Nikah Sirri: Subbordinasi Perempuan Berbungkus Hukum (Jurnal an-nissa, 2008); *Tarbiyah As-*

Siyasah: Belajar Dari Kegagalan Calon Legislatif Pemilu 2009 (Jurnal Nurani, 2009); *Efisiensi dalam Sistem Ekonomi Islam* (jurnal ekonomi Fakultas Syari'ah, 2009; *Transaksi Valas Dalam Perspektif Syari'ah* (Jurnal Iqtishad Fak. Syari'ah UIN Jakarta, 2010); *Pendidikan Efisiensi: Sebuah Pendekatan Budaya Masyarakat Belajar* (2010); *Koperasi Sebagai Soko Ekonomi Kerakyatan: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Dan Pakistan* (2010) *Aqd Non Ribawi Pada Corporate Social Responsibility: Konsep, Dan Tawaran* (2011); *Menggugat Pemikiran Ekonomi Kaum Muda Kapitalis* (Jurnal Ekonomi Fak.Syari'ah, 2011). 2 Karya ilmiah masuk dalam Jurnal terindik Scopus Q3 dan Q2. Komunikasi dapat dilakukan lewat email: heri_junaidi24@yahoo.com, dan alamat blog: <http://heriju-naidi.blogspot.com/>



Rusmiatiningsih berasal dari Pati Jawa Tengah adalah dosen Ilmu Perpustakaan sekaligus penggiat Gender UIN Raden Fatah Palembang. Semasa Kuliah aktif dalam keorganisasian mahasiswa dan dipercaya pada 2013 menjadi Wakil Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Paembang. Berbagai pengalaman mendidik dan mengajar siswa di SMPN 35 Palembang, Sekolah Islam Al-Azhar Palembang. Kesemuanya menjadikan bekal penguatan pribadi setelah diangkat menjadi Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

Sebagai seorang akademis, alumni S2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memiliki karya seperti

“Customer Service Skills for Librarian” dimuat dalam Jurnal Visi Pustaka Perpustakaan Nasional edisi Desember 2015; *“Comparative Study on the Library Leadership between UII and UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: search for human resources, financial issues, and collection development”* dimuat dalam prosiding dan dipresentasikan dalam 5th International Conference of Asean Special Libraries 2017; *Studi Terhadap Pemikiran Sulisty-Basuki mengenai Ilmu Perpustakaan di Indonesia*, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017; “Antologi Literasi Digital: Kolaborasi pustakawan referensi di Perpustakaan UGM” dalam buku Antologi Literasi Digital terbit Agustus 2017; *“The Implementation of Information Technology Infrastructure in Archival Management System at Municipal Archives of Palembang-Indonesia: Analysis Based On Read & Giin Life Circle”*. dipresentasikan di Rajasthan India 2 Februari 2018. *“Accomplishing the Needs for Information in Taman Baca Masyarakat Guyub Rukun Jambon Sedayu Yogyakarta”*, dipresentasikan dan dipublikasikan pada prosiding dalam International Conference of Library, Archive and Information Science (ICOLAIS) 2017 di Universitas Indonesia; *“The next generation Librarian”*, Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca Vol 33(2) 2017; *“Legalisasi Arsip Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Persidangan”*, dipublikasikan pada terbitan Jurnal Kearsipan ANRI Januari 2018; *“Analisis Sistem Informasi Union Catalogue Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dengan Pendekatan EUCS”*, Jurnal Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vo. XVIII No.2 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang 2018



Asisten Peneliti Bernama Chici Rima Putri Pratama, Anak pertama pasangan Khairudin dan Zainab. Lahir di Palembang pada 16 September 1993. Tamat dari Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul skripsi *Kapitalisasi Indeks Saham Indonesia (ISSI) Terhadap Broud Money (M2)*

Setamat dari Strata I Bekerja Lembaga Kepribadian Carissa dibawah pimpinan Sri Suroso, dan kemudian kembali ke dunia akademik mengabdikan di Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah Palembang. kemudian di Program Studi Strata 2 Fakultas Adab dan Humaniora. Pada tahun yang sama diamanatkan untuk mengurus bagian akademik pada Fakultas yang sama. Sekarang menjadi staff Pusat Pengembangan Usaha Badan Layanan Umum (PPU-BLU) UIN Raden Fatah

Selain kesibukan dunia akademik, menjadi sekretaris bidang kerjasama dan pengembangan ekonomi Forum Puspa Sriwijaya Sumatera Selatan. Pada tahun 2017 melanjutkan program S2 Magister Ekonomi dan tamat 2019 dengan tesis “ *Ketahanan Ekonomi Keluarga: Studi Kasus Pengusaha Pempek Palembang*. Beberapa karya yang telah dibuat selama masa akademik yaitu *Value Children Dalam Budaya Adat: Eksistensi Anak Laki Laki Pada Suku Komering* (2017); *Gender Mainstreaming: Peluang dan Tantangan di Dunia Akademik* (2018); Editor beberapa karya buku seperti Bahasa “Wong Rumah”: Simbol Marginalisasi Perempuan di Sumatera Selatan (2018); Bahasa *Metodologi Berbasis Temu Kenali* (2019). Alamat email chici_rima@yahoo.com.